



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj-IP)



**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atashasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Paringin, Januari 2024

Kepala Dinas,



Dr. AKHRIANI, S. Pd., M. AP

NIP. 19710228 199702 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang dihasilkan di tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran meningkatnya realisasi Investasi Daerah dengan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023 sebesar 471,226 Milyar atau capaian kinerja sebesar 78,53%.
- b. Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indicator persentase tenaga kerja yang terserap sebesar 97,30% dengan capaian kinerja sebesar 149,69%.
- c. Sasaran meningkatnya kemudahan berusaha dengan Indeks Kemudahan Berinvestasi tahun 2023 sebesar 88,475 dengan capaian kinerja 102,33%
- d. Sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan indicator persentase tenaga kerja yang terlindungi Tahun 2023 sebesar 92, % atau capaian kinerja 127,12%,

Ada 3 (tiga) indikator yang telah memenuhi target dengan capaian melebihi 100% dan kategori capaian "**Sangat Baik**" yaitu sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja, meningkatnya kemudahan berinvestasi dan meningkatnya perlindungan tenaga kerja. Sedangkan ada 1 (satu) sasaran dengan capaian kinerja dengan kategori capaian **Tinggi** yaitu sasaran meningkatnya realisasi investasi.

Realisasi anggaran belanja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. **37,068,905,907,-** atau **96.47%** dari pagu sebesar Rp. **38,424,373,279,-** sehingga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan telah melakukan **efisiensi** anggaran sebesar **Rp. 1,355,467,372.**

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ke depan.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2024, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Struktur Organisasi	2
1.2 Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Isu-Isu Strategis.....	5
1.4 Keadaan Pegawai	5
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	6
1.6 Landasan Hukum.....	7
1.7 Sistematika Laporan Kinerja.....	8
BAB 2 PERENCANAAN	10
2.1 Rencana Strategis.....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	12
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	16
2.3.1 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis	18
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1 Pengukuran Kinerja.....	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	21
3.2.1 Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi	22
3.2.2 Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	28
3.2.3 Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	33
3.2.4 Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	37
3.2.5 Evaluasi dan Analisis Kinerja Program.....	41
3.3 Realisasi Anggaran	45
3.3.1 Realisasi Pendapatan	45
3.3.2 Realisasi Belanja.....	45
3.4 Analisis Efisiensi	47
3.5 Inovasi.....	49
3.5 Kolaborasi Lintas Sektor.....	54
BAB 4 PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rencana Tindak Lanjut	57
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur.....	3
Gambar 2.1 Persentase Program Prioritas Tahun 2023.....	18
Gambar 3.1 Tingkat Capaian Kinerja	22
Gambar 3.2 Capaian s.d 2023 terhadap Akhir Renstra	23
Gambar 3.3 Realisasi Investasi Triwulanan	23
Gambar 3.4 Sebaran Investasi Berdasarkan Sektor	24
Gambar 3.5 Nilai Realisasi Investasi 2021 s.d 2023	24
Gambar 3.6 Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional.....	26
Gambar 3.6 Penyerapan Tenaga Kerja 2021 s.d 2023	29
Gambar 3.7 Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional.....	29
Gambar 3.8 Sistem Perizinan Berusaha secara Online	35
Gambar 3.9 Sistem Perizinan Pintar secara Elektronik.....	35
Gambar 3.10 Aplikasi SIMBG.....	36
Gambar 3.11 Realisasi Pendapatan	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pegawai	6
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026	11
Tabel 2.2 Rencana Strategis DPMPTSPPTK 2021-2026	12
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama.....	13
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 2.5 Target Belanja Tahun 2023	16
Tabel 2.6 Target Belanja Program.....	17
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	18
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja	21
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi.....	22
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Investasi dengan Nasional	25
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	28
Tabel 3.6 Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja dengan Kab/Kota se Kalsel	30
Tabel 3.7 Capaian Indikator Indeks Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	38
Tabel 3.8 Capaian Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	38
Tabel 3.9 Jumlah Peserta jamsostek Kab Balangan 2023	38
Tabel 3.10 Perbandingan Kepesertaan Jamsostek dengan Kab/Kota Se Kalsel	39
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program.....	41
Tabel 3.12 Ikhtisar Realisasi Belanja Program	46
Tabel 3.13 Realisasi Kinerja dan Anggaran	47
Tabel 3.14 Tingkat Efisiensi Anggaran per Sasaran.....	48
Tabel 3.15 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Program.....	48

Bab 1 Berisi :

1. *Struktur Organisasi*
2. *Fungsi dan Tugas*
3. *Isu Strategis*
4. *Keadaan Pegawai*
5. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
6. *Landasan Hukum*
7. *Sistematika LKjIP*

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan;
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

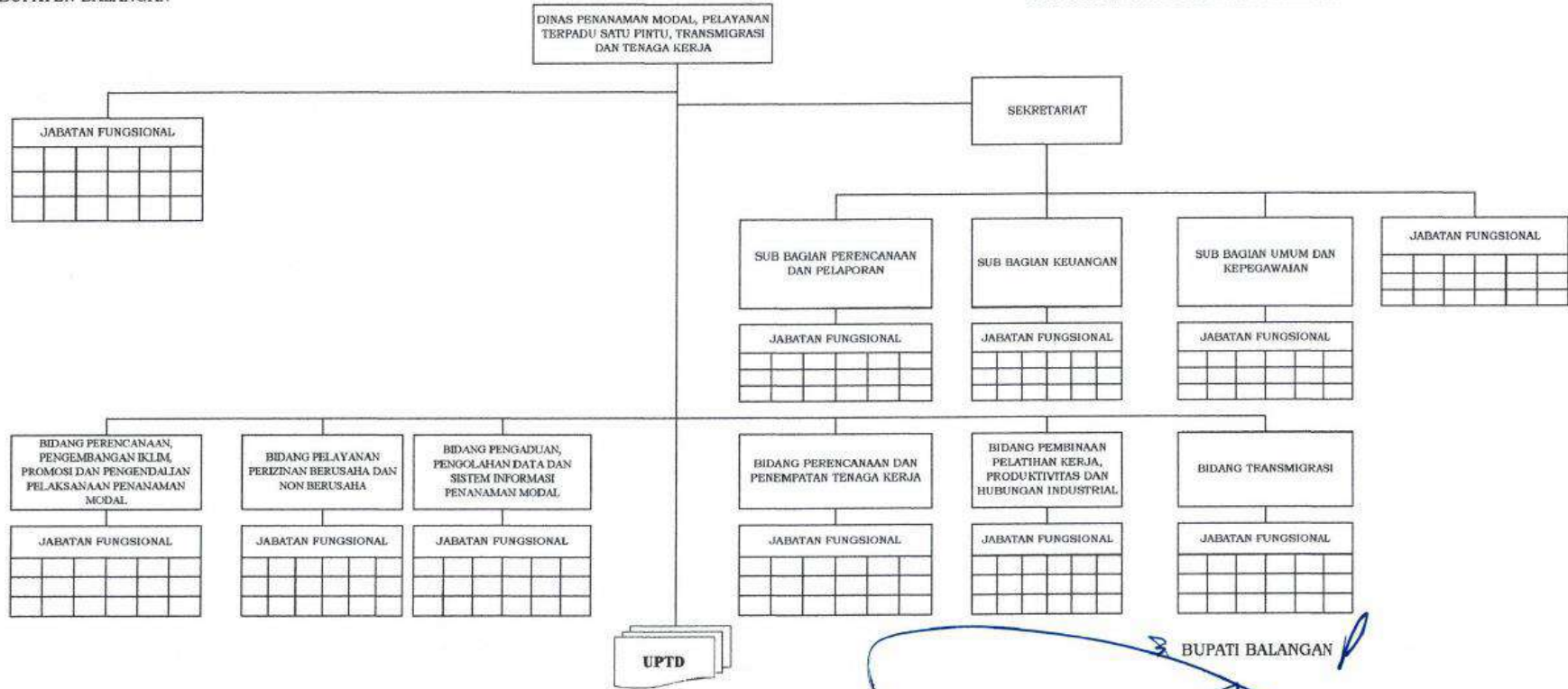
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri atas:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat** terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. **Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**
4. **Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha**
5. **Bidang Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**
6. **Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja**
7. **Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial**
8. **Bidang Transmigrasi**
9. **Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan**
10. **Kelompok Jabatan Fungsional**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 107 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



BUPATI BALANGAN

H. ABDUL HADI

BAGIAN HUKUM

KABAG HUKUM KASUBAG

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan melaksanakan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, transmigrasi dan tenaga kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang:
 1. Pengembangan iklim penanaman modal;
 2. Promosi penanaman modal;
 3. Pelayanan penanaman modal;
 4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 5. Data dan sistem informasi penanaman modal;
 6. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, perencanaan, pembangunan;
 7. Pengembangan kawasan transmigrasi;
 8. Pelatihan kerja;
 9. Produktifitas tenaga kerja;
 10. Penempatan tenaga kerja; dan
 11. Hubungan industrial;
- b. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat
2. Melaksanakan Koordinasi secara berkelanjutan dengan SKPD terkait
3. Meningkatkan Iklim Penanaman Modal Daerah.
4. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang berkualitas.
5. Peningkatan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkompeten dan tersertifikasi.
6. Optimalisasi Balai Latihan Kerja dengan meningkatkan Infrastruktur, sarana prasarana pelatihan dan kapasitas instruktur.
7. Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja.
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dan pengusaha.
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan transmigrasi dan kualitas rombongan transmigran melalui pelatihan dan pengembangan produktivitas, pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian.

1.4 Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan saat ini kebutuhan SDM baru terpenuhi sejumlah 42 orang ASN dengan rincian sebagai mana pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Rincian Jumlah Pegawai

No.	Uraian	Jumlah	S.3	S.2	S.1	Diploma
1	Kepala Dinas	1	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	6	-	3	3	-
4	Kepala Sub Bagian/Kepala UPT	5	-	2	2	1
5	JF Sub Koordinator	14	-	8	6	-
6	JF Instruktur	5	-	-	5	-
7	Pelaksana	10	-	-	10	-
	JUMLAH	42	1	14	24	1

**data per 31 Desember 2023*

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana (Sarpras) kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transnaker saat ini secara kuantitatif sudah sebanding dengan beban pekerjaan. Namun secara kualitas ada beberapa sarpras yang masih butuh diperbaiki dan peremajaan seperti: perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan prima. Adapun Sarpras kerja yang tersedia di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk menunjang kelancaran tugas adalah sebagai berikut:

- Loker Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Workshop Pelatihan Kerja BLK
- Loker Pelayanan AK-1
- Ruang Tunggu Pelayanan
- Loker Konsultasi
- Ruang ARsip
- Ruang Bermain Anak
- Parkir
 - Kendaraan Operasional Pelatihan Kerja /MTU
 - Kendaraan Operasional Perizinan

1.6 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
8. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Urusan Penanaman Modal
9. Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
10. PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Permen BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Daerah
12. Permen BKPM Noomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Bebas Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal.
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Balangan.
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang kedudukan struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
16. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahunmendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapaisasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Bab 2 Berisi :

1. *Rencana Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2023*

Perencanaan

2.1 Rencana Strategis

Memasuki Tahun 2023, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Penyesuaian Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan manifestasi komitmen Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya. RPJMD Pemerintah Kabupaten Balangan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah **‘Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera’** dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alur *cascade* RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Indeks Infrastruktur Publik
			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Indeks Infrastruktur Permukiman
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air
				Indeks Kualitas Udara
2	MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MSYARAKAT BALANGAN BERBASIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
				Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa
				Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
				Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)
		Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Angka Pengangguran Terbuka
3	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT BALANGAN	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkualitas	Meningkatnya Indeks Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
				Angka Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya Indeks Kesehatan	Meningkatnya Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup
				Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)
				Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)
				Prevalensi Stunting
				Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (ASFR)
4	MENINGKATKAN KUALITAS DAN LAYANAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI ABDI MASYARAKAT DAN ABDI NEGARA	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	NILAI SAKIP
				Opini BPK
				Nilai EKPPD
				Indeks Pelayanan Publik
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

5	MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan Yang Harmonis dan Kondusif	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan
			Bertahannya Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Angka PPKS yang tertangani
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA
				Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	Indeks Resiko Bencana
Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya			
		Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	Indeks Desa Membangun	

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi** dengan indikator capaian sasaran **Pertumbuhan Nilai Investasi** dan **Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka** dengan Indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka**.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan visi **“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”** dan misi ke 2 **“Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif”**, maka tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan selama 5 tahun anggaran adalah Tujuan SKPD hasil penyesuaian Renstra Tahun 2021 s.d 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan dengan Indikator Persentase peningkatan Realisasi Investasi.
2. Menurunnya angka pengangguran terbuka dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Untuk mewujudkan tujuan SKPD diatas disusun Sasaran Strategis SKPD beserta Indikator kinerja utama sesuai hasil rewiu Penyesuaian Renstra 2021 s.d 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Hasil Reviu Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA (2021)	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR RENSTRA (2026)
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Terwujudnya Investasi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Rp	216,47 M	400M	600 M	610 M	615 M	620 M	1.100 M
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Skor			69,6	70,5	71	71,5	72
2.	Menurunnya angka pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	%	60%	65 %	65%	70%	75%	97%	97%
		Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	%			90%	95%	95%	100%	100%

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBERDATA
1	2	3	4
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) /Kementerian Investasi/BKPM
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terserap	Sakernas BPS
3	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Kementerian Investasi/BKPM dan (IKM)
4.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	Wajib Lapor Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan

Setelah sararan strategis beserta indicator ditetapkan, kemudian disusunnya makna dan formulasi perhitungan atas indicator yang telah ditetapkan beserta Sumber perolehan Data hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai realisasi investasi adalah angka yang diperoleh berdasarkan press release dari Kementerian Investasi/BKPM yang diterbitkan per Triwulan. Angka realisasi investasi PMDN dan PMA setiap Triwulan dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
2. Persentase penyerapan tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja pada tahun N dan data ini diperoleh dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh BPS. Adapun Formulasi perhitungan adalah $\text{Jumlah Penduduk Yang Bekerja} / \text{Jumlah Angkatan Kerja} \times 100\%$.
3. Indeks Kemudahan Berinvestasi untuk mengetahui sejauh mana kemudahan perizinan yang diberikan dalam pelaksanaan berusaha di Kabupaten Balangan dan Nilai diperoleh dari hasil penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh Kementerian Investasi dan hasil survey IKM.
4. Persentase tenaga kerja yang terlindungi adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang masuk data jaminan social dengan jumlah tenaga kerja terdaftar, perolehan data dari Wajib Lapor Ketenagakerjaan Kemnaker RI. Formulasi perhitungannya adalah $\text{Jumlah Peserta BPJS} / \text{Tenaga Kerja Terdaftar} \times 100\%$.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal PTSPTTK Kabupaten Balangan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD dan Penyesuaian Renstra SKPD Tahun 2021-2026. Dinas Penanaman Modal PTSPTTK Kabupaten Balangan telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	600 M
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	65%
3	Meningkatkan Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berusaha/Berinvestasi (EoDB)	69.6
4	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	90%

Pada tabel 2.4 merupakan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan SKPD (Terwujudnya Investasi yang berkelanjutan dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka) dapat dijelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Sasaran meningkatnya realisasi Investasi daerah dengan indicator realisasi Investasi sebesar 600 M pada tahun 2023 mengalami peningkatan target yang signifikan dari target PK tahun 2022 yang hanya 252 M, peningkatan target ini dikarenakan pada tahun 2022 lalu capaian kinerja realisasi investasi mencapai 169,19% yaitu dengan realisasi sebesar 403,601 M sehingga peningkatan target perlu dilakukan.
2. Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indicator persentase tenaga kerja yang terserap mengindikasikan bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja merupakan factor utama yang mempengaruhi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, target yang ditetapkan adalah 65%.
3. Sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi mengindikasikan bahwa salah satu factor yang dapat meningkatkan realisasi investasi di Daerah adalah salah satunya melalui kemudahan berinvestasi bagi para calon investor, target indeks kemudahan berinvestasi yang ditetapkan adalah 69,6.
4. Sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja merupakan salah satu factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, dengan terlindunginya tenaga kerja maka potensi PHK yang mengakibatkan Pengangguran jadi berkurang, target perlindungan tenaga kerja ditetapkan sebesar 90%.

Untuk mendukung pencapaian keempat sasaran strategis diatas telah disusun beberapa strategi yang akan dilakukan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya realisasi investasi daerah beberapa strategi kebijakan direncanakan seperti
 - Meningkatkan iklim investasi di Daerah dengan target 1 sektor potensi investasi baru.
 - Meningkatkan rencana/ minat investasi dengan target rencana investasi/Nilai persetujuan investasi sebesar 210 M.
 - Meningkatkan kepatuhan penyampaian LKPM dengan target 100% Pelaku Usaha terdaftar yang menyampaikan LKPM.
2. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja ditindaklanjuti dengan:
 - Meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan target 60% tenaga kerja yang disiapkan sesuai kebutuhan dunia kerja.
 - Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja dengan persentase permintaan tenaga kerja yang dapat dipenuhi.
 - Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja dari realisasi investasi baru dengan target tambahan 300 tenaga kerja dari investasi baru.

3. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi ditindaklanjuti dengan:
 - Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan target Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88 (A) atau Sangat Baik.
 - Meningkatnya Pengelolaan data dan informasi penanaman modal dengan target 100%.
4. Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja ditindaklanjuti dengan:
 - Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dengan target 100% pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan.
 - Meningkatkan keberadaan perusahaan dengan tata kelola kerja yang layak yang memiliki Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, Struktur Skala Upah serta Jaminan Sosial bagi Karyawannya.
5. Sementara sebagai penunjang dalam pencapaian sasaran strategis SKPD beberapa upaya juga diupayakan:
 - Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dengan target Nilai akuntabilitas Kinerja yaitu 71 (BB).
 - Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran dengan target 90% status asset dalam keadaan layak pakai/ baik.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp Rp.38.424.373.279,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 34.034.297.479,00 dan belanja modal sebesar Rp.4.390.075.800,00 sebagaimana tabel:

Tabel 2.5 Target Belanja Tahun 2023

No	Uraian	Pagu	Persentase
1	BELANJA OPERASI	Rp.34.034.297.479	88,57%
1.a	Belanja Pegawai	Rp.7.342.063.728	
1.b	Belanja Barang dan Jasa	Rp.26.692.233.751	
2	BELANJA MODAL	Rp.4.390.075.800	11,43%
	Jumlah	Rp.38.424.373.279	100%

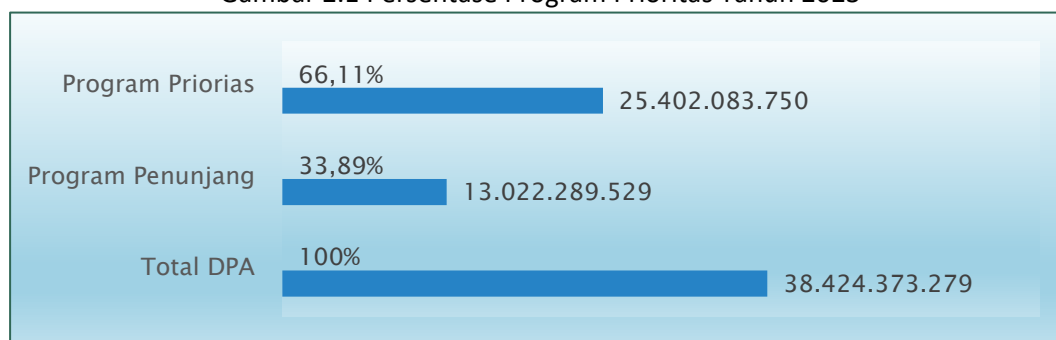
Dari tabel target belanja tahun 2023 tergambar bahwa anggaran untuk membiayai belanja operasi sebesar 88,57% dari total anggaran dan belanja modal sebesar 11,43%. Sedangkan untuk rincian anggaran berdasarkan Program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Target Belanja Program

No	Program	Indikator	Target	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	71 (BB)	13,022,289,529
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Tambahan Tenaga Kerja dari Investasi Baru	300 Orang	52,598,600
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	60%	14,119,215,100
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	65%	1,255,473,500
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang terselesaikan	100%	4,267,296,100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1	195,951,400
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	210 M	3,639,849,000
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	88.00 (A)	617,437,750
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	100%	535,380,800
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	406,463,400
11	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16%	112,275,500
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19,05%	200,142,600
TOTAL				38,424,373,279

Dari tabel diatas dapat dilihat ada 12 Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 serta alokasi anggaran per Program dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis SKPD yang terdiri dari 4 (empat) Program Urusan Tenaga Kerja, 5 (lima) Program Urusan Penanaman Modal, 2 (Dua) Program Urusan Transmigrasi dan 1 (Satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Ada sebanyak 4 Program dengan alokasi anggaran paling tinggi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 13,022,289,529,- ,Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp. 14,119,215,100,-, Program Hubungan Industrial sebesar Rp. 4,267,296,100 ,- , Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 3,639,849,000 ,- sementara Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi adalah dengan alokasi paling kecil yaitu Rp. 112,275,500,.Sedangkan total anggaran berdasarkan Program Prioritas Tahun 2023 disajikan pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Persentase Program Prioritas Tahun 2023



Presentase anggaran prioritas terhadap total anggaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang dialokasikan sebesar 66,11% berbanding 33,89% Program Penunjang, menunjukkan keseriusan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah disusun.

2.3.1 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis.

Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM YANG Mendukung	ANGGARAN	TOTAL	%
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 195.951.400	Rp 4.371.181.200	11,47 %
		Program Promosi Penanaman Modal	Rp 3.639.849.000		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 535.380.800		
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 52.598.600	Rp15.427.287.200	40,48 %
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 1.255.473.500		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 14.119.215.100		
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Rp 4.267.296.100	Rp 4.267.296.100	11,20 %
4	Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 406.463.400	Rp 1.023.901.150	2,69%
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 617.437.750		

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja adalah yang paling besar yaitu 15.427.287.200 untuk membiayai 3 Program Prioritas. Kebijakan ini karena ada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Tahun 2022 yakni diangka 3,98 % sehingga dengan adanya alokasi anggaran yang lebih diharapkan penyerapan tenaga kerja meningkat dan berpengaruh langsung terhadap penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan. Anggaran juga dialokasikan untuk sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja sebesar Rp 4.267.296.100 yang mana mayoritas belanja untuk pembayaran premi BPJS bagi Pekerja Rentan sebagai komitmen Pemda dalam melindungi tenaga kerja di Kabupaten Balangan. Sedangkan untuk sasaran meningkatnya investasi daerah anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp 4.371.181.200 untuk membiayai 3 Program Prioritas dan untuk sasaran meningkatnya kemudahan berusaha/berinvestasi sebesar Rp 1.023.901.150.

BAB 3

Bab 3 Berisi :

1. Pengukuran Kinerja
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3. Realisasi Anggaran
4. Analisis Efisiensi
5. Inovasi
6. Kolaborasi

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Dalam pemaknaan dari capaian nilai kinerja, Pemerintah Kabupaten Balangan menetapkan Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja untuk Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 untuk semua SKPD di Kabupaten Balangan, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Capaian Kinerja Kabupaten Balangan Tahun 2023

Interval Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja	Kode
I	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
II	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
III	$66\% \leq 75\%$	Sedang
IV	$51\% \leq 65\%$	Rendah
V	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dasar Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja (DPMPTSPTTK) Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sasaran strategis berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	600 M	471,226 M	78,53%	Tinggi
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	65%	97.30%	149.69%	Sangat Baik
3	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	69.6	88.475	127,12%	Sangat Baik
4	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	90%	92.09%	102.33%	Sangat Baik

Dari tabel sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan terdapat 3 (tiga) indikator yang telah memenuhi target dengan capaian melebihi 100% dan kategori capaian “**Sangat Baik**” yaitu sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja, meningkatnya kemudahan berinvestasi dan meningkatnya perlindungan tenaga kerja. Sedangkan ada 1 (satu) sasaran dengan capaian kinerja dengan kategori capaian **Tinggi** yaitu sasaran meningkatnya realisasi investasi.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Persentase/ tingkat capaian kinerja masing masing sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tahun 2023 disajikan sebagaimana pada grafik / gambar 3.1:

Gambar 3.1 Tingkat capaian Kinerja



Dari gambar 3.1 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan ada 3 (tiga) sasaran yang telah memenuhi target dengan capaian melebihi 100% dan kategori capaian “**Sangat Baik**” yaitu meningkatnya penyerapan tenaga kerja 149,69%, meningkatnya kemudahan berinvestasi 127,12% dan meningkatnya perlindungan tenaga kerja 102,22% dan satu sasaran dengan kategori capaian “**Tinggi**” yaitu Sasaran meningkatnya realisasi investasi 78,54%. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

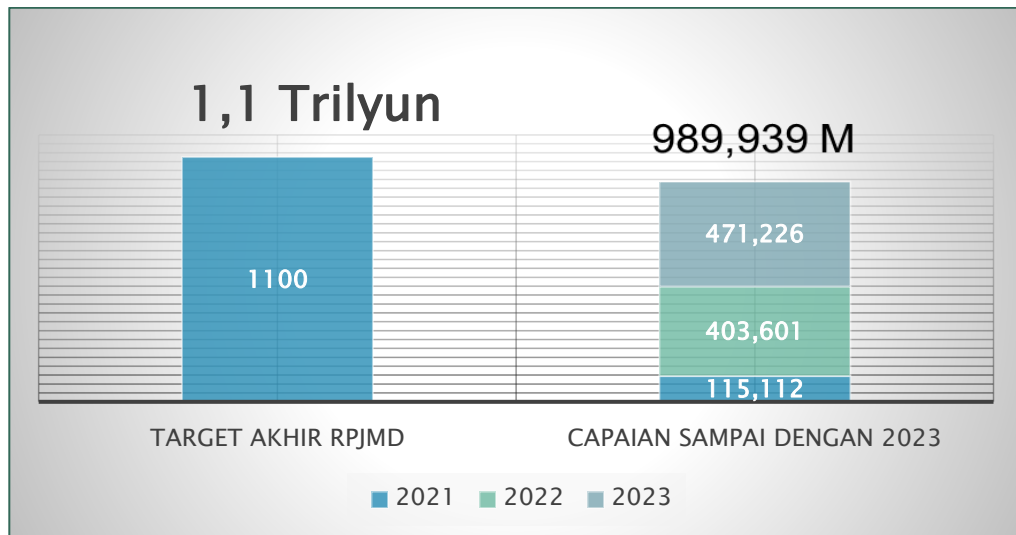
3.2.1 Sasaran Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

Indikator	2022	2023			Capaian s.d 2023 terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Realisasi Investasi	169,19 %	600 M	471,226 M	78,53%	89,99%
Rata-rata Capaian				78,53%	89,99%

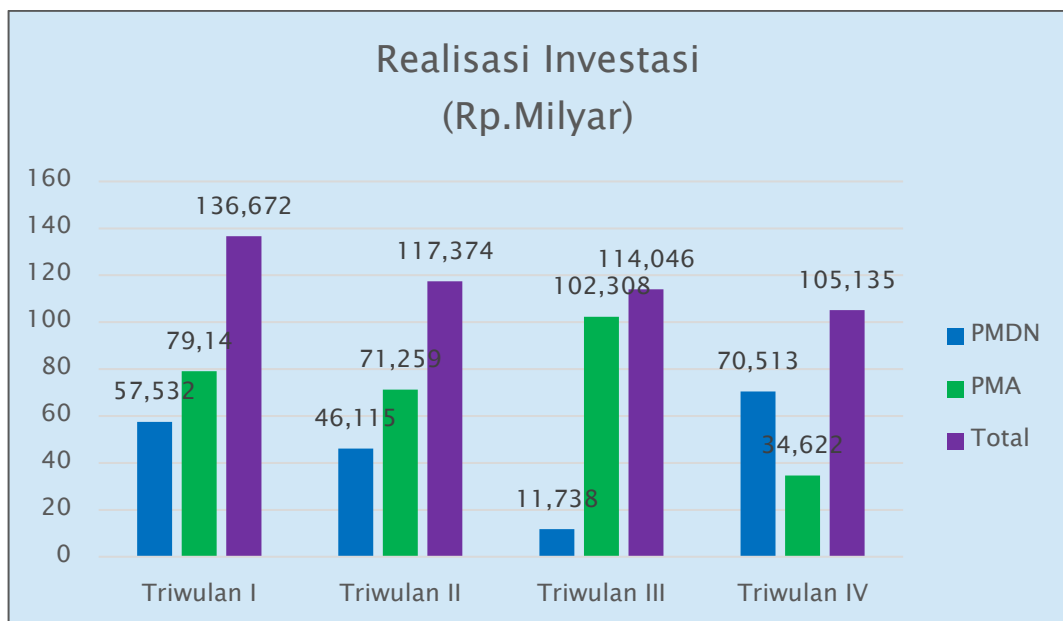
Target Realisasi Investasi semula hanya 252,50 M diperubahan ditingkatkan menjadi 600 M berdasarkan hasil reuiu karena pada Riilis LKPM Triwulan 2 sudah tercapai 100%, kemudian untuk realisasi Investasi Tahun 2023 diangka 471,226 M, dengan capaian kinerja 78,53% dengan Kategori capaian **Tinggi**.

Gambar 3.2 Capaian s.d 2023 terhadap target Akhir Renstra Tahun 2026



Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2023 yang mencapai 989,939 Miliar terhadap target capaian akhir RPJMD tahun 2026 yang sebesar 1,1 Trilyun maka pencapaian sudah mencapai angka **89,99%**.

Gambar 3.3 Realisasi Investasi Triwulanan Berdasarkan PMDN dan PMA Tahun 2023



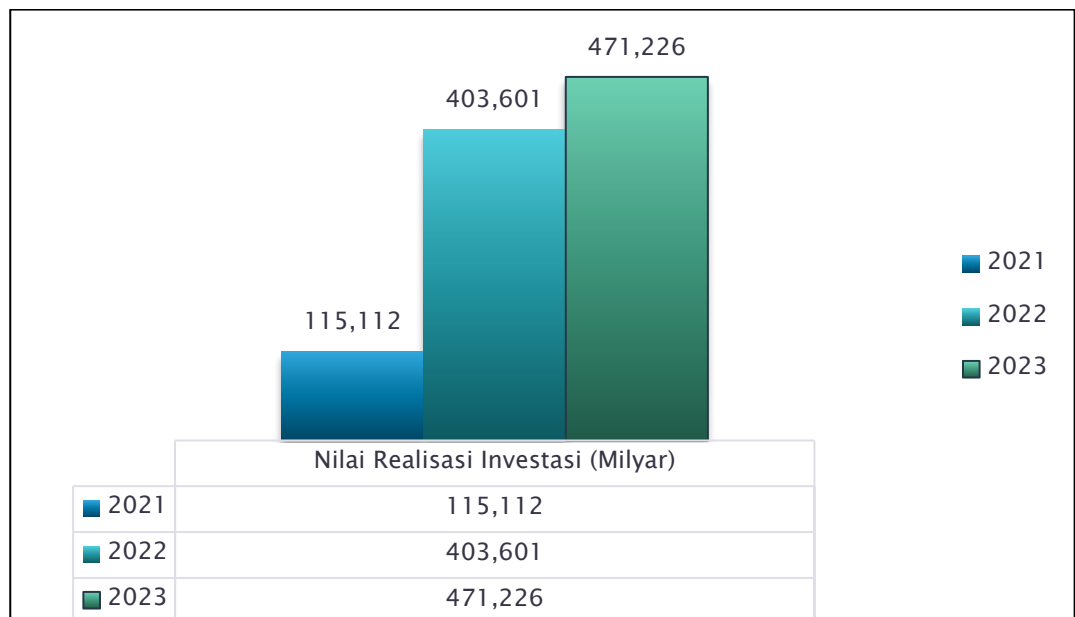
Realisasi Investarsi dihasilkan dari LKPM secara periodic baik PMDN dan PMA. Tren realisasi investasi dari Triwulan 1 sampai dengan 4 cenderung menurun, hal ini berbeda dengan tren Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang mana realisasi pada Triwulan 4 pada Tahun tersebut meningkat dari 3 triwulan sebelumnya. Penurunan realisasi pada Triwulan 4 Tahun 2023 ini disebabkan angka dari realisasi yang dilaporkan oleh 3 Perusahaan (PMA) potensi penyumbang Nilai yang tinggi ditolak karena pelaporan melebihi batas waktu penyampaian LKPM.

Gambar 3.4 Sebaran Investasi berdasarkan Sektor



Seperti tahun sebelumnya Investasi di Kabupaten Balangan masih dominan pada sector Pertambangan yang menyumbang sebesar 398,895 Milyar atau lebih dari 50% diikuti sector perumahan ,Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar 47,670. Sementara sector yang potensi menyerap Tenaga Kerja yaitu Pertanian masih belum ada investasi yang masuk.

Gambar 3.5 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2023.



Tren realisasi investasi selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu meningkat. Pencapaian kinerja tahun 2023 didapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar **Rp.471.226.861.079** (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Pulu Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2022 realisasi investasinya sebesar Rp 403.601.380.621,00 (Empat Ratus Tiga Milyar

Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Pulu Satu Rupiah). Disini terjadi mengalami **peningkatan** sebesar **Rp.67.625.480.457** atau **16,76%** dari capaian tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 atau periode pertama Renstra yang capaiannya 115,112 M, maka capaian sampai dengan tahun ini mengalami peningkatan sebesar **356,114 M**.

Perbandingan realisasi dengan Provinsi dan Nasional

Perbandingan realisasi kinerja antara Kabupaten Balangan, Provinsi dan Nasional pada Tahun 2023 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Perbandingan realisasi Investasi dengan realisasi Provinsi dan Nasional

Perbandingan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Persentase Peningkatan
Nasional	1.207,2 T	1.418,9 T	17,53%
Provinsi	15.296,11 M	19.762,24 M	29,19%
Balangan	403,601 M	471,226 M	16,76%

Pada tabel dapat kita lihat besarnya capaian realisasi investasi Provinsi Kalimantan Selatan mencapai Rp 19.762,24. Pada besarnya capaian realisasi tersebut Kabupaten Balangan mengambil bagian sebesar **Rp 471.226.861.079** atau sebesar **2,38%** dari capaian realisasi Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan capaian realisasi investasi nasional mampu mencapai **Rp 1.418,9 T** dimana Kabupaten Balangan mengambil bagian sebesar Rp. **471.226.861.079** dari capaian tersebut atau sebesar **0,033%** dari capaian realisasi Nasional. Sedangkan perbandingan peningkatan investasi dari tahun sebelumnya untuk peningkatan investasi Provinsi adalah yang paling signifikan yaitu sebanyak 29,19% dan nasional sebanyak 17,53%, sementara untuk kabupaten Balangan sebanyak 16,76%.

Faktor Pendorong dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023

1. Pengembangan iklim penanaman modal dengan hasil 1 sektor potensi investasi baru yaitu sector pasar agrobisnis yang dituangkan dalam kajian /dokumen IPRO.
2. Promosi penanaman modal yang menghasilkan Nilai persetujuan investasi/ rencana investasi bagi PMDN sebesar 441 M berdasarkan penerbitan NIB Tahun 2023.
3. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal yang menghasilkan peningkatan kepatuhan para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM pada Tahun 2023 ada sebanyak 265 kegiatan usaha dilaporkan.

4. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal kepada 232 pelaku usaha/UMKM di Kecamatan sekaligus fasilitasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berujung pada persetujuan /rencana penanaman modal.
5. Pengawasan Penanaman Modal secara jemput bola kepada 41 Pelaku Usaha oleh Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Balangan.
6. Kegiatan sosialisasi perizinan berusaha melalui OSS RBA di 8 Kecamatan sehingga diperoleh 181 Pelaku usaha yang melakukan perizinan sehingga menambah potensi realisasi investasi.
7. Keberhasilan pembinaan, pemantauan dan pengendalian yang dilaksanakan aparat DPMPSTP serta peran pemerintah daerah melalui berbagai Inovasi.
8. Fasilitasi Kemitraan bagi Pelaku Usaha dengan melakukan kerjasama/MOU melalui Aplikasi BATUTUKAR.
9. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui OSS RBA, SI Cantik Cloud sebagai upaya rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018.
10. Akselerasi percepatan realisasi keberadaan Mal pelayanan Publik.
11. Penyusunan/Pembaharuan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Balangan.
12. Penyusunan Dokumen Investmen Project Ready to Offer (IPRO) yaitu potensi Investasi pasar Agrobisnis.
13. Bimtek OSS /Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
14. Bimtek Service Excellence bagi pelaku pelayanan perizinan
15. Bimtek Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
16. Pengusulan Produk Hukum tentang Kemudahan Berusaha/ Penanaman Modal.

Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Tim Pengawasan Penanaman Modal belum optimal.
2. Tidak terangkatnya potensi investasi di setiap sector yang menyebabkan Investasi masih didominasi sector pertambangan dan penggalian.
3. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) belum dijadikan pegangan dalam pengembangan ekonomi daerah.
4. Belum lengkapnya informasi pada peta potensi tentang sector usaha prioritas Daerah yang siap ditawarkan kepada Investor (IPRO).

5. Belum adanya penanaman modal besar yang bermitra dengan UMKM.
6. Belum adanya keselarasan antara tata ruang dengan kebutuhan investasi.
7. Belum terjadinya sinergitas antar SKPD terkait event/ kegiatan promosi potensi daerah.
8. Belum selesainya Peraturan daerah tentang Pemberian Fasilitas /insenti Kemudahan Berusaha.
9. Masih belum terpetakan berapa Jumlah Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
10. Belum adanya Pejabat Fungsional penata Laksana Penanaman Modal/ Pengawas Penanaman Modal.
11. Sebagian Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM.
12. Kewenangan untuk pelaporan LKPM ada di kantor pusat perusahaan sehingga untuk lokasi cabang di Kabupaten Balangan tidak memiliki hak akses untuk menyampaikan pelaporan hal ini yang menjadi permasalahan di daerah sehingga laporan terkendala.
13. Belum tersedia sistem informasi investasi yang mudah, interaktif dan komprehensif.

Solusi/ Strategi Pemecahan masalah

Solusi/ Strategi Pemecahan masalah dalam meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Balangan.
2. Meningkatkan keikutsertaan event event promosi investasi.
3. Penyusunan peta potensi investasi
4. Menyusun projek investasi sesuai potensi Daerah selain sector pertambangan yang siap ditawarkan ke Investor.
5. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD terkait dalam hal promosi Investasi.
6. Meningkatkan kualitas promosi investasi diluar daerah
7. Membangun system informasi yang memudahkan identifikasi potensi investasi.
8. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
9. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.

10. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.
11. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
12. menyediakan media informasi terkait potensi investasi yang komprehensif, terpadu dan mudah diakses.

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

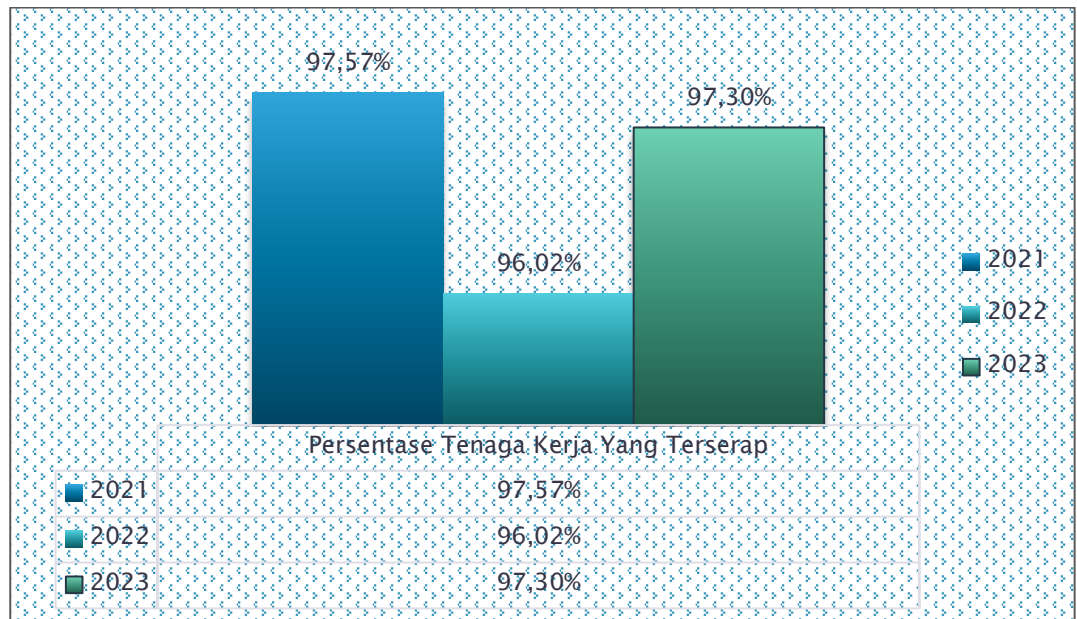
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Terserap

Indikator	2022	2023			Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2023 thdp 2026
		Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	96,02%	65%	97.30%	149.69%	Sangat Tinggi	120,27%
Rata-rata Capaian				149.69%		

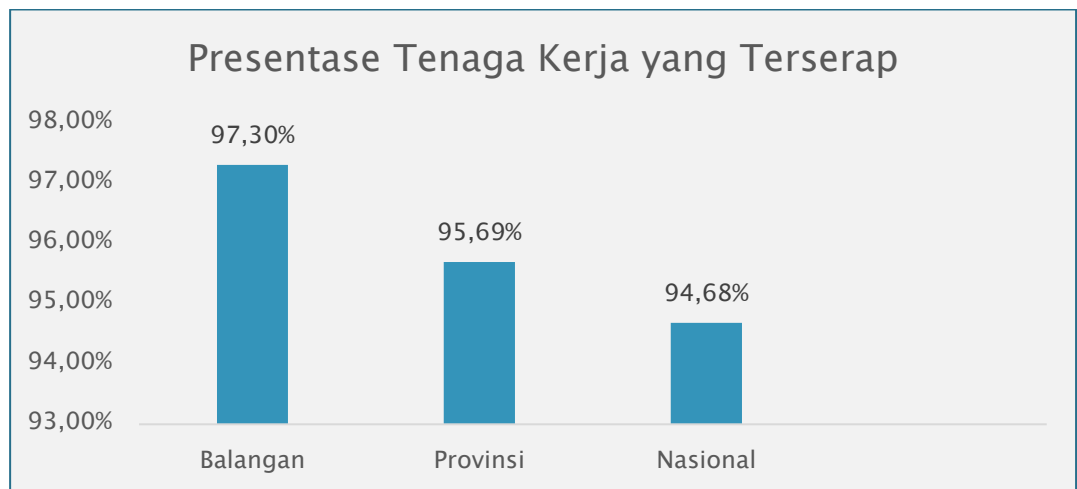
Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa dari indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan yaitu Persentase Tenaga Kerja yang Terserap dengan target di tahun 2023 sebesar 65% dan realisasi yang dicapai 97,30%. Dari hasil realisasi tersebut hasil capaian kinerja untuk indikator persentase angkatan kerja yang bekerja sebesar 149,69% dengan kategori capaian **Sangat Baik** (di atas 100%). Hasil capaian tersebut berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 70.928 jiwa berbanding dengan jumlah angkatan kerja sebesar 72.717 jiwa. Dan jumlah bukan angkatan kerja pada tahun 2023 sebesar 22.341. Dalam hal ini capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan.

Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,28% dibanding Tahun 2022 yang realisasi sebesar 96,02%. Ini sejalan dengan capaian Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang juga berada pada angka 2,70 atau turun sebesar 1,28%. Menurut Kepmenaker Nomor 206 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan dimana angka Pengangguran Terbuka di bawah 3% mendapatkan bobot maksimal/ dikategorikan sangat baik.

Gambar 3.6 perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja/ angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2023



Gambar 3.7 perbandingan persentase angkatan kerja yang bekerja Kabupaten Balangan terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2023



Perbandingan Presentase penyerapan Tenaga Kerja /persentase angkatan kerja yang bekerja Kabupaten Balangan terhadap Pemerintah Provinsi dan Nasional berdasarkan data yang didapat dari BPS Tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang bekerja di Kabupaten Balangan masih lebih tinggi.

Tabel 3.6 Perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja dengan 13 Kabupaten/Kota se Kalsel Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	Peningkatan/ Penurunan
1	Hulu Sungai Selatan	97,71	97,88	+ 0,17
2	Balangan	96,02	97,30	+ 1,28
3	Banjar	97,28	97,27	+ 0,01
4	Hulu Sungai Tengah	96,65	96,74	+ 0,09
5	Barito Kuala	96,37	96,58	+ 0,21
6	Tanah Laut	95,83	96,42	+ 0,59
7	Tabalong	95,54	96,4	+ 0,86
8	Hulu Sungai Utara	95,36	96,15	+ 0,79
9	Tapin	95,85	96,07	+ 0,22
10	Banjar Baru	94,53	94,99	+ 0,46
11	Kota Baru	93,3	93,92	+ 0,62
12	Tanah Bumbu	93,11	93,44	+ 0,33
13	Banjarmasin	93,04	93,3	+ 0,26

Sumber: Sakernas BPS Tahun 2023

Tabel diatas menggambarkan perbandingan Persentase Penyerapan tenaga Kerja/ Persentase Penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja Tahun 2023. Kabupaten Balangan berada di urutan kedua dengan Persentase penyerapan tenaga kerja sebesar 97,30% setelah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 97,88%. Namun dari segi percepatan/ akselerasi peningkatan dari tahun 2022 Kabupaten Balangan berada di urutan **pertama** dengan peningkatan **1,28%**.

Faktor pendorong pencapaian dan upaya yang telah dilakukan pada Tahun 2023:

1. Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja melalui Optimalisasi Bursa Kerja Online dan Aplikasi SmartKerja Balangan dalam rangka mempermudah akses para pencari kerjadan peningkatan penyerapan penempatan tenaga. Adapun data lowongan PPPK tahun 2023 sebanyak 119 orang. Sedangkan data lowongan kerja dari perusahaan sebanyak 245 orang. (Adapun data lowongan kerja terlampir).
2. Jumlah laporan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Swasta yang terdaftar pada Bursa Kerja/ Informasi Pasar Kerja sebanyak 1.056 Orang (Rincian terlampir)
3. Penempatan lulusan PPPK Pemerintah Kabupaten Balangan hasil seleksi Tahun 2022 sebanyak 371 orang yang terdiri dari 66 Tenaga Kesehatan, 16 Tenaga Teknis dan 289 Tenaga Kependidikan.
4. Penempatan petugas Pemilu baik dari KPU maupun Bawaslu yang terdiri dari PPS sebanyak 477 Orang dan Pengawas Desa/Kelurahan sebanyak 157 Orang.

5. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang memiliki keterampilan dengan Optimalisasi pelatihan ketrampilan kerja yang dilaksanakan *sesuai* kebutuhan pasar kerja sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki yang mana pada tahun 2023 ada 2.455 Tenaga Kerja yang telah mengikuti Kegiatan Pelatihan sertifikasi serta Penempatan yang diadakan DPMPTSPPTK (Rincian terlampir).
6. Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja yakni dengan realisasi sebesar 63 % kesempatan kerja yang terpenuhi
7. Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja dari realisasi investasi yaitu sebanyak 450 tambahan tenaga kerja.
8. Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang diukur berdasarkan persentase tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia kerja sebanyak 89,57% dari yang ditargetkan.
9. Terlaksananya kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui penciptaan wirausaha baru bidang Babershop sebanyak 30 Orang.
10. Tersedianya informasi pasar kerja yang efektif yakni 100% informasi pasar kerja telah disebarluaskan secara online.
11. Tersedianya LPK Swasta yang berkualitas dan melaksanakan pelatihan kerja sesuai kebutuhan dunia kerja.
12. Terlaksananya pengukuran kompetensi tenaga kerja yakni sebanyak 1.212 tenaga kerja mengikuti sertifikasi profesi/kompetensi.
13. Kebijakan Padat Karya pada setiap proyek pekerjaan di Desa-Desa yang melibatkan masyarakat setempat yang mengakibatkan serapan tenaga kerja tinggi.
14. Selain itu juga warga masyarakat Balangan banyak menggeluti pekerjaan pada sector pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil dan menengah, serta pertambangan. Seperti yang tertera pada data BPS Kabupaten Balangan tahun 2023. (Adapun data terlampir)

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/ hambatan pada proses pencapaian sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja antara lain adalah:

1. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Balangan yang bertambah pasca kelulusan Siswa SMA sehingga menambah potensi peningkatan pada jumlah pengangguran terbuka.
2. Belum maksimalnya peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan/ menyampaikan informasi pasar kerja/

3. Mayoritas tenaga kerja enggan ataupun tidak berani untuk berwirausaha mandiri.
4. Mindset Pekerja local masih belum siap bila ditempatkan jauh dari Domisili.
5. Masih belum maksimal nya peran Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan bagi Pekerja local.
6. Potensi pekerjaan non formal sector jasa kurang dilirik oleh angkatan kerja misalnya barbershop dll.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi/Strategi Pemecahan masalah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Balangan, antara lain :

1. Meningkatkan mutu dan kualitas pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk para pencari kerja
2. Mengoptimalkan Bursa Kerja Online untuk menghadirkan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi pencari kerja
3. Mengoptimalkan Peran Bursa Kerja Khusus di SMK/SMA untuk menghadirkan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi para Alumninnya.
4. Mengadakan pelatihan sepaket dengan sertifikasi dan Penempatan Kerja.
5. Mengadakan Kerjasama pelatihan dengan Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Balangan.
6. Memberdayakan LPK Swasta untuk memperluas jangkauan pelatihan sampai ke Desa- Desa.
7. Meningkatkan peran Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja
8. Mengadakan Job Fair/ Pameran Bursa Kerja diwaktu yang tepat /saat lulusan sekolah.
9. Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Potensi Daerah
10. Sertifikasi bagi Tenaga Kerja
11. Pembayaran Premi BPJS Bagi Pekerja Rentan
12. Mou Pelaksanaan Pelatihan dengan Perusahaan Swasta
13. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
14. Perluasan Kesempatan Kerja melalui penciptaan wirausaha baru.

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Kemudahan Berusaha/Berinvestasi

Sasaran Ketiga adalah Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi dengan Indikator Kinerja yaitu Indeks Kemudahan Berusaha. Ini merupakan Sasaran dan Indikator baru hasil reviu oleh Kemenpan RB. Yang mana Sasaran dan Indikator sebelumnya adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan Indikator Hasil Survey IKM.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Indeks Kemudahan Berusaha/Berinvestasi

Indikator	2022	2023			Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Kemudahan Berusaha/Berinvestasi	-	69,6	88,475	127,12%	Sangat Tinggi	127,12%
Rata-rata Capaian				127,12%		

Dari tabel di atas dari indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 target Indeks Kemudahan Berinvestasi/Berusaha sebesar 69,6 dengan realisasi sebesar **88,475** hasil dari penilaian Kinerja PTSP dan Pelaksanaan Percepatan Berusaha oleh Kementerian Investasi Tahun 2023. Tingkat capaian kinerja mencapai **127,12%** dan dapat dikategorikan Sangat Baik. Skor tersebut merupakan **terbaik Pertama** diantara 13 Kabupaten /Kota se kalsel atau Peringkat ke **28** secara Nasional dari 415 Kabupaten.

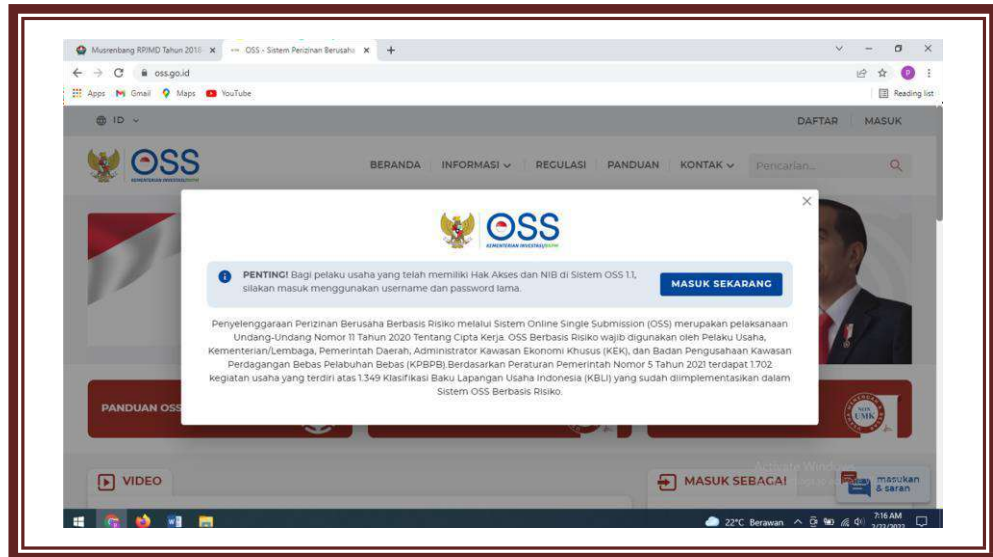
Faktor-faktor yang menunjang pencapaian Sasaran kinerja :

Faktor yang menunjang pencapaian sasaran meningkatnya kemudahan berinvestasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan Tahun 2023 dengan Nilai **92,25** dengan nilai mutu pelayanan **A** dan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik** yang mana salah satu unsur penilaiannya adalah usur Kemudahan Berusaha.
2. Hasil Penilaian OMBUDSMAN RI Tahun 2023 dengan Predikat Opini Pelayanan tertinggi, **Zona Hijau**, Kategori A dengan Nilai **93,75**.
3. Nilai **100** penilaian MCP KPK Tahun 2023 untuk area perizinan dari 8 area intervensi yang dilakukan oleh KPK RI dan BPK RI.
4. Keberhasilan Inovasi yang dilaksanakan oleh DPMPSTP Tahun 2023 seperti Lantunan Shalawat Takwa dan Lapak Jiwa.

5. Dibentuknya Tim Koordinasi Pengawas Perizinan/PTSP
6. Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara perizinan melalui Bimbingan Teknis Service Excellence sehingga menjadikan lebih profesional dalam melayani.
7. Meningkatnya pelayanan data dan informasi perizinan/ penanaman modal dengan jumlah 115 jenis layanan sudah terintegrasi secara online.
8. Terkelolanya system data dan informasi pelayanan penanaman modal dengan terpenuhinya 100% permintaan data dan informasi.
9. Terlaksananya layanan konsultasi dan pengaduan terkait perizinan berusaha dengan jumlah 78 layanan konsultasi dan 100 % terlayani/terselesaikan pada Tahun 2023.
10. Pelaksanaan Bimbingan Teknis tentang persyaratan persetujuan bangunan Gedung bagi Aparatur Desa di Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan.
11. Penyederhanaan proses perizinan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui Aplikasi berikut:
 - a. **OSS RBA:** Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS adalah satu – satunya aplikasi perizinan berusaha, mulai dari usaha mikro sampai dengan besar. Aplikasi ini akan memberikan notifikasi kepada masing – masing wewenang (Kabupaten/Kota, Provinsi ataupun Pusat) sesuai peraturan yang berlaku untuk menyelesaikannya.

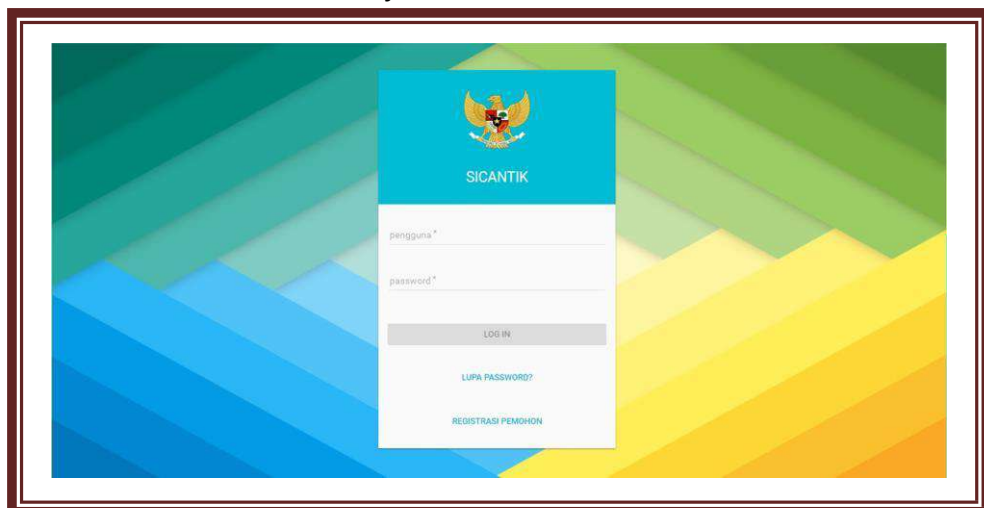
Gambar 3.8 Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online



b. Si Cantik : Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik

SiCantik adalah aplikasi semi open source yang disediakan oleh Kementerian Kominfo untuk memproses perizinan non berusaha. Aplikasi ini bisa di sesuaikan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten / Kota masing – masing daerah.

Gambar 3.9 Sistem Informasi Perizinan Pintar Secara Elektronik



c. Aplikasi SIMBG

Aplikasi SIMBG merupakan aplikasi online terintegrasi yang dipergunakan untuk melayani dan memproses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).



Gambar 3.10 Aplikasi SIMBG

Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Belum optimalnya peran Tim Pengawas PTSP
2. Lama nya proses pembahasan produk hukum daerah tentang pemberian fasilitas/insentif kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
3. Belum adanya Mal Pelayanan Publik.
4. Belum adanya regulasi daerah tentang jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten.
5. Peta potensi investasi /profil peluang investasi di Kabupaten belum dapat diakses secara digital sehingga kesulitan bagi calon investor untuk berminat berinvestasi.
6. Perizinan Berusaha melalui OSS RBA masih dirasa sulit bagi masyarakat terutama pelaku usaha mikro.

Solusi/ Strategi Pemecahan masalah

Solusi/ Strategi Pemecahan masalah dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Balangan antara lain:

1. Mengoptimalkan peran Tim Pengawas PTSP
2. Reviu SOP tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah
3. Percepatan proses produk hukum daerah tentang pemberian fasilitas/insentif kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
4. Akselerasi percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik.
5. Mengusulkan regulasi daerah tentang jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten.
6. Membangun system profil peluang investasi yang mudah diakses investor luar.
7. Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang telah mendelegasikan kewenangan izin nya.
8. Penyesuaian terhadap SOP dan SPP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dannon perizinan.
9. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
10. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepadamasyarakat.
11. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
12. Koordinasi dan sinkronisasi DPMTSP dengan Perangkat Daerah Teknis dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
13. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi tersebut telahmemiliki sistem).

3.2.4 Sasaran Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja

Sasaran Keempat adalah Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi. Ini merupakan Sasaran dan Indikator baru hasil reviu oleh Kemenpan RB Tahun 2023. Adapun capaian kinerja untuk sasaran ini sebagaimana pada tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8 Capaian Indikator Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi

Indikator	2022	2023			Kategori Capaian Kinerja	Capaian 2023 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	-	90%	92,09%	102.33%	Sangat Tinggi	92,09%
Rata-rata Capaian				102.33%		

Dari tabel di atas dari indikator sasaran strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 target Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi sebesar 90% dengan realisasi sebesar **92,09%**. Dari hasil capaian dapat dikategorikan **Sangat Baik**.

Hasil capaian tersebut berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja peserta Jamsostek sebanyak 48.344 Orang berbanding dengan Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar 52.500 Orang.

Tabel 3.9 Jumlah Peserta Jamsostek /data universal coverage di Kabupaten Balangan Tahun 2023 :

No.	Kepesertaan	Peserta Terdaftar
1.	Karyawan Non PNS	4.769 Orag
2.	Pekerja Rentan (Bukan Penerima Upah)	40.000 Orang
3.	Karyawan Perusahaan	3.565 Orang
Jumlah		48.344 Orang

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

Pada tabel diatas dapat dijelaskan rincian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang mana karyawan Non PNS yang terdiri dari Karyawan pada Instansi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebanyak 4.769 Orang dan Pekerja Rentan yang terdiri dari Petani, Pelaku UMKM dll sebanyak 40.000 Orang dan dari Karyawan yang terdaftar di Perusahaan Swasta sebanyak 3.5665 Orang.

Tabel 3.10 Perbandingan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kalimantan Selatan Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	HONORER /NON PNS	PEKERJA RENTAN	KARYAWAN PERUSAHAAN	TOTAL
1	BALANGAN	4.769	40.000	3.565	48.334
2	KOTA BANJARMASIN	7.706	4.432	50.133	62.271
3	KOTA BANJARBARU	2.849	271	17.215	20.335
4	BARITO KUALA	5.281	0	6.974	12.255
5	BANJAR	4.028	0	14.473	18.501
6	TABALONG	2.959	0	18.930	21.889
7	HULU SUNGAI UTARA	2.501	0	1.226	3.727
8	TANAH LAUT	6.191	3.301	20.450	29.942
9	HULU SUNGAI SELATAN	3.689	0	4.858	8.547
10	HULU SUNGAI TENGAH	4.603	0	2.467	7.070
11	TAPIN	2.824	0	14.762	17.586
12	TANAH BUMBU	9.290	0	34.826	44.116
13	KOTABARU	7.614	11.694	21.629	40.937

Sumber:BPJS Ketenagakerjaan dan Wajib Lapo r Ketenagakerjaan Perusahaan

Faktor -faktor penunjang pencapaian sasaran kinerja :

1. Meningkatnya cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Balangan, Khususnya pada Pekerja Rentan/ Bukan Penerima Upah (Tukang Bangunan, Petani dll).
2. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Balangan selama Tahun 2023 yang mana 100% kasus perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan.
3. Keberadaan Dewan Pengupahan Kabupaten Balangan yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, APINDO, Serikat Pekerja, Asosiasi Pengusaha yang selalu meninjau kelayakan upah pekerja.
4. Keberadaan dan Aktif nya LKS Tripartit yang anggota nya dari Pihak Pemerintah, Pengusaha dan Serikat Pekerja sehingga upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja semakin meningkat.
5. Sudah adanya JF Mediator Hubungan Industrial yang bertugas melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
6. Meningkatnya Presentase Perusahaan di Kabupaten Balangan dengan tata kelola kerja yang layak (memiliki PP, Struktur Skala Upah, Jaminan Sosial, serta aktif nya

Lembaga Bipartit) sebagaimana data wajib lapor ketenagakerjaan online / Data Balai Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah III Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Pembayaran Premi BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Bukan Penerima Upah oleh Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Bupati Balangan tentang Jamsostek bagi karyawan Non PNS di Lingkup Pemkab Balangan.
9. Keberadaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Permasalahan/Hambatan

Permasalahan/ hambatan pada proses pencapaian sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja antara lain adalah:

1. Tidak semua Perusahaan menerapkan tata kelola kerja yang layak.
2. Pengawasan Tenaga Kerja di Perusahaan bukan kewenangan Kabupaten/Kota.
3. Tidak semua Perusahaan memiliki Serikat Pekerja.
4. Lembaga Kerjasama Bipartit tidak berfungsi
5. Daerah belum menetapkan Upah Minimum Kabupaten sementara ini Dewan Pengupahan hanya sampai tahap memberikan rekomendasi tentang Upah Layak Pekerja yang menjadi pertimbangan penetapan UMP.
6. Belum adanya Database bagi Pekerja Rentan.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi/Strategi Pemecahan masalah dalam meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Balangan, antara lain :

1. Meningkatkan forum dengan perusahaan tentang apa saja kewajiban perusahaan terhadap pekerja.
2. Meningkatkan kerjasama dengan Balai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil III Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Melakukan Pembinaan terhadap Serikat Pekerja dan Kelembagaan di Perusahaan.
4. Mengoptimalkan peran LKS Tripartit.
5. Menyusun Database Tenaga Kerja Rentan.
6. Optimalisasi jejaring kerja termasuk Dewan Pengupahan Kota dalam mewujudkan peningkatan UMK.

3.2.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Program

Dalam upaya mencapai sasaran strategis /kinerja utama pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan merumuskannya dalam 12 Program dengan numenkelatur Program sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodefikasi dan Nomenklatur Daerah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	71 (BB)	71 (BB)	0,00
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Tambah Tenaga Kerja dari Investasi Baru	300 Orang	450 Orang	150%
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	60%	89,57%	149.29%
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	65%	63,27%	97.24%
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang terselesaikan	100%	100%	100%
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1	1	100%
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	210 M	441 M	210%
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	88.00 (A)	92,75 (A)	104,82%
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	100%	100%	100%
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	100%
11	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16%	16%	100%
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19,05%	18,84%	98.90%

Adapun penjelasan capaian kinerja pada program, adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja pada program ini yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP), dengan target yang ditetapkan 71,2 (BB). Adapun capaian kerjanya sampai saat ini belum ada. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya evaluasi LKIP oleh Inspektorat Kabupaten Balangan.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Indikator kinerja pada program ini yaitu Jumlah Tambahan Tenaga Kerja dari Investasi Baru dengan target yang ditetapkan sebanyak 300 Tenaga Kerja dan realisasi kinerja yang didapat sebesar 450 Tenaga Kerja. Dari hasil realisasi tersebut maka dapat diukur hasil capaian kinerja program, dengan capaian kinerja sebesar 150%. Adapun hasil capaian kinerja ini didapat dari Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2023.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator kinerja pada program ini yaitu persentase tenaga kerja yang terampil sesuai kebutuhan dunia kerja dengan target kinerja sebesar 60% dan realisasi kinerja yang didapat sebesar 89,57%. Dari hasil realisasi kinerja yang didapat maka dapat diukur hasil capaian kinerja program, dengan capaian yang diperoleh sebesar 149,29%. Hasil capaian kinerja ini didapat dari Jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi yang didapat pada tahun 2023 sebesar 2.199 orang dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebesar 2.455 orang.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator kinerja pada program ini yaitu persentase kesempatan kerja yang terpenuhi. Dan target yang ditetapkan sebesar 65% dengan realisasi kinerja yang diperoleh 63,27%. Dari hasil realisasi kinerja tersebut maka diperoleh hasil capaian kinerja program, dengan capaian kinerja yang didapat sebesar 97,34%. Hasil capaian ini didapat dari jumlah penempatan tenaga kerja sebanyak 1.056 orang dibandingkan dengan jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 1.669 orang.

5. Program Hubungan Industrial

Indikator kinerja pada program ini yaitu persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan, dengan target kinerja 100% Dari hasil realisasi kinerja tersebut maka diperoleh hasil capaian kinerja program, dengan capaian kinerja yang didapat sebesar 100%. Capaian kinerja ini didapat dari hasil kasus perselisihan hubungan industrial yang terdata di tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kasus, dan telah diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini yaitu Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru dengan target yang ditetapkan 1 Potensi dan realisasi kinerja yang didapat 1 Potensi Investasi Baru yaitu yaitu Agrobisnis/ Pertanian. Dari hasil perolehan realisasi tersebut, maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%.

7. Program Promosi Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini yaitu Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi dengan target yang ditetapkan Rp. 210.000.000.000 dan hasil realisasi kinerja yang diperoleh sebesar Rp. 441.085.000.000,-. Sehingga capaian kinerja program yang didapatkan sebesar 210%, dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Data/Nilai persetujuan Investasi ini didapat dari Nomor Induk Berusaha (NIB) yang ada di Kabupaten Balangan. Jika dilihat dari capaian tahun 2023, terlihat bahwa angka realisasi untuk rencana investasi terlampaui tinggi dibanding angka targetnya. Hal ini disebabkan karena nilai rencana investasi diisikan oleh calon investor sendiri ke OSS tanpa dapat dikontrol karena semua masyarakat (calon investor) dapat mengakses OSS dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu serta tanpa verifikasi dari perangkat daerah.

8. Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini yaitu Nilai Survey IKM terhadap Pelayanan dengan target kinerja yang ditetapkan 88 (A) dan realisasi kinerja yang didapat 92,25 (A) Sehingga hasil capaian kinerja program yang didapat sebesar 104,82%. Data ini di dapat dari hasil pengisian kuisisioner dari pengguna layanan tahun 2023. Program ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat.

9. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM dengan target kinerja 100% dan realiasi kinerja yang didapat sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja program yang diperoleh sebesar 100%, dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Adapun hasil capaian ini didapat dari seluruh pelaku usaha yang menyampaikan LKPM dibandingkan dengan pelaku usaha yang wajib melaporkan, dengan jumlah pelaku usaha yaitu sebesar 393 Pelaku Usaha. Capaian pada program ini memenuhi target yang telah ditentukan. Hal ini didukung dengan adanya koordinasi internal dan bidang tentang pelaporan LKPM, diselenggarakannya bimbingan teknis penyampaian LKPM dan adanya pendampingan, pengawasan serta pembinaan untuk para investor di Kabupaten Balangan.

Pada proses pelaksanaannya ditemukan beberapa faktor penghambat tercapainya target program antarlain system OSS untuk menu pelaporan LKPM UMK sedang dalam pengembangan oleh Lembaga OSS, sehingga untuk pelaku usaha UMK nilai investasi belum masuk rilis BKPM dan masih ada investor yang kurang patuh terkait kewajiban penyampaian LKPM. Walaupun ada beberapa faktor penghambat namun semua dapat diatasi dengan baik dengan adanya koordinasi yang matang di internal dinas, adanya pembinaan, sosialisasi, konsultasi, pengawasan maupun penanganan pengaduan.

10. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi

Indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal dengan target yang ditetapkan 100% dan realisasi kinerja yang didapat sebesar 100%. Sehingga hasil capaian kinerja program yang diperoleh sebesar 100%. Hasil ini diperoleh dari jumlah permintaan data dan informasi perizinan dan penanaman modal dibandingkan dengan jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi.

11. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase warga transmigrasi yang terampil, dengan target yang ditetapkan sebesar 16% dan realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 16%. Sehingga capaian kinerja yang didapat pada program ini sebesar 100%. Hasil capaian tersebut didapat dari warga transmigrasi yang terampil berjumlah 20 orang dibandingkan dengan jumlah warga sebanyak 125 orang.

12. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Indikator kinerja pada program ini yaitu Persentase lahan usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi, dengan target yang ditetapkan sebesar 19,05% dan capaian realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 18,84%. Dari hasil realisasi tersebut maka ditemukan hasil capaian kinerja program, dengan capaian kinerja sebesar 98,90%. Hasil capaian kinerja pada program ini didapat dari lahan usaha yang dikelola warga transmigrasi yang luas lahannya sebesar 64,059 Ha dibandingkan dengan lahan keseluruhan warga transmigrasi yaitu 340 Ha.

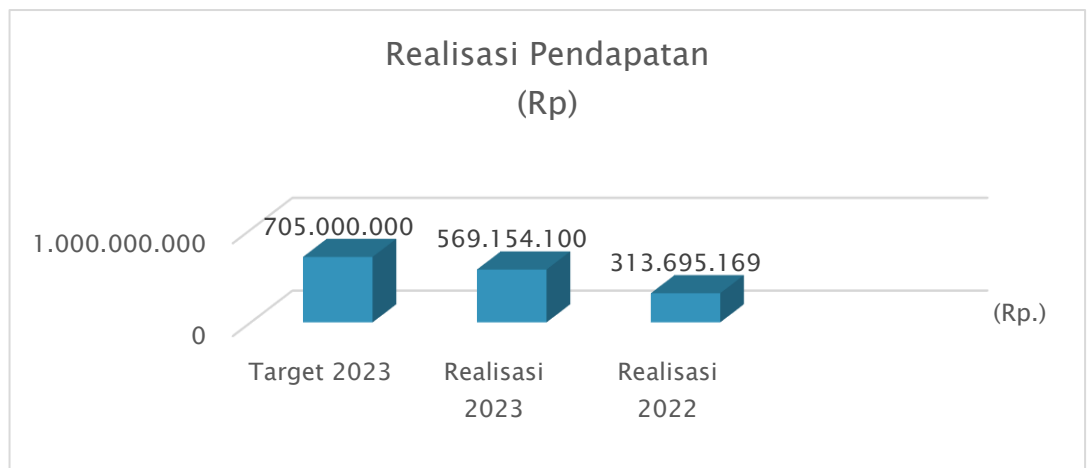
3.3 Realisasi Anggaran

Kinerja Anggaran secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Untuk unsur pendapatan target kinerja dilihat dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan target belanja dapat dilihat dari Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

3.3.1 Realisasi Pendapatan

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan menargetkan pendapatan sebesar Rp.705.000.000,- target ditingkatkan dari yang ditargetkan pada anggaran murni sebesar Rp.310.000.000. Pendapatan bersumber dari retribusi daerah melalui persetujuan bangunan Gedung dan sewa/ videorton.

Gambar 3.11 ikhtisar realisasi pendapatan DPMPTSP Tahun 2023.



Realisasi pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp.569.154.100 bersumber dari retribusi melalui pungutan PBG, meningkat sekitar 71,55% atau sebesar Rp.237.378.931 dari Realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp.331.775.169. Sedangkan dari segi capaian dari yang ditargetkan hanya sebesar 80,73%.

3.3.2 Realisasi Belanja

Realisasi anggaran belanja terkait dengan pelaksanaan pembangunan oleh Pemda Balangan yang dilaksanakan oleh DPMPTSPPTK yaitu berupa program dan Kegiatan pembangunan yang merupakan urusan wajib. Kinerja pelaksanaan program dilihat dari aspek efektivitas dan efisiensi.

Tabel 3.12 Ikhtisar Realisasi Belanja Program DPMPSTPTK Tahun 2023:

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,022,289,529	12,553,768,793	96.40
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	52,598,600	46,528,500	88.46
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14,119,215,100	13,847,971,207	98.08
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,255,473,500	1,211,502,771	96.50
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4,267,296,100	4,105,114,992	96.20
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	195,951,400	157,785,291	80.52
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3,639,849,000	3,437,896,150	94.45
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	617,437,750	600,643,099	97.28
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	535,380,800	397,844,366	74.31
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	406,463,400	401,328,145	98.74
11	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	112,275,500	110,759,893	98.65
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200,142,600	197,762,700	98.81

Realisasi Belanja Program Dinas PMPTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. **37,068,905,907,-** atau **96.47%** dari pagu sebesar Rp. **38,424,373,279,-** Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi yaitu sebesar **98,81 %**. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu 74,31%.

Selain dana APBD Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan juga mendapat bantuan anggaran dari dana APBN untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di BLK Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp. 1.318.620.000,- dan realisasi Rp. 1.227.655.361,- dengan persentase anggaran yang diserap 93%. Dana tersebut digunakan untuk pendidikan keterampilan sebanyak 12 Paket.

3.4 Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dan indikator yang telah dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Semakin tinggi jumlah sumberdaya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensi akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah jumlah sumberdaya yang dikeluarkan, maka efisiensi anggaran akan semakin tinggi. Pencapaian sasaran Tahun 2023 secara umum telah menunjukkan tingkat **efisiensi anggaran** yang cukup tinggi sebagaimana table berikut:

Tabel 3.13 Realisasi Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Sasaran

NO	Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi Daerah	600 M	471,226 M	78,53%	Rp 4.371.181.200	Rp 3.993.525.807	91,36%
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	65%	97.30%	149.69%	Rp 15.427.287.200	Rp15.106.002.478	97,92%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	90%	92.09%	102.33%	Rp 4.267.296.100	Rp 4.105.114.992	96,20%
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	69.6	88.475	127,12%	Rp 1.023.901.150	Rp 1.001.971.244	97,86%

Dari table dapat dilihat bahwa sebagian besar sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil dari pada realisasi kinerja nya. Berarti pencapaian dari aspek program telah tercapai dengan cara **efisiensi anggaran**, bahkan capaian kinerja nya sangat signifikan jauh lebih besar. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran strategis DPMPSTP pada Tahun 2023 ada tiga sasaran dengan tingkat capaian kinerja diatas 100% dan satu sasaran 78,53% yang masih dalam kategori Tinggi yang menggambarkan bahwa Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran sangat **Efektif**, sementara dari segi penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran telah mencukupi dan **efisien**. Ini sejalan dengan prinsip Pemerintah yang baik salah satunya pengelolaan Anggran yang efisien.

Tabel 3.14 Tingkat efisiensi anggaran per sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	78,53%	91,36%	8,64%
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	149.69%	97,92%	2,08%
3	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	102.33%	97,86%	3,14%
4	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Ber(iEoDB)	127,12%	96,20%	3,80%

Dalam hal ini **Efisiensi** anggaran, Sasaran Meningkatnya Investasi adalah yang paling efisien yakni **8, 64% atau Rp.377.655.393,-** dengan capaian kinerja sebesar 78,53% diikuti sasaran meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan tingkat efisiensi sebesar **3,8 % atau Rp.162.181.108,-** dan capaian kinerja 127,12%, sasaran meningkatnya kemudahan berusaha dengan tingkat efisiensi 3,14% atau **Rp.21.929.906,-** dengan capaian kinerja 102,33% dan sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan tingkat efisiensi sebesar 2,08% atau **Rp.321.284.722,-** dan capaian kinerja sebesar 149,69%.

Berdasarkan pelaksanaan Program dapat dilihat tingkat efisiensi menurut realisasi anggaran sebagai mana tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Program

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96.40	468,520,736	3.60
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	88.46	6,070,100	11.54
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	98.08	271,243,893	1.02
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	96.50	43,970,729.	3,50
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	96.20	162,181,108	3.80
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	80.52	38,166,109	19,48
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	94.45	201,952,850	5,55
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	97.28	16,794,651	2,72
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	74.31	137,536,434	25,69
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	98.74	5,135,255	1,26
11	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	98.65	1,515,607	1,35
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	98.81	2,379,900	1,19

Dari 12 Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023, berikut analisis terhadap efisiensi Program:

- Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan efisiensi 3,60% atau Rp. **468,520,736**.
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan efisiensi anggaran sebesar 25,69% atau Rp. **137,536,434,-**
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan efisiensi anggaran sebesar 19,48% atau Rp. **38,166,109,-**
- Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan efisiensi anggaran sebesar 11,54% atau Rp. **6,070,100**
- Program Promosi Penanaman Modal dengan efisiensi anggaran sebesar 5,55% atau Rp. **201,952,850,-**.
- Program Hubungan Industrial dengan efisiensi anggaran sebesar 3,80% atau Rp. **162,181,108,-**
- Program Penempatan Tenaga Kerja dengan efisiensi anggaran sebesar 3,50% atau Rp. **43,970,729,-**.
- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan efisiensi anggaran sebesar 2,72% atau Rp. **16,794,651,-**
- Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan efisiensi anggaran sebesar 1,26% atau Rp. **5,135,255,-**.
- Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan efisiensi anggaran sebesar 1,35% atau Rp. **1,515,607,-**.
- Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan efisiensi anggaran sebesar 1,19% atau Rp. **2,379,900,-**
- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan tingkat capaian kinerja sebesar 149,29% dan efisiensi anggaran sebesar 1,02% atau Rp. **271,243,893,-**.

3.5 Inovasi

Tantangan Global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada Tahun 2023 ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Telah menginisiasi inovasi, sebagai berikut:

3.5.1 Inovasi Lantunan Salawat Takwa

Inovasi Lantunan Salawat Takwa adalah Layanan berbantuan melalui wa (whatsAap) yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik kepada pelaku usaha dalam proses mendapatkan izin usaha tanpa batas waktu yang ditentukan.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk pengurusan perizinan berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pelaku usaha mendapatkan layanan berbantuan yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- Layanan berbantuan perizinan berusaha melalui aplikasi whats App selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Layanan Berbantuan Perizinan Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam.
- Menghidaru tatap muka langsung antara pelaku usaha dengan penyelenggara pelayanan publik, dan
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

3.5.2 Inovasi Lapak Jiwa

Inovasi Lapak Jiwa ini merupakan inovasi yang dikembangkan dari bentuk komvensional ke online melalui wa untuk memberikan layanan konsultasi kepada pelaku usaha maupun masyarakat berkaitan dengan syarat dan prosedur dalam proses pelayanan perizinan berusaha dan berusaha dan juga untuk mengukur kinerja dari pelayanan publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan inovasi ini antara lain :

- Masyarakat dan Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan konsultasi terkait pengurusan perizinan berusaha dan non berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.

- Masyarakat dan Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan konsultasi yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- Layanan Pendampingan Konsultasi perizinan berusaha dan non berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Pendampingan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu full 24 (dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

3.5.2 Inovasi Lading Asah Batu

Inovasi Lading Asah Batu adalah pemberian fasilitas kemudahan Pelayanan Perizinan berusaha bagi pelaku usaha berupa pendampingan yang diberikan oleh unit pelayanan publik Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan untuk memudahkan dalam proses layanan perizinan melalui sistem aplikasi online melalui WA tanpa batas waktu selama 24 (dua puluh empat) jam dan juga layanan pendampingan perizinan berusaha ini tidak mengenal waktu libur (Sabtu dan Minggu).

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Para pelaku usaha tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mengurus perizinan berusaha namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pelaku usaha mendapatkan layanan pendampingan yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara perizinan dalam proses perizinan berusaha.
- Layanan Pendampingan perizinan berusaha selama 24 (dua puluh empat) jam.
- Pendampingan Layanan Perizinan Berusaha Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu full 24 (dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

3.5.4 Inovasi Ladang Porang Paman Linbat

Inovasi Ladang Porang Paman Linbat adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka untuk memberikan layanan pendampingan secara online melalui WA (WhatsApp) dalam pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi pelaku usaha (investor) yang melaksanakan kegiatan usahanya di Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan inovasi ini antara lain :

- Para pelaku usaha (investor) tidak harus datang langsung ke kantor penyelenggara pelayanan perizinan untuk mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal, namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pelaku usaha (investor) mendapatkan layanan pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal yang sangat baik dan prima oleh petugas penyelenggara pelayanan dalam proses perizinan berusaha penanaman modal.
- Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam tanpa batas waktu.
- Layanan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

3.5.5 Inovasi Awas Nasa Jebol

Inovasi Awas Nasa Jebol adalah merupakan inovasi tata kelola pemerintahan yang merupakan kegiatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan dan kewajiban dari pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan mengenai langsung kepada pelaku usaha (investor) karena pengawasan dilaksanakan langsung ke tempat pelaku usaha.
- Agar realisasi investasi di Kabupaten Balangan lebih meningkat..
- Agar Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara Terintegrasi dan Terkoordinasi ini memberi manfaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Balangan sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha dari izin usaha yang telah dimiliki.

3.5.6 Inovasi Batutukar

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan

publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan- pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utililitas, dan lainnya.

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten Balangan adalah salah satu instansi publik yang memberikan pelayanan jasa secara langsung melalui pelayanan perizinan dan non perizinan. Demikian juga dalam sector penanaman modal yang mana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Balangan melalui fasilitasi UMKM dan pengawasan pelaku usaha. Salah satu upaya fasilitasi yang dibuat adalah menyediakan sebuah aplikasi belanja online bernama BATUTUKAR. Aplikasi ini dibuat pada saat awal-awal masuknya pandemic covid di Kabupaten Balangan. Keberadaan pandemic covid yang sangat mengkhawatirkan bagi kesehatan manusia berimbas pada roda perekonomian dunia, termasuk juga di Indonesia dan Kabupaten Balangan pada khususnya. Kondisi perekonomian yang sedemikian sepi, dimana transaksi jual beli sangat lemah dikarenakan larangan berkumpul dan bertatap muka untuk meminimalisir peredaran covid 19, memunculkan tren baru dimasyarakat yaitu berbelanja secara online, dan pembayaran non tunai. Melihat dampak pandemic yang sedemikian dahsyat bagi perekonomian terutama pelaku usaha kecil dan menengah , DPMPSTSP dalam hal ini bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal berinisiatif memfasilitasi wadah promosi dengan membuat aplikasi berbelanja online.

Sebelum adanya inovasi kegiatan promosi UMKM sebagian besar bertumpu pada sarana pameran-pameran yang diadakan oleh dinas-dinas teknis terkait. Tidak dipungkiri keikutsertaan produk UMKM dalam berbagai pameran merupakan sarana promosi yang sangat berpengaruh untuk mengenalkan brand dan produk dari Kabupaten Balangan terutama pameran yang skalanya besar. Akan tetapi sarana promosi ini tidak dapat membawa semua UMKM sekaligus. Selanjutnya dengan munculnya pandemic covid-19 semakin mematikan promosi yang sifatnya seperti ini karena larangan tatap muka dan beraktifitas diluar rumah. Pandemi covid-19 menghantap semua sector masyarakat, akan tetapi kebutuhan selama masa pandemic covid masih tetap bahkan cenderung meningkat sehingga perlu sarana promosi yang luas, aman dan tetap menaati protocol kesehatan. Sehingga dipikirkan belanja online sebagai sarana promosi dan penjualan.

3.5.7 Inovasi Smart Kerja Balangan

Inovasi Layanan Smart Kerja Balangan adalah bagi pencari kerja dan perusahaan dalam hal informasi pasar kerja. Pencari kerja bias memproses Kartu Pencari Kerja (AK-1) secara mandiri.

Keuntungan layanan ini antara lain :

- Pencari kerja tidak harus datang langsung ke Loker Pelayanan Ak-1 namun cukup di rumah atau di kantor saja.
- Pencari Kerja mendapatkan layanan informasi lowongan kerja.
- Layanan Tidak mengenal waktu libur, yang artinya pelayanan tetap dilaksanakan pada hari sabtu dan hari minggu full 24 {(dua puluh empat) jam.
- Penyelenggaraan pelayanan antar kerja menjadi lebih efektif, hemat dan efisien.

3.6 Kolaborasi lintas Sektor

Dalam upaya untuk mencapai tujuan SKPD sebagai turunan dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah daerah dibutuhkan peran lintas Sektor untuk mempermudah pencapaian kinerja (crosscutting) sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya masing masing.

3.6.1 Mewujudkan investasi yang berkelanjutan di Kabupaten Balangan

- Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata pada peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan pada peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan.
- Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa .
- Satpol PP pada urusan Ketentraman dan Ketertiban.
- Diskominfo pada ketersediaan layanan public yang terintegrasi.
- Beppedalitbang melalui pembinaan Inovasi pelayanan dan tata kelola pada SKPD.
- Proses perizinan berusaha serta pengawasan penanaman modal yang berkolaborasi dengan Disdikbud, Dinkes, DKP3, Dishub, Disporapar, Diskominfo Dinas KUKM dan Perindag, Dinas PUPR. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

3.6.1 Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan dipengaruhi oleh beberapa Program pada SKPD berikut:

- Dinas PUPR untuk menyediakan Tenaga kerja konstruksi /operator/teknisi yang terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi serta Proyek yang bias menyerap tenaga kerja.
- Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan usaha mikro menjadi Wirausaha/penambahan skala usaha, Penambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah.
- Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata pada tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri/ berwirausaha.
- Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa .
- Dinas Pemuda Olahraga dan pariwisata pada peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan pada peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang mana sector ini berpotensi menyerap tenaga kerja paling besar.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kebijakan setiap Proyek di Desa dilaksanakan dengan Pola Padat Karya sehingga menyerap tenaga kerja lebih besar.
- Balai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil III dalam pengawasan Ketetenagakerjaan.
- BPJS Ketenagakerjaan, Apindo, Serikat Pekerja dll.

Kolaborasi lintas sektor juga dilakukan dengan Bappedalitbang, DPKAD, Inspektorat, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan serta Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah yang selalu mengawal dan memfasilitasi dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian hingga dalam evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun ke-3 dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tiga dari empat indikator sasaran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan dengan kategori capaian **Sangat Baik**, yaitu: Persenyntase penyerapan tenaga kerja, persentase tenaga kerja yang terlindungi dan indeks kemudahan berinvestasi. Sedangkan satu indicator dengan kategori capaian **Tinggi** yaitu Nilai Realisasi Investasi.
2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya realisasi Investasi Daerah dengan Nilai Realisasi Investasi Tahun 2023 sebesar 471,226 Milyar atau capaian kinerja sebesar 78,53%
 - b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dengan indicator persentase tenaga kerja yang terserap sebesar 97,30% dengan capaian kinerja sebesar 149,69%.
 - c. Meningkatnya kemudahan berusaha dengan Indeks Kemudahan Berinvestasi tahun 2023 sebesar 88,475 dengan capaian kinerja 102,33%
 - d. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dengan indicator persentase tenaga kerja yang terlindungi Tahun 2023 sebesar 92, % atau capaian kinerja 127,12%.

3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan telah melakukan **efisiensi** anggaran sebesar **Rp.1,355,467,372,-**.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Meskipun kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2023 dapat dikatakan baik namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan perbaikan tersebut adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan secara berkala;
2. Menyusun rencana aksi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan pada awal tahun; dan
3. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan
4. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.
5. Pembenahan pada Bidang/Urusan Penanaman Modal untuk mewujudkan Investasi yang berkelanjutan dengan langkah:
 - a. Meningkatkan peran Tim Koordinasi Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Balangan.
 - b. Meningkatkan keikutsertaan event event promosi investasi.
 - c. Menyusun projek investasi sesuai potensi Daerah selain sector pertambangan yang siap ditawarkan ke Investor.
 - d. Meningkatkan sinergitas dengan SKPD terkait dalam hal promosi Investasi.
 - e. Meningkatkan kualitas promosi investasi diluar daerah
 - f. Membangun system informasi yang memudahkan identifikasi potensi investasi.
 - g. Pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui temu investor, podcast, pameran, siaran radio, pembuatan video dan pembuatan leaflet.
 - h. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
 - i. Percepatan realisasi investasi dengan melakukan identifikasi permasalahan penanaman modal dan penyelesaian permasalahan melalui kegiatan visitasi dan pendampingan.

- j. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Inspeksi Pengawasan Perizinan Berusaha secara terintegrasi dengan melibatkan Perangkat Daerah Teknis untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha.
- k. menyediakan media informasi terkait potensi investasi yang komprehensif, terpadu dan mudah diakses.
- l. Mengoptimalkan peran Tim Pengawas PTSP
- m. Reviu SOP tentang pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah
- n. Percepatan proses produk hukum daerah tentang pemberian fasilitas/insentif kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.
- o. Akselerasi percepatan pembangunan Mal Pelayanan Publik.
- p. Mengusulkan regulasi daerah tentang jaminan keamanan berinvestasi di Kabupaten.
- q. Membangun system profil peluang investasi yang mudah diakses investor luar.
- r. Integrasi sistem dan data antar Perangkat Daerah Kabupaten Balangan yang telah mendelegasikan kewenangan izin nya.
- s. Penyesuaian terhadap SOP dan SPP dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- t. Pengembangan Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan.
- u. Pengembangan sistem yang telah berjalan agar memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
- v. Peningkatan kualitas SDM yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk dapat memberikan layanan prima bagi masyarakat.
- w. Koordinasi dan sinkronisasi DPMTSP dengan Perangkat Daerah Teknis dalam pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
- x. Proses dokumen pemenuhan komitmen perlu koordinasi dengan Instansi Teknis terkait pelimpahan izin (alur, form, pengesahan rekomendasi, integrasi jika Instansi).

6. Pembenahan pada Bidang /Urusan Tenaga Kerja sebagai upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan langkah-langkah:
- a. Meningkatkan mutu dan kualitas pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja untuk para pencari kerja
 - b. Mengoptimalkan Bursa Kerja Online untuk menghadirkan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi pencari kerja
 - c. Mengoptimalkan Peran Bursa Kerja Khusus di SMK/SMA untuk menghadirkan kesempatan kerja yang lebih banyak bagi para Alumninya.
 - d. Mengadakan pelatihan sepaket dengan sertifikasi dan Penempatan Kerja.
 - e. Mengadakan Kerjasama pelatihan dengan Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Balangan.
 - f. Memberdayakan LPK Swasta untuk memperluas jangkauan pelatihan sampai ke Desa- Desa.
 - g. Meningkatkan peran Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta dalam meningkatkan penyerapan Tenaga Kerja
 - h. Mengadakan Job Fair/ Pameran Bursa Kerja di waktu yang tepat /saat lulusan sekolah.
 - i. Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Potensi Daerah
 - j. Sertifikasi bagi Tenaga Kerja
 - k. Pembayaran Premi BPJS Bagi Pekerja Rentan
 - l. Mou Pelaksanaan Pelatihan dengan Perusahaan Swasta
 - m. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - n. Perluasan Kesempatan Kerja melalui penciptaan wirausaha baru.
 - o. Meningkatkan forum dengan perusahaan tentang apa saja kewajiban perusahaan terhadap pekerja.
 - p. Meningkatkan kerjasama dengan Balai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil III Provinsi Kalimantan Selatan.
 - q. Melakukan Pembinaan terhadap Serikat Pekerja dan Kelembagaan di Perusahaan.
 - r. Mengoptimalkan peran LKS Tripartit.
 - s. Menyusun Database Tenaga Kerja Rentan.
 - t. Optimalisasi jejaring kerja termasuk Dewan Pengupahan Kota dalam mewujudkan peningkatan UMK.

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Perjanjian Kinerja**
- 2. SK Indikator Kinerja Utama**
- 3. Pohon Kinerja dan Casceding**
- 4. Rencana Aksi atas LHE AKIP Tahun 2022**
- 5. Pengukuran Kinerja sampai dengan TW IV Tahun 2023**
- 6. Daftar Perusahaan LKPM 2023**
- 7. Laporan Penempatan Tenaga Kerja**
- 8. Rekapitulasi Program Pelatihan Tahun 2023**
- 9. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023**
- 10. Rincian Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**
- 11. Rincian Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**
- 12. Daftar Permintaan data dan Informasi Tahun 2023**
- 13. Press Release Realisasi Investasi Tahun 2023**
- 14. SK Ombudsman**
- 15. Nilai Kinerja PTSP dan Percepatan Berusaha**
- 16. Piagam Penghargaan**
- 17. Standar Operasional Prosedur**



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DR. AKHRIANI, S. Pd, M. AP

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Jabatan : BUPATI BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

Pihak Pertama,

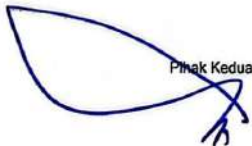


Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan realisasi Investasi daerah	Nilai realisasi investasi	600 M
2	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	65%
3	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	69.6
4	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	90%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,896,614,263.00	Rp 13,022,289,529.00	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 82,437,400.00	Rp 195,951,400.00	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 3,529,443,600.00	Rp 3,639,849,000.00	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 87,960,800.00	Rp 535,380,800.00	
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 426,926,800.00	Rp 617,437,750.00	
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 106,140,400.00	Rp 406,463,400.00	
7	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 52,598,600.00	Rp 52,598,600.00	
8	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 2,414,732,500.00	Rp 14,119,215,100.00	
9	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 1,191,123,700.00	Rp 1,255,473,500.00	
10	Program Hubungan Industrial	Rp 3,645,338,700.00	Rp 4,267,296,100.00	
11	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 111,352,000.00	Rp 112,275,500.00	
12	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 198,477,000.00	Rp 200,142,600.00	
	Jumlah	Rp 22,743,165,763.00	Rp 38,424,373,279.00	


Pihak Kedua

H. ABDUL HADI, S.Aq, M.I.Kom

Paringin, 2 Oktober 2023





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002


ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	71 (BB)
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	90%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp 87,425,000.00	Rp 149,601,800.00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8,613,898,613.00	Rp 8,797,640,778.00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 17,495,000.00	Rp 351,932,500.00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 635,719,000.00	Rp 1,404,687,850.00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 109,514,000.00	Rp 242,446,200.00	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 634,647,700.00	Rp 923,333,501.00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 797,914,950.00	Rp 1,152,646,900.00	
	Jumlah	Rp 10,896,614,263.00	Rp 13,022,289,529.00	

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HANARITA, S.Pd., MM**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP**

Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007

HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 17.495.000,00	Rp 351.932.500,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 17.495.000,00	Rp 161.282.500,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp -	Rp 190.650.000,00	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 635.719.000,00	Rp 1.404.687.850,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 8.996.100,00	Rp 45.639.100,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 310.145.500,00	Rp 670.387.150,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp 19.962.400,00	Rp 76.471.100,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp -	Rp 19.866.300,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 296.615.000,00	Rp 592.324.200,00	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 109.514.000,00	Rp 242.446.200,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 43.000.000,00	Rp 174.000.000,00	
	Pengadaan Mebel	Rp 66.514.000,00	Rp 68.446.200,00	

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 634.647.700,00	Rp 923.333.501,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 449.809.200,00	Rp 412.196.401,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 184.838.500,00	Rp 511.137.100,00	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 797.914.950,00	Rp 1.152.646.900,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 234.854.950,00	Rp 395.596.900,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 563.060.000,00	Rp 757.050.000,00	
	Jumlah	Rp 2.195.290.650,00	Rp 4.075.046.951,00	

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
 NIP. 19830107 200604 2 011


HANARITA, S.Pd., MM
 NIP. 19830107 200604 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **VIRAWATI, S. Sos**

Jabatan : **PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **HANARITA, S.Pd., MM**

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN

Jabatan : **MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011

VIRAWATI, S. Sos
NIP.19850321 200801 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data kebutuhan barang inventaris kantor kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawian	Jumlah data kebutuhan barang inventaris	12
2	Tersedianya bahan konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawian	Jumlah bahan konsep	2
3	Tersedianya bahan pengklasifikasian kebutuhan barang inventaris	Jumlah Laporan Pengklasifikasian	120
4	Tersedianya bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Bahan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	12

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua


HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011

Pihak Pertama


VIRAWATI, S. Sos
NIP.19850321 200801 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KARMAN MASKURI**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HANARITA, S.Pd., MM**

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN

Jabatan : **MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011

KARMAN MASKURI
NIP. 19710307 200604 1 015



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya data surat masuk Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah surat masuk	200
2	Tersedianya bahan pengelompokan surat atau dokumen kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Jumlah laporan pengelompokan surat atau dokumen	200
3	Tersedianya bahan dokumentasi surat menyurat	Jumlah laporan dokumentasi surat	200

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua


HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011

Pihak Pertama


KARMAN MASKURI
NIP. 19710307 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI EFENDI, S.Pd.,MM

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
NIP. 14720716 199403 1 007

FITRI EFENDI, S.Pd.,MM
NIP. 19890510 201503 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

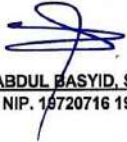
NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 17,485,000.00	Rp 23,185,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 17,485,000.00	Rp 17,185,000.00	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 17,485,000.00	Rp 17,635,000.00	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 17,485,000.00	Rp 54,105,000.00	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 17,485,000.00	Rp 37,491,800.00	
	Jumlah	Rp 87,425,000.00	Rp 149,601,800.00	

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama


ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
 NIP. 19720716 199403 1 007


FITRI EFENDI, S.Pd., MM
 NIP. 19890510 201503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD RUSDI, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007


MUHAMMAD RUSDI, SE
NIP. 19770304 200501 1 010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 7,331,644,613	Rp 7,331,662,778	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1,212,244,000	Rp 1,386,968,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 35,005,000	Rp 35,005,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35,005,000	Rp 44,005,000	
	Jumlah	Rp 8,613,898,613	Rp 8,797,640,778	

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama



ABDUL BASYID, S.Sos., M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007



MUHAMMAD RUSDI, SE
NIP. 19770304 200501 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAJI SUWITO, S.Pd**

KEPALA BIDANG PELAYAN PERIZINAN BERUSAHA & NON BERUSAHA DINAS

Jabatan : **PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Jabatan : **TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	88.00

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 426,926,800	Rp 617,437,750	
1.1	Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 426,926,800	Rp 617,437,750	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 34,436,100	Rp 213,337,050	
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp 20,248,400	Rp 20,248,400	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp 353,124,800	Rp 334,084,800	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Rp 19,117,500	Rp 49,767,500	
	Jumlah	Rp 426,926,800	Rp 617,437,750	

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



HAJI SUWITO, S.Pd
 NIP. 19660906 198804 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE, MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA II)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAJI SUWITO, S.Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYAN PERIZINAN BERUSAHA & NON BERUSAHA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Oktober 2023

Pihak Kedua

HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Pihak Pertama,

MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE, MM
NIP. 19780128 201001 2 012



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	500 Pelaku Usaha

Pihak Kedua



HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE, MM
NIP. 19780128 201001 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RINA WATI, S. Sos**

Jabatan : **ANALIS DOKUMEN PERIZINAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAJI SUWITO, S.Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYAN PERIZINAN BERUSAHA & NON BERUSAHA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

RINA WATI, S. Sos
NIP. 19861006 200701 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersediannya Dokumen Laporan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha	1 Dokumen

Pihak Kedua



HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Parangin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



RINA WATI, S. Sos
NIP. 19861006 200701 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ERMAWATY, S.PI, MAP**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PELAYANAN
PERIZINAN NON BERUSAHA)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAJI SUWITO, S.Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYAN PERIZINAN BERUSAHA & NON BERUSAHA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

ERMAWATY, S.PI, MAP
NIP. 197603042 008012014



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Perizinan Berusaha dan Non Berusaha)	100%

Pihak Kedua



HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



ERMAWATY, S.PI, M.AP
NIP. 197603042 008012014



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ISNANINGSIH, S.Kom,MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA I)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **HAJI SUWITO, S.Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PELAYAN PERIZINAN BERUSAHA & NON BERUSAHA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

ISNANINGSIH, S.Kom,MM
NIP. 19801205 201001 2 020

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tertelaksananya Pengintegrasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasikan Secara Online	93 Layanan Perizinan

Pihak Kedua



HAJI SUMTO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Paringin, Oktober 2023

Pihak Pertama



ISNAININGSIH, S.Kom, MM
NIP. 19801205 201001 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H

Jabatan : KEPALA BIDANG PENGADUAN, PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI
DPMPTSPITK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
NIP. 19780929 200501 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%
2	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp 106,140,400	Rp 406,463,400	
1.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 106,140,400	Rp 406,463,400	
	Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 106,140,400	Rp 406,463,400	
2	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 353,124,800	Rp 334,084,800	
2.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 353,124,800	Rp 334,084,800	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp 353,124,800	Rp 334,084,800	
	Jumlah	Rp 459,265,200	Rp 740,548,200	

Parangin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

 Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.A.P.
 NIP. 197102261997021 002

Pihak Pertama

 MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
 NIP. 19780929 200501 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AKHMAD,SH,MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN
KONSULTASI PERIZINAN)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADUAN, PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI
DPMPTSPITK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
NIP. 19780929 200501 1 009

AKHMAD,SH,MM
NIP. 19790922 200904 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	60

Pihak Kedua


MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
NIP. 19780929 200501 1 009

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama


AKHMAD, SH, MM
NIP. 19790922 200904 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUDIMAH, S.Sos, M.M**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI DPMPSTPTK)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADUAN, PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI
DPMPSTPTK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,


MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
NIP. 19780929 200501 1 009

BUDIMAH, S.Sos, M.M
NIP. 19760520 200604 2 023

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Updating Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	100%

Pihak Kedua



MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
NIP. 19780929 200501 1 009

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



BUDIMAH, S.Sos, M.M
NIP. 19760520 200604 2 023



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. M. FIRDAUS HARIADI, S.Sos**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR DATA DAN KEARSIPAN PERIZINAN)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADUAN, PENGELOLAAN DATA SISTEM INFORMASI DPMPTSPITK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
NIP. 19780929 200501 1 009

H. M. FIRDAUS HARIADI, S.Sos
NIP. 19731024 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terpenuhi	100%
2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	13

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua



MUHAMMAD IWAN SETIADY, S.H
NIP. 19780929 200501 1 009

Pihak Pertama



H. M. FIRDAUS HARIADI, S.Sos
NIP. 19731024 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAFIUL AMAL, M. Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI &
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DPMPSTPTK**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

RAFIUL AMAL, M. Pd
NIP. 19720426 199702 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1
2	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	210 M
3	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	100%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 82,437,400	Rp 195,951,400	
1.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 55,902,400	Rp 55,902,400	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp 6,859,600	Rp 6,859,600	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp 49,042,800	Rp 49,042,800	
1.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Rp 26,535,000	Rp 140,049,000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,510,000	Rp 7,510,000	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Rp 19,025,000	Rp 132,539,000	
2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp 3,529,443,600	Rp 3,639,849,000.00	
2.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,529,443,600	Rp 3,639,849,000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Rp 17,352,000	Rp 127,758,000	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,512,091,600	Rp 3,512,091,000	

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
PROGRAM PENGENDALIAN				
3	PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 87,980,800	Rp 535,380,800	
3.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 87,980,800	Rp 535,380,800	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 14,486,400	Rp 14,486,400	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 33,305,600	Rp 395,735,600	
	Koodinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 40,188,800	Rp 125,158,800	
	Jumlah	Rp 3,699,861,800	Rp 4,371,181,200	



Paringin, 2 Oktober 2023

Rihak Pertama

RAFIUL ANSARI, M.Pd
NIP. 197204281997021002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUSTI FITRIA YULIANTI, S.Sos**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAFIUL AMAL, M. Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI &
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DPMPSTPTK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RAFIUL AMAL, M. Pd
NIP. 197204281997021002

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,

GUSTI FITRIA YULIANTI, S.Sos
NIP. 198307132010012016



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (berinvestasi)	200 Pelaku Usaha
2	Tersedianya Kebijakan Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi	1 Dokumen

Pihak Kedua


RAFIUL AMAN, M. Pd
NIP. 19720428-199702 1 002

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama


GUSTI FITRIA YULIANTI, S.Sos
NIP. 19830713 201001 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MARIATUL HIDAYAH, S.Pd.I, MM**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAFIUL AMAL, M. Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI &
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DPMPSTPTK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RAFIUL AMAL, M. Pd
NIP. 197204281997021 002

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,



MARIATUL HIDAYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 19800312 200701 2 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023


NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	300
2	Terlaksananya Pengawasan Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Pemantauan	35

Pihak Kedua


RAFIUL ANAM, M. Pd
NIP. 19720430 198702 1 002

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama


MARIATUL HIDAYAH, S.Pd.I, MM
NIP. 19800312 200701 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WINDAYANI FACHRIA SANTI, S,Sos,M.AP**

Jabatan : **JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PROMOSI PENANAMAN MODAL)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **RAFIUL AMAL, M. Pd**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI & PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DPMPSTPTK**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

RAFIUL AMAL, M. Pd
NIP. 197204281997021002

Paringin, 2 Oktober 2023


Pihak Pertama,

WINDAYANI FACHRIA SANTI, S.Sos,M.AP
NIP. 19860126 201001 2 022



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	1 Dokumen
2	Terlaksananya Promosi Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	1 Kegiatan


Pihak Kedua
RAFIUK ANANDA, M. Pd
NIP. 19720428 199702 1 002

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama


WINDAYANI FACHRIA SANTI, S.Sos,M.AP
NIP. 19860126 201001 2 022



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAIDHAWI, SE**

KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS

Jabatan : **PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,

BAIDHAWI, SE

NIP. 19750407 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	50%
2	Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja dari Realisasi Investasi	Jumlah Tambah Tenaga Kerja dari Investasi Baru	70%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rp 52,598,600.00	Rp 52,598,600.00	
1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp 52,598,600.00	Rp 52,598,600.00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Rp 23,569,800.00	Rp 23,569,800.00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Rp 29,028,800.00	Rp 29,028,800.00	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 1,191,123,700.00	Rp 1,255,473,500.00	
2.1	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kanupaten/Kota	Rp 1,023,193,600.00	Rp 1,132,524,200.00	
	Pelayanan Antar Kerja	Rp 112,234,200.00	Rp 112,234,200.00	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 637,448,000.00	Rp 701,448,000.00	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rp 27,500,800.00	Rp 27,500,800.00	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp 246,010,600.00	Rp 291,341,200.00	
2.2	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11,428,800.00	Rp 11,428,800.00	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Rp 11,428,800.00	Rp 11,428,800.00	
2.3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp 97,379,300.00	Rp 91,939,300.00	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Rp 12,105,700.00	Rp 12,105,700.00	
	Job Fair/Bursa Kerja	Rp 85,273,600.00	Rp 79,833,600.00	

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
2.4	Polindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia(PMI) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Rp 59,122,000.00	Rp 19,581,200.00	
		Rp 14,141,200.00	Rp 14,141,200.00	
		Rp 44,980,800.00	Rp 5,440,000.00	
	Jumlah	Rp 1,243,722,300.00	Rp 1,308,072,100.00	



Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama

BAIDHAWI, SE

NIP. 19750407 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHADIAN SYAPUTERA, S. Sos

Jabatan : JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA
KERJA)

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BAIDHAWI, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

BAIDHAWI, SE
NIP. 19750407 200604 1 006

Pihak Pertama,

RAHADIAN SYAPUTERA, S. Sos
NIP. 19750408 201001 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Efektif	Persentase Informasi Pasar Kerja yang Disebarluaskan	100%
2	Tersedianya LPTKS yang Berperan Menyalurkan Tenaga Kerja	Persentase LPTKS yang Aktif	25%
3	Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Balangan	Persentase Kerjasama antar Kerja	50%

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua



BAIDHAWI, SE
NIP. 19750407 200604 1 006

Pihak Pertama



RAHADIAN SYAPUTERA, S. Sos
NIP. 19750408 201001 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YANTI, SE**

Jabatan : **JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN)**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAIDHAWI, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua


BAIDHAWI, SE
NIP. 19750407 100604 1 006


YANTI, SE
NIP. 19780810 200803 2 004

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terciptanya Keseimbangan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	Rasio Persediaan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	70%

Pihak Kedua


BAIDHAWUSE

NIP. 19750407 200604 1 006

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama


YANTI, SE

NIP. 19780810 200803 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUJIBURAHMAN SAPUTRA, S.E**

Jabatan : **ANALIS TENAGA KERJA**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BAIDHAWI, SE**

KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS

Jabatan : **PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

BAIDHAWI, SE

NIP. 19750407 200604 1 006

Pihak Pertama,

MUJIBURAHMAN SAPUTRA, S.E

NIP. 19901204 202012 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Bahan Analisis Data Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah Dokumen Analisis Data Pencari Kerja Terdaftar	12 Dokumen
2	Tersedianya Bahan Analisis Data Lowongan/ Permintaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Lowongan/ Permintaan Tenaga Kerja	12 Dokumen
3	Tersedianya Bahan Data Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Informasi Pasar Kerja	12 Dokumen

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua



BAIDHAWI SE

NIP. 19750407 200604 1 006

Pihak Pertama



MUJIBURAHMAN SAPUTRA, S.E

NIP. 19901204 202012 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUWARSO, S. PI**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

SUWARSO, S. PI
NIP. 19720614 200003 1 006

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Warga Transmigrasi yang Terampil	Persentase Warga Transmigrasi yang Terampil	16
2	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh Warga Transmigrasi	19.05%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 111,352,000.00	Rp 112,275,500.00	
1.1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 111,352,000.00	Rp 112,275,500.00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14,985,000.00	Rp 14,985,000.00	
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Rp 96,367,000.00	Rp 97,290,500.00	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 198,477,000.00	Rp 200,142,600.00	
2.1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp 198,477,000.00	Rp 200,142,600.00	
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp 15,117,000.00	Rp 15,132,600.00	
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Rp 183,360,000.00	Rp 185,010,000.00	
	Jumlah	Rp 309,829,000.00	Rp 312,418,100.00	

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



SUWARSO, S. PI

NIP. 19720614 200003 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DIANA RAHMAWATI, S. Sos**

Jabatan : **JF PENGANTAR KERJA AHLI MUDA (SUB KOORDINATOR PELATIHAN KERJA
DAN KELEMBAGAAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SLAMETNO, S. Kom**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN KERJA, PRODUKTIFITAS &
HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

DIANA RAHMAWATI, S. Sos
NIP. 19860612 201101 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya LPKS yang Berkualitas	Jumlah LPTKS yang melaksanakan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	10 LPK
2	Terselenggaranya Konsultasi Produktivitas bagi Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas Wirausaha Kecil	100%
3	Terselenggaranya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	1000 Orang

Pihak Kedua



SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



DIANA RAHMAWATI, S. Sos
NIP. 19860612 201101 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF MUSRIFIN, S.Sos

Jabatan : ANALIS BAHAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN & K3

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SLAMETNO, S. Kom

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN KERJA, PRODUKTIFITAS &
HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Pihak Pertama,

ARIF MUSRIFIN, S.Sos
NIP. 19830506 200801 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Bahan Analisis Data Wajib Laport Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Analisis Data Wajib Laport Ketenagakerjaan	12 Dokumen
2	Tersedianya Analisis Data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Analisis Data Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	12 Dokumen

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua



SLAMETNO S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Pihak Pertama



ARIF MUSRIFIN, S.Sos
NIP. 19830506 200801 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A. HARDIANTO, S.H**

Jabatan : **ANALIS BAHAN PERSYARATAN KERJA**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **SLAMETNO, S. Kom**

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN KERJA, PRODUKTIFITAS &

Jabatan : **HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Pihak Pertama,

A. HARDIANTO, S.H
NIP. 19731230 200604 1 010

LAMPIRAN : PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Bahan Analisis Persyaratan Kerja Kelola Kerja yang Layak	Jumlah Dokumen Analisis Persyaratan Kerja	12 Dokumen

Pihak Kedua



SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



A. HARDIANTO, S.H
NIP. 19731230 200604 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDUL MUKHLIS, A. Md

Jabatan : KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP

Jabatan : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Pihak Kedua

Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002


ABDUL MUKHLIS, A. Md
NIP. 19790525 200801 1 017

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Kompeten	Persentase Peserta Pelatihan yang Kompeten	100%

No Program/Kegiatan

1.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama

ABDUL MUKHLIS, A. Md
NIP. 19790525 200801 1 017





PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. JUMBERI, SP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BLK**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **ABDUL MUKHLIS, A. Md**

Jabatan : **KEPALA UPT BALAI LATIHAN KERJA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua

ABDUL MUKHLIS, A. Md
NIP. 19790525 200801 1 017

Pihak Pertama,

H. JUMBERI, SP
NIP. 19710701 200604 1 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	Persentase Layanan Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja Yang Baik	100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian UPTD Balai Latihan Kerja	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian UPTD Balai Latihan Kerja Yang Baik	100%
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UPTD Balai Latihan Kerja	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang UPTD Balai Latihan Kerja Yang Baik	100%

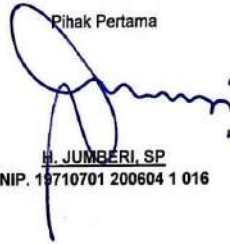
Pihak Kedua



ABDUL MUKHLIS, A. Md
NIP. 19790525 200801 1 017

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



H. JUMBETRI, SP
NIP. 19710701 200804 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NORDIANSYAH, A.Ma**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI UMUM**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. JUMBERI, SP**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BLK**

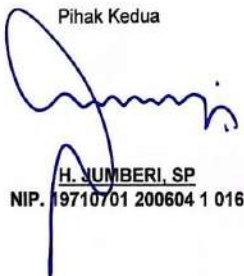
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Kedua



H. JUMBERI, SP
NIP. 19710701 200604 1 016

Pihak Pertama,

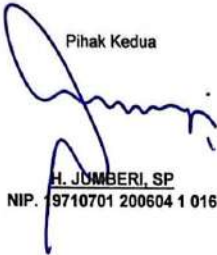


NORDIANSYAH, A.Ma
NIP. 19740307 200701 1 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kera	12 Dokumen

Pihak Kedua



H. JUMBERI, SP
NIP. 19710701 200604 1 016

Paringin, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama



NORDIANSYAH, A.Ma
NIP. 19740307 200701 1 013



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA**

Jl. Jend. A. Yani Km.1 Paringin Kota – Kabupaten Balangan Kode Pos 71611
Telp/Faks. (0526) 2028114 email : dpmpstsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 188.46/069 / SK / DPMPSTPTTK / TAHUN 2023

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 188.46/033/SK/DPMPSTPTTK/TAHUN 2021 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN DINAS
PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. Bahwa penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/11/M.PAN/08/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 01 September 2023

KEPALA DINAS,



Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI
DAN TENAGA KERJA
NOMOR :188.46/ /DPMPTSPTTK-BLG/TAHUN
2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
KINERJA PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021- 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	<p>Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)</p> <p>Untuk mengetahui realisasi investasi pertahun</p> <p>Angka realisasi investasi PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya</p>	Kepala SKPD	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terserap	<p>Mengetahui sejauh mana tingkat penyerapan Tenaga Kerja</p> <p>Penduduk yang Bekerja/Angkatan Kerja x 100 %</p>	Kepala SKPD	SAKERNAS BPS

3	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana kemudahan perizinan yang diberikan dalam pelaksanaan berusaha/berinvestasi di Kabupaten Balangan Nilai diperoleh dari hasil penilaian Kinerja PTSP serta Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh kementerian Investasi dan/ atau Nilai Survey Kepuasan terhadap layanan Perizinan	Kepala SKPD	Kementerian Investasi / BKPM
4.	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Presentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	Adanya indikator ini untuk mengetahui sejauhmana Tenaga Kerja di Kabupaten Balangan terlindungi sesuai dengan hak hak nya. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan/ Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar (PU atau BPU) x 100%	Kepala SKPD	Wajib Lapo Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan

**KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA**



**Dr. AKHIRANI, S.Pd., M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002**

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
 BALANGAN
 NOMOR :188.46/ /DPMPTSPTTK-
 BLG/TAHUN 2023
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR
 KINERJA SKPD PENANAMAN MODAL,
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
 TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021-2026 SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
 KERJA KABUPATEN BALANGAN

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Untuk mengetahui Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	Bidang Sekretariat	LHE Sakip
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	Untuk mengetahui sejauhmana kondisi sarana dan prasarana penunjang SKPD		Data Aset

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	Mengetahui sejauhmana permintaan tenaga kerja / lowongan kerja dapat dipenuhi Jumlah lowongan yang terpenuhi/Jumlah lowongan terdaftar x 100%	Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Informasi Pasar Kerja

2	Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja dari Realisasi Investasi	Jumlah Tambahan Tenaga Kerja dari Investasi Baru	Mengetahui sejauhmana dampak realisasi investasi terhadap penyerapan tenaga kerja baru Jumlah Tenaga Kerja Baru berdasarkan rilis LKPM	LKPM
---	---	--	---	------

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi Tahun N / Jumlah Tenaga kerja Terdaftar (Peserta pelatihan dan Layanan Antar Kerja) Tahun N x 100%	Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktivitas dan Hubungan Industrial	
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	<p>Terfasilitasinya Perselisihan hubungan industrial yang timbul di perusahaan</p> <p>dengan Terfasilitasinya Perselisihan hubungan industrial yang timbul di perusahaan maka kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar</p> <p>Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi _____ X 100</p> <p>Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk dan tercatat</p>		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Warga Transmigrasi yang Terampil	Persentase warga Transmigrasi yang Terampil	$\frac{\text{Jumlah Warga yang terampil}}{125 \text{ Orang}} \times 100\%$	Bidang Transmigrasi	
2	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh Warga Transmigrasi	$\frac{LK}{LT} \times 100\%$		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal / Jumlah Permintaan data dan informasi yang terpenuhi x 100%	Bidang Pengaduan, Pengolahan Data Sistem Informasi Penanaman Modal	Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal
2	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	Mengetahui sejauhmana tindaklanjut atas pengaduan yang masuk Jumlah pengaduan yang masuk / Jumlah pengaduan yang terselesaikan x 100%		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	Mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	Mengetahui sektor investasi baru yang dapat memberikan dampak dalam peningkatan iklim investasi	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi & Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen Potensi
2	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Mengetahui sejauhmana minat investasi/rencana investasi di Kabupaten Balangan Nilai Persetujuan Investasi dari pendaftaran NIB	Penanaman Modal	Data NIB/ Perizinan Berusaha
3	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	Mengetahui sejauhmana kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan kewajibanya Jumlah Pelaku usaha yang menyampaikan LKPM/ Jumlah Pelaku usaha yang wajib melaporkan x 100%		LKPM

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik		Sub Bagian Umum & Kepegawaian	SILKA
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik			
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan			
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik			
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik			

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik		Sub Bagian Keuangan	

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pengintegrasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Online	Mengetahui jumlah layanan izin yang terintegrasi secara online	Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Non Berusaha	
2	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan		
3	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Perizinan Non Berusaha)	Jumlah izin seusi SOP/ Jumlah permohonan perizinan x 100%		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Layanan Konsultasi dan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	Meningkatnya Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi Perizinan, Jumlah Pelayanan Konsultasi Perizinan dan Pengaduan yang tertangani	Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Perizinan	Sub Koordinator Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan dan Non Perizinan PM

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Updating Sistem Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Mengetahui progress data dan informasi penanaman modal	Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi	Sub Koordinator Pengelolaan Sistem Informasi

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terpenuhi	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi / Jumlah permintaan data dan informasi x 100%	Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan	Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan
2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Mengetahui Jumlah data dan informasi perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (berinvestasi)	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan kemudahan berusaha	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Data Izin
2	Tersedianya Kebijakan Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi	Mengetahui Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	Mengetahui jumlah dokumen promosi penanaman modal	Sub Koordinator Promosi Penanaman Modal	
2	Terlaksananya Promosi Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Mengetahui jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan penyusunan LKPM	Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
2	Terlaksananya Pengawasan Investasi/ Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Pemantauan	Mengetahui jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Perusahaan/ Pemberi Kerja dengan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak / Jumlah Perusahaan terdaftar x 100%	Sub Koordinator Hubungan Industrial	WLKP
2	Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perkara/Pengaduan HI yang difasilitasi Penyelesaiannya	Jumlah perkara yang difasilitasi / Jumlah perkara masuk x 100%		HI

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya LPKS yang Berkualitas	Jumlah LPKS yang melaksanakan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	Mengetahui Jumlah LPKS yang melaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan	Sub Koordinator Pelatihan Kerja dan Kelembagaan	
2	Terselenggaranya Konsultasi Produktivitas bagi Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas Wirausaha Kecil	Jumlah Wirausaha yang meningkat produktivitasnya / Jumlah Wirausaha binaan x 100%		
3	Terselenggaranya Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	Mengetahui jumlah tenaga kerja yang kompeten berdasarkan hasil Sertifikasi BNSP		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Efektif	Persentase Informasi Pasar Kerja yang Disebarluaskan	Jumlah IPK yang disebarluaskan / Jumlah Lowongan terdaftar x 100	Sub Koordinator Penempatan Tenaga	

2	Tersedianya LPTKS yang Berperan Menyalurkan Tenaga Kerja	Persentase LPTKS yang Aktif	Jumlah LPTKS yang melakukan rekrutmen / Jumlah LPTKS Terdaftar x 100%	Kerja	
3	Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Balangan	Persentase Kerjasama antar Kerja	Jumlah perusahaan yang difasilitasi / Jumlah Perusahaan yang menyampaikan lowongan x 100%		

NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya Keseimbangan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	Rasio Persediaan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	Jumlah kesempatan kerja / Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar	Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	

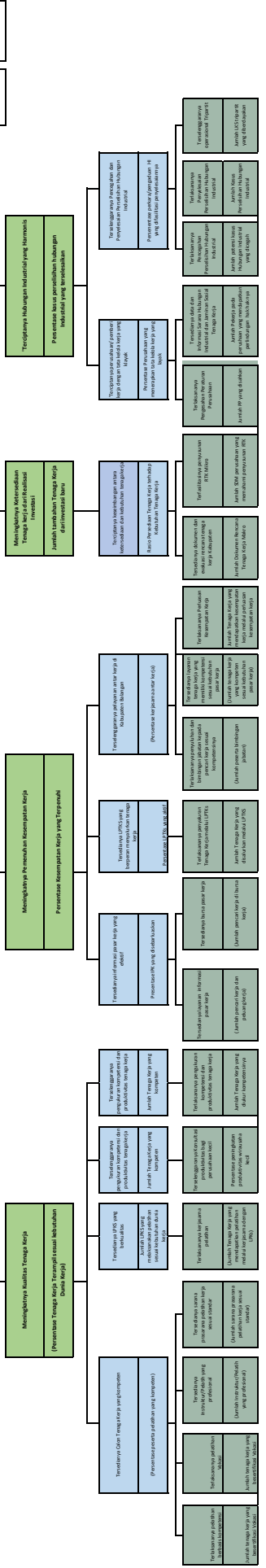
NO	KINERJA (SASARAN)	INDIKATOR KINERJA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	banyaknya warga transmigrasi yang diikutkan dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan	Sub Koordinator Pembangunan Kawasan Transmigrasi	

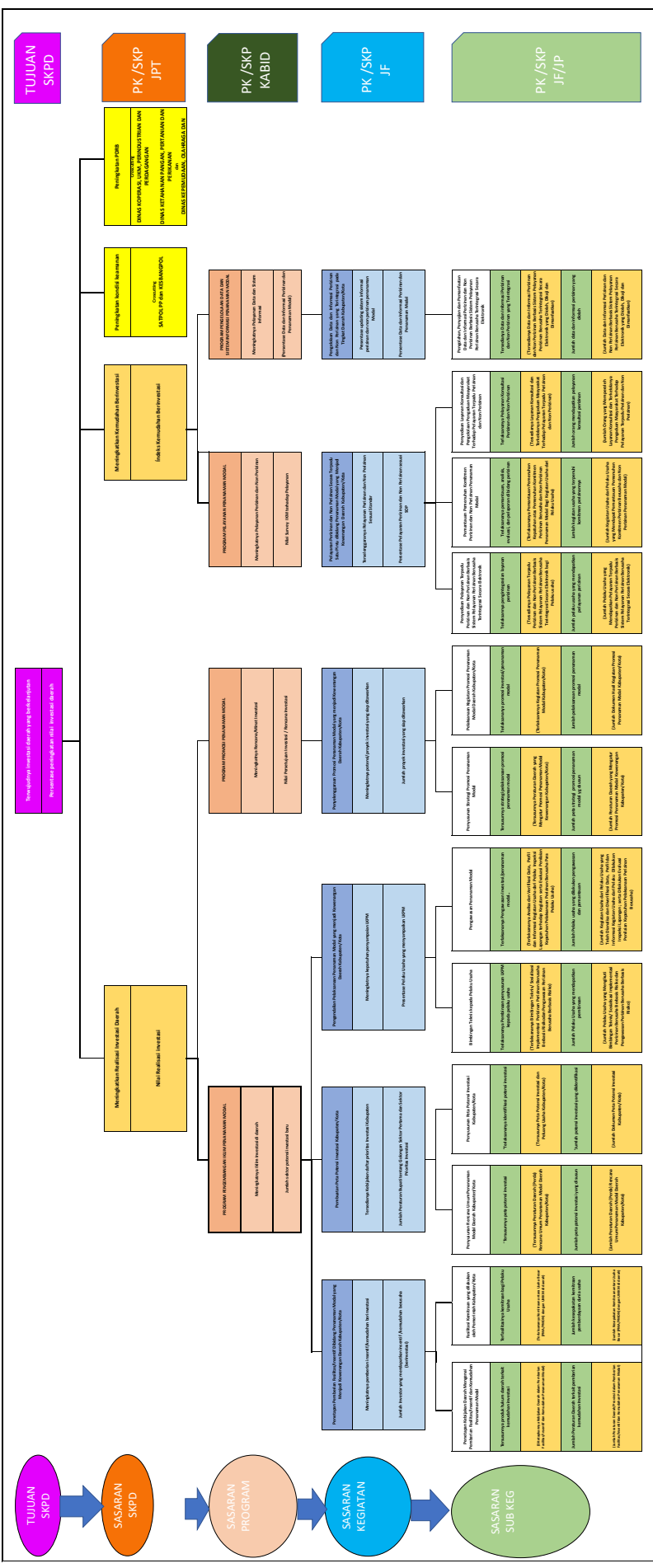
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN,


Dr. AKHRIANI, S.Pd., M.AP
 NIP. 19740228 199702 1 002

Mencermati Angka Pengangguran Terbuka
Angka Pengangguran Terbuka

Meningkatkan Persiapan Tenaga Kerja	Meningkatkan Peningkatan Tenaga Kerja	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	1. Meningkatkan Investasi pada 2. Meningkatkan Kualitas Manusia dan Kelembagaan
Perencanaan Tenaga Kerja yang Terpadu	Perencanaan Tenaga Kerja yang Terintegrasi	Perencanaan Tenaga Kerja yang Terpadu	CIRI-CIRI TINGKAT DAN KELEMBAGAN





Menyempatkan waktu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Meningkatkan Kualitas Persepsi Daerah
Neri Berprestasi Berprestasi

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN
Meningkatkan kemampuan manajerial
Meningkatkan kemampuan manajerial

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

TUJUAN SKPD

Perencanaan PDRS
RUMAH KOSTRUKSI, LUMBU, PERSIAPAN TRUK DAN PERUMAHAN
UMUM KEMAMAMANGAN, PERUMAHAN DAN UMUM

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN
Meningkatkan kemampuan manajerial
Meningkatkan kemampuan manajerial

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

TUJUAN SKPD

Perencanaan PDRS
RUMAH KOSTRUKSI, LUMBU, PERSIAPAN TRUK DAN PERUMAHAN
UMUM KEMAMAMANGAN, PERUMAHAN DAN UMUM

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN
Meningkatkan kemampuan manajerial
Meningkatkan kemampuan manajerial

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

TUJUAN SKPD

Perencanaan PDRS
RUMAH KOSTRUKSI, LUMBU, PERSIAPAN TRUK DAN PERUMAHAN
UMUM KEMAMAMANGAN, PERUMAHAN DAN UMUM

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN
Meningkatkan kemampuan manajerial
Meningkatkan kemampuan manajerial

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

TUJUAN SKPD

Perencanaan PDRS
RUMAH KOSTRUKSI, LUMBU, PERSIAPAN TRUK DAN PERUMAHAN
UMUM KEMAMAMANGAN, PERUMAHAN DAN UMUM

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN
Meningkatkan kemampuan manajerial
Meningkatkan kemampuan manajerial

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

TUJUAN SKPD

Perencanaan PDRS
RUMAH KOSTRUKSI, LUMBU, PERSIAPAN TRUK DAN PERUMAHAN
UMUM KEMAMAMANGAN, PERUMAHAN DAN UMUM

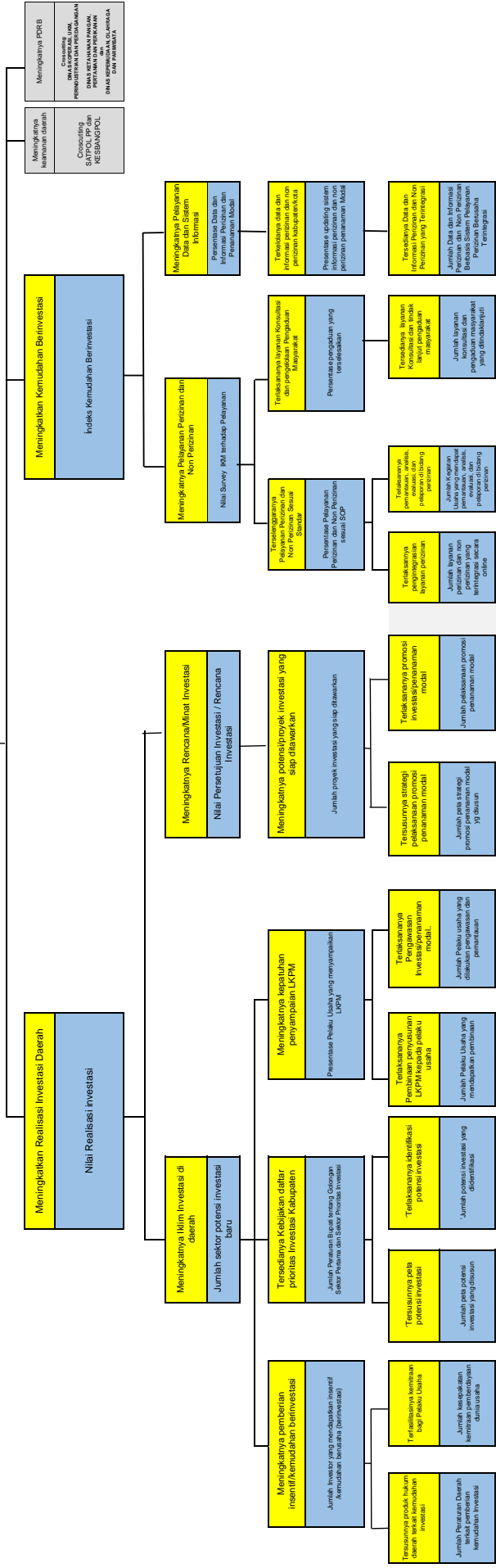
PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJEMEN
Meningkatkan kemampuan manajerial
Meningkatkan kemampuan manajerial

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Program Peningkatan Kemampuan Berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi
Meningkatkan kemampuan berprestasi

Terwujudnya investasi daerah yang berkelanjutan
Peningkatan nilai investasi daerah



Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi

Menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan daya saing daerah dan pariwisata

Meningkatkan PDB dan investasi di sektor pariwisata

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara mudah dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara mudah dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara mudah dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara mudah dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara mudah dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan profesional

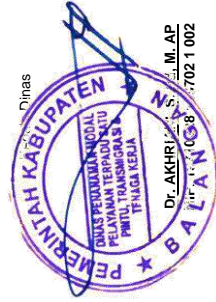
Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara mudah dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat dan profesional

Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan secara mudah dan profesional

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Periode	Tahun	Nilai Sakip N-1	Hasil Evaluasi	Rekomendasi: Impan/Inspektorat	Rencana Aksi Balangan	Progres Aksi
2021 s.d 2026	2023	70,60 (BB)	<p>1 Evaluasi perencanaan kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja dan rencana aksi kinerja belum sepenuhnya dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.</p> <p>2 Evaluasi pengukuran kinerja belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja, belum sepenuhnya terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, pimpinan belum sepenuhnya selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja. data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.</p> <p>3 Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar</p> <p>4 Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, belum implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.</p> <p>5 Analisis capaian kinerja (outcome) belum memadai.</p>	<p>1 Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>2 Membuat laporan monv menunjukkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjukkan realisasi target setiap triwulan</p> <p>3 Membuat laporan monv dilengkapi dengan notulensi/berita acara</p> <p>4 Dalam pengukuran kinerja memuat sumber daya yaitu laporan kegiatan penanaman modal (LRPM) serta melaksanakan, membuat, dan memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya</p> <p>5 Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungsional</p> <p>6 Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan sesuai dengan hitungan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas</p> <p>7 Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit, yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomiten</p> <p>8 Untuk menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>9 Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP Tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya</p> <p>10 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.</p>	<p>1 Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>2 Memperbaiki isi laporan monv per triwulan agar menggambarkan realisasi target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap triwulan</p> <p>3 Melengkapi laporan monv dengan notulensi/berita acara</p> <p>4 Memperbaiki penyusunan laporan kinerja dengan melengkapi dokumen pendukung capaian, memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran sesuai PerMENPAN RB No 53 Tahun 2014</p> <p>5 Dalam pengukuran kinerja menjadi dasar usulan penempatan/penghapusan jabatan untuk struktural maupun fungsional</p> <p>6 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD</p> <p>7 Menyusun dokumen laporan kinerja (LKJIP) memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit,yaitu tidak terdapat informasi mengenai efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomiten</p> <p>8 Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>9 Menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun sebelumnya.</p> <p>10 Mengajukan permintaan reviu Laporan Kinerja (LKJIP) tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan Reviu LPPD.</p>	<p>1 DPMPSTTK telah melakukan perencanaan kinerja tahunan untuk memenuhi kriteria sebagai acuan untuk pemantauan dalam anggaran</p> <p>2 Hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dengan diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)</p> <p>3 Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pengisian di aplikasi e-krn, mengupload di google drive kurkin</p> <p>4 Menyusun dan menetapkan SOP/Pedoman teknis perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran kinerja/penilaian SKPD, serta pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal</p> <p>5 Melakukan Evaluasi atas dokumen LKIP</p>





REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA

TRIWULAN IV

TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI, DAN
TENAGA KERJA**

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	169,12%	600 M	471,226 M	78,54%	1,26 T	70,22%	Berdasarkan LKPM TW IV
2	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap	36,21%	65%	97,30%	149,69%	97,66%	99,63%	Hasil Sakernas BPS Bulan Agustus 2023
3	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Indeks Kemudahan Berinvestasi (EoDB)	101,14%	69,60	88,475	127,12%	89	99,53%	Realisasi dihitung Tahunan
4	Meningkatkan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Terlindungi	16,85%	90%	92,09%	102,33%	100%	92,09%	Data WLKP dan BPJS Ketenagakerjaan

Paringin, Desember 2023

Yang melaporkan,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M.AP

NIP. 19710228 199702 1 002

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN
SEKRETARIS**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	70,60 (BB)	71 (BB)	0	0	73	0	Menunggu Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat
2	Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran	Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	90%	91%	101,11%	100%	91%	Sensus BMD 2023



Paringin, Desember 2023
Yang melaporkan,
Sekretaris

ABDUL BASYID, S.Sos, M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%		

Mengetahui
Sekretaris,



ABDUL BASYID, S.Sos, M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007

Paringin, Desember 2023

Yang melaporkan,
Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan



FITRI EPENDI, S. Pd, MM
NIP. 19890510 201503 1 001

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%		

Mengetahui
Sekretaris,



ABDUL BASYID, S.Sos, M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007

Paringin, Desember 2023
Yang melaporkan,
Kasubbag Keuangan



MUHAMMAD RUSDI, SE
NIP. 19770304 200501 1 010

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Mengetahui
Sekretaris,


ABDUL BASYID, S.Sos, M.AP
NIP. 19720716 199403 1 007

Paringin, Desember 2023
Yang melaporkan,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian,


HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN
BENDAHARA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tertibnya administrasi keuangan tepat waktu	a. Jumlah dokumen daftar transaksi harian/bulanan	100%	12	12	100%	12	100%	
		b. Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban fungsional	100%	12	12	100%	12	100%	
		c. Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban administratif	100%	12	12	100%	12	100%	
		d. Jumlah dokumen buku pembantu pajak	100%	12	12	100%	12	100%	
		e. Jumlah dokumen laporan pajak bulanan	100%	12	12	100%	12	100%	

Kasubbag Keuangan,



MUHAMMAD RUSDI, SE
NIP. 19770304 200501 1 010

Paringin, Desember 2023

Yang melaporkan,
Bendahara,



BUDI ANSHARI
NIP. 19830314 201001 1 019


**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN
PENYUSUN KEBUTUHAN BARANG INVENTARIS**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya data kebutuhan barang inventaris kantor kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawian	Jumlah data kebutuhan barang inventaris	100%	12	12	100%	72	16,7%	
2	Tersedianya bahan konsep penyusunan kebutuhan barang inventaris kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawian	Jumlah bahan konsep	100%	2	12	600%	10	120%	
3	Tersedianya bahan pengklasifikasian kebutuhan barang inventaris	Jumlah laporan pengklasifikasian	100%	120	120	100%	120	100%	
4	Tersedianya bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian	Bahan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawian	100%	12	12	100%	72	16,7%	

Mengetahui
Kasubbag Umum dan Kepegawian,


HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011

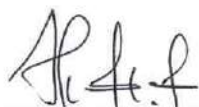
Paringin, Desember 2023
Yang melaporkan,
Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris,


VIRAWATI, S. Sos
NIP.19850321 200801 2 003

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. BALANGAN
PENGADMINISTRASI UMUM**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya data surat masuk Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawian	Jumlah surat masuk	100%	200	200	100%			
2	Tersedianya bahan pengelompokan surat atau dokumen kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawian	Jumlah laporan pengelompokan surat atau dokumen	100%	200	200	100%			
3	Tersedianya bahan dokumentasi surat menyurat	Jumlah laporan dokumentasi surat	100%	200	200	100%			

Mengetahui
Kasubbag Umum dan Kepegawian



HANARITA, S.Pd., MM
NIP. 19830107 200604 2 011

Paringin, Desember 2023
Yang melaporkan,
Pengadministrasi Umum,



KARMAN MASKURI
NIP. 19710307 200604 1 015

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Iklim Investasi di Daerah	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi Investasi	1	1	100%	6	16,67%	
2	Meningkatnya Rencana/Minat Investasi	Nilai Persetujuan Investasi/Rencana Investasi	Rp 443.423.896.338	210 M	Rp 441.085.700.000	210%	1,1 Trilyun	78,25%	
3	Meningkatnya Kepatuhan Penyampaian LKPM	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan,
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

RAFUL AMAR, M. Pd
NIP. 197204281997021002

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Pemberian Insentif/Kemudahan Berinvestasi	Jumlah Investor/Pelaku Usaha yang Mendapatkan Insentif/Kemudahan Berusaha (berinvestasi)	191	200 Pelaku Usaha	181 Pelaku Usaha	63%	6	3016,67%	Izin Berusaha
2	Tersedianya Kebijakan Daftar Prioritas Investasi Kabupaten	Jumlah Peraturan Bupati tentang Golongan Sektor Pertama dan Sektor Prioritas Investasi	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1	6	16,67%	

Mengetahui
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

RAFIUL ANAM, W.Pd
NIP. 19720428 199702 1 002

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan

Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator
Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal



GUSTI FITRIA YULIANTI S. Sos
NIP. 19830713 201001 2 016

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN/ SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan LKPM Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan	100%	300 Orang	323 Orang	108%	100	323%	
2	Terlaksananya Pengawasan Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang dilakukan Pengawasan Pemantauan	100%	35 Pelaku Usaha	41 Pelaku Usaha	117%	100	41%	

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

RAFIUL ANAM, M. Pd
NIP. 197204031997021002

Paringin, Desember 2023

Yang Melaporkan

JF Analis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

MARIATUL HIDAYAH, S. Pd.I, MM
NIP.19800312 200701 2 005

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN/ SUB KOORDINATOR PROMOSI PENANAMAN MODAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersusunnya Strategi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peta Strategi Promosi Penanaman Modal yang Disusun	0	1 Dokumen	1 Dokumen	1	6	17%	
2	Terlaksananya Promosi Investasi/Penanaman Modal	Jumlah Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%	6	50%	

Mengetahui,
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

RAFIUL AMAL, M. Pd
NIP. 19720418 199702 1 002

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator
Promosi Penanaman

WINDAYANI FACHRIA SANTI, S.Sos
NIP. 19860126 201001 2 022

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey IKM Terhadap Pelayanan	101,14%	88.00 (A)	88,58 (A)	100,66%	89	99,53%	Realisasi dihitung Tahunan

Paringin, Desember 2023

Yang Melaporkan

Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Non Berusaha


HAJI SUWITO, S.Pd

NIP. 19660906 198804 1 002



**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA I**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Pengintegrasian Layanan Perizinan	Jumlah Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Secara Online	100%	93 Layanan Perizinan	115 Layanan Perizinan	124%	100	115%	Layanan Perizinan Terintegrasi

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha



HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
Pelayanan Perizinan Berusaha I



ISNANINGSIH, S.Kom, MM
NIP. 19801205 201001 2 020

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA II**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan	100%	500 Pelaku Usaha	572	114%	100	572%	181 Perizinan Berusaha & 391 Penerima Perizinan Non Berusaha

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha



HAJI SUWITO, S.Pd

NIP. 19660906 198804 1 002

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Kebijakan / Sub Koordinator Pelayanan Perizinan Berusaha II



MARGARETHA ANI KUSWARDANI, SE

NIP. 19780128 201001 2 012

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA**

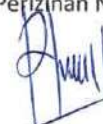
NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP (Perizinan Berusaha dan Non Berusaha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Layanan Perizinan

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha



HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator
Pelayanan Perizinan Non Berusaha



ERMAWATY, S.PI, M.AP
NIP. 197603042 008012014

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS DOKUMEN PERIZINAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersediannya Dokumen Laporan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100 %	1,00%	181 Penerima Perizinan berusaha

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha

HAJI SUWITO, S.Pd
NIP. 19660906 198804 1 002

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Dokumen Perizinan

RINA WATI, S. Sos
NIP. 19861006 200701 2 002

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KEPALA BIDANG PENGADUAN, PENGELOLAAN DATA DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perhitungan Per Layanan data informasi
2	Terlaksananya Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78 Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan

Paringin, Desember 2023

Yang Melaporkan
Kepala Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi


H. MUHAMMAD IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

Mengetahui
Kepala Dinas,

D. AKHRIANI, S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PENGADUAN DAN KONSULTASI PERIZINAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya layanan Konsultasi dan tindaklanjut pengaduan masyarakat	Jumlah layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	60	78	130%	100	78%	78 layanan Konsultasi dan Pengaduan

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
DPMPTSP, Transmigrasi dan Tenaga kerja


H. MUHAMMAD IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

Paringin, Desember 2023
Yang melaporkan
Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Sub Koordinator
Pengaduan dan Konsultasi Perizinan,


AKHMAD, SH, MM

NIP. 19790922 200904 1 001

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR DATA DAN KEARSIPAN PERIZINAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terkelolanya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota	Persentase Permintaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terpenuhi	100	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	6 Data	13 Data	13 Data	100%	30 Data	43%	Terintegrasi OSS

Mengetahui,


Kepala Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi,


H. MUHAMMAD IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

Paringin, Desember 2023

Yang melaporkan
Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator Data dan Kearsipan Perizinan,


H. M. FIRDAUS HARIADI, S. Sos

NIP. 19731024 200604 1008

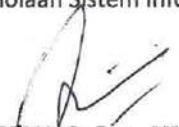
**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PENELOLAAN SISTEM INFORMASI**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan kabupaten/kota	Presentase updating sistem informasi perizinan dan non perizinan penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%		

Mengetahui,
Kepala Bidang Pengaduan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi,


H. MUHAMMAD IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan,
Analisis Kebijakan Ahli Muda / Sub Koordinator
Pengelolaan Sistem Informasi


BUDIMAH, S. Sos, MM
NIP. 19760520 200604 2 023

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Pemenuhan Kesempatan Kerja	Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	69,18	65%	63,27%	97%	70%	90,39%	
2	Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Kerja dari Realisasi Investasi	Jumlah Tambah Tenaga Kerja dari Investasi Baru	184 Orang	300	450 orang	150%	600 orang	39,83%	

Mengetahui,
Kepala Dinas



Batumandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan
Tenaga Kerja

BAIDHAWI, SE
NIP. 197504072006041006

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA / SUB KOORDINATOR PENEMPATAN TENAGA KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN s.d. TW IV (%)			
1	Tersedianya Informasi Pasar Kerja yang Efektif	Persentase Informasi Pasar Kerja yang Disebarluaskan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Tersedianya LPTKS yang Berperan Menyalurkan Tenaga Kerja	Persentase LPTKS yang Aktif	100%	25%	100%	400%	100%	100%	
3	Terselenggaranya Pelayanan Antar Kerja di Kabupaten Balangan	Persentase Kerjasama antar Kerja	100%	50%	100%	200%	100%	100%	

Mengetahui
Kabid Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja,


BAIDHAWI, SE
NIP. 19750407 200604 1 006

Batumi, Desember 2023
Yang melaporkan,
Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda/
Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja


RAHADIAN SYAHPUTERA, S.Sos
NIP. 19750408 201001 1 013

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA / SUBKOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI s.d TW IV	CAPAIAN s.d. TW IV (%)			
1	Terciptanya Keseimbangan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja	Rasio Persediaan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	100%	70%	70%	100%	100%	70%	-

Mengetahui
Kabid Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja,



BAIDHAWI, SE

NIP. 19750407 200604 1 006

Batamandi, Desember 2023
Yang melaporkan,
Fungsional Pengantar Kerja Ahli Muda/
Sub Koordinator Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan



YANTI, S.E

NIP. 19780810 200803 2 004


**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
JABATAN PELAKSANA / ANALIS TENAGA KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI s.d TW IV	CAPAIAN s.d. TW IV (%)			
1	Tersedianya Bahan Analisis Data Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah Dokumen Analisis Data Pencari Kerja Terdaftar	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	60 Dokumen	20%	
2	Tersedianya Bahan Analisis Data Lowongan/ Permintaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Lowongan/ Permintaan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	60 Dokumen	20%	
3	Tersedianya Bahan Data Informasi Pasar Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Informasi Pasar Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	60 Dokumen	20%	

Mengetahui
Kabid Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja,


Baidhawi SE
NIP. 19750407 200604 1 006

Batumandi, Desember 2023
Yang melaporkan,
Analis Tenaga Kerja,


Mujiburahman Saputra, S.E
NIP. 19901204 202012 1 009

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PELATIHAN KERJA, PRODUKTIFITAS & HUBUNGAN INDUSTRIAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	65,18	60%	89,57%	149,29%	60	149,29%	
2	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis	Persentase kasus perselisihan hubungan Industrial yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 Kasus

Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja,
Produktifitas & Hubungan Industrial

SLAMETNO S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Mengetahui,
Kepala Dinas




Dr. AKHRIANI S.Pd, M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

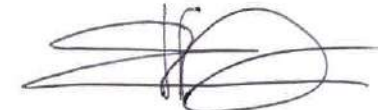
**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENGANTAR KERJA AHLI MUDA /SUB KOORDINATOR PELATIHAN KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya LPKS yang Berkualitas	Jumlah LPTKS yang melaksanakan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	100%	10 LPK	10 LPK	100%	13	76,92%	
2	Terselenggaranya Konsultasi Produktivitas bagi Perusahaan Kecil	Persentase Peningkatan Produktivitas Wirausaha Kecil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terselenggaranya Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Kompeten	142 Orang	1000 Orang	1212 Orang	12120%	1200 Orang	101%	

Mengetahui,
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktifitas & Hubungan Industrial


SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019


Paringin, Desember 2023
Yang Melaporkan
Pengantar Kerja Ahli Muda,


DIANA RAHMAWATI, S. Sos
NIP. 19860612 201001 2 014

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS BAHAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN & K3**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya Bahan Analisis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Analisis Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	60 Dokumen	20%	
2	Tersedianya Analisis Data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Analisis Data Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	60 Dokumen	20%	

Mengetahui,
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktifitas & Hubungan Industrial


SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Batumandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Bahan Pengawasan Ketenagakerjaan & K3


ARIF MUSRIFIN, S.Sos
NIP. 19830506 200801 1 009

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS BAHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya Bahan Analisis Data Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Data Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	60 Dokumen	20%	

Mengetahui
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktifitas & Hubungan
Industrial

SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019


Batamandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Bahan Peningkatan Produktivitas

AMRULLAH, S.Pd
NIP. 19730503 200604 1 008

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
ANALIS BAHAN PERSYARATAN KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya Bahan Analisis Persyaratan Kerja	Jumlah Dokumen Analisis Persyaratan Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	60 Dokumen	20%	

Mengetahui
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktifitas & Hubungan
Industrial


SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019


Batamandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Analisis Bahan Persyaratan Kerja,


A. HARDIANTO, S.M
NIP. 19731230 200604 1 010


**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
MEDIATOR HI AHLI MUDA/ SUB KOORDINATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terciptanya Perusahaan/Pemberi Kerja dengan Tata Kelola Kerja yang Layak	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terselenggaranya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Perkara/Pengaduan HI yang difasilitasi Penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1 KASUS

Mengetahui,
Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja, Produktifitas & Hubungan


SLAMETNO, S. Kom
NIP. 19820323 201001 1 019

Batamandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Mediator Hubungan Industrial,


APY MARDIATY, SE
NIP. 19750910 201001 2 005

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KEPALA UPTD BALAI LATIHAN KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya Calon Tenaga Kerja yang Kompeten	Persentase Peserta Pelatihan yang Kompeten	68,18%	100%	100%	100%	100%	100%	422 pencari kerja



Batamandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja,

ABDUL MUKHLIS, A. Md
NIP. 19790525 200801 1 017

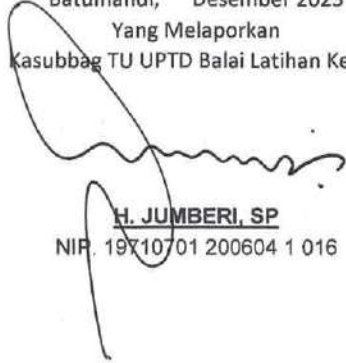
**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD BALAI LATIHAN KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	Persentase Layanan Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian UPTD Balai Latihan Kerja	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian UPTD Balai Latihan Kerja Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang UPTD Balai Latihan Kerja	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang UPTD Balai Latihan Kerja Yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Mengetahui,
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja


ABDUL MUKHLIS, A. Md
NIP. 19790525 200801 1 017

Batumandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Kasubbag TU UPTD Balai Latihan Kerja,


H. JUMBERI, SP
NIP. 19710701 200604 1 016

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENGADMINISTRASI UMUM**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	Jumlah Dokumen Administrasi Umum UPTD Balai Latihan Kerja	12 Dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	60 Dokumen	20%	

Mengetahui,
Kepala UPTD Balai Latihan Kerja



ABDUL MUKHLIS, A. Md
NIP. 19790525 200801 1 017

Batamandi, Desember 2023
Yang Melaporkan
Pengadministrasi Umum



NORDIANSYAH, A. Ma
NIP. 19740307 200701 1 013

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
KABID PERENCANAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN TW IV (%)			
1	Meningkatnya warga transmigrasi yang terampil	Persentasi warga transmigrasi yang terampil	100%	16%	27,97%	174,81%	72%	72,18%	-
2	meningkatkan Pengembangan kawasan transmigrasi	Persentasi Lahan Usaha yang dikelola	18,84%	19,05%	18,84%	99%	19,5%	96,62%	-



Paringin, Desember 2023
Yang melaporkan,
Kabid Transmigrasi

SUWARSO, S. PI
19720614 200003 1 006

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN
FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT / SUBKOORDINATOR PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN TW IV (%)			
1	Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	100%	20 orang	40 orang	200%	90 orang	77,78%	-

Kabid Transmigrasi



SUWARSO, S. PI

19720614 200003 1 006

Paringin, Desember 2023

Yang melaporkan,

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda/
Subkoordinator Pembangunan Kawasan Transmigrasi



DESLIA FATMAWATI, SE, MM

NIP. 19821208 201001 2 027

**REALISASI DAN CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA UNTUK TRIWULAN IV TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PENYULUH TRANSMIGRASI**

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET DAN CAPAIAN			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN INI S/D TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	KETERANGAN
				TARGET	REALISASI TW IV	CAPAIAN (%)			
1	Terlaksananya Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran Yang dibina	0	20 KK	20 KK	100%	75 KK	27%	

Mengetahui,
Kepala Bidang Transmigrasi



SUWARSO, S. PI

NIP. 19720614 200003 1 006

Batamandi, Desember 2023
Yang melaporkan
Penyuluh Transmigrasi



FARID WAJIDI, S. Pd.I

NIP. 19690105 200604 1 013

**Daftar Perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Balangan menurut PMDN dan PMA
Tahun 2023**

Nama Perusahaan	Status	Nama Sektor	Nilai Investasi (Rupiah)	TKI
ABADI JAYA SENTOSA BALANGAN INDONESIA	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
ADARO INDONESIA	PMA	Pertambangan	Rp 17.162.053.173,22	5
		Pertambangan	Rp 9.362.471.025,81	3
		Pertambangan	Rp 26.835.331.023,78	5

		Pertambangan	Rp 34.621.623.559,75	4
ADARO PERSADA MANDIRI	PMDN	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 45.000.000.000,00	0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
ADARO TIRTA SARANA	PMDN	Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Pertambangan	Rp 26.631.100.000,00	0
		Pertambangan	Rp 53.964.400.000,00	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	12
ADARO WAMCO PRIMA	PMDN	Pertambangan	Rp -	72
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
ALTIN BORNEO ABADI	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
ANDALUS	PMDN	Konstruksi	Rp 176.000.000,00	1
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0

ANUGERAH BALANGAN	PMDN	Industri Lainnya	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
ARGA KUKUSAN KENCANA	PMDN	Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp 500.000.000,00	22
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Pertambangan	Rp 3.802.200.000,00	3
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		BAKTI PUTRA MERATUS	PMDN	Pertambangan
Konstruksi	Rp -			9
Perdagangan dan Reparasi	Rp 46.200.000,00			1
Jasa Lainnya	Rp 55.000.000,00			25

		Jasa Lainnya	Rp 35.000.000,00	30
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
BALANGAN ANUGERAH SEMESTA	PMA	Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
BERSAMA AHMAD AWAN	PMDN	Jasa Lainnya	Rp 76.500.000,00	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
BINA PERTIWI	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 348.700.000,00	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 1.178.800.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 215.800.000,00	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
BORNEO ANUGRAH INSANINDO	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp 80.300.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 88.600.000,00	0

BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA	PMDN	Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
CAHAYA JAYA	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
		Perikanan	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp 10.000.000,00	0
		Konstruksi	Rp 150.000.000,00	0
		Konstruksi	Rp 700.000.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 55.000.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 300.000.000,00	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0

CHANDRA BATUAH MUSTIKA LESTARI	PMDN	Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Pertambangan	Rp 4.937.600.000,00	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Pertambangan	Rp 15.500.000.000,00	21
		Konstruksi	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Pertambangan	Rp 1.763.000.000,00	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		GALUMBANG JAYA	PMDN	Konstruksi
Konstruksi	Rp 10.000.000,00			0
GUNA SARANA TEKNIK	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0

		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
GUNUNG CAHAYA BERSAMA	PMDN	Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
HANIF MANDIRI JAYA	PMDN	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
HJ ROHANA	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
INDO INTI SEJAHTERA	PMDN	Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	4

		Pertambangan	Rp 2.663.800.000,00	1
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Listrik, Gas dan Air	Rp -	0
JAYA GORDEN	PMDN	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
		Perikanan	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp 14.000.000,00	0
		Perikanan	Rp 4.000.000,00	0
		Konstruksi	Rp 300.000.000,00	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 23.000.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 51.000.000,00	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 25.000.000,00	0
KURNIA JUNJUNG PERKASA	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0

		Jasa Lainnya	Rp 3.568.700.000,00	50
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp 3.853.200.000,00	4
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp 4.336.400.000,00	6
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp 4.345.400.000,00	7
LANCARJAYA MANDIRI ABADI	PMDN	Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
LASKAR SEMESTA ALAM	PMA	Pertambangan	Rp 20.644.487.729,67	13
		Pertambangan	Rp 7.710.792.608,99	12
		Pertambangan	Rp 15.383.103.389,65	8
LINTAS TAWAHAN UTAMA	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Industri Lainnya	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0

		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
		Hotel dan Restoran	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
NUR RAMADHANI	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp 585.000.000,00	2
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
PARAMITHA CIPTA SARANA	PMA	Pertambangan	Rp 23.312.923.558,52	1
		Pertambangan	Rp 17.327.823.390,80	0
		Pertambangan	Rp 30.542.727.020,61	0
PERBATASAN	PMDN	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
		Perikanan	Rp -	0
		Konstruksi	Rp 250.000.000,00	0

		Konstruksi	Rp 700.000.000,00	0
		Konstruksi	Rp 500.000,00	0
PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp 396.900.000,00	0
		Konstruksi	Rp -	0
REKA INSTINCT CONSULTANT	PMDN	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	10
		Jasa Lainnya	Rp -	10
RIZKY BUMI BALANGAN	PMDN	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 1.690.000.000,00	3
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp 980.000.000,00	0
SAPTAINDRA SEJATI	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp 526.400.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Jasa Lainnya	Rp 1.180.400.000,00	0

		Jasa Lainnya	Rp 795.800.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
SARIBUMI SINARKARYA	PMDN	Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp -	0
		Pertambangan	Rp 203.700.000,00	6
		Pertambangan	Rp -	0
SATRIA RARA PRAMITHA	PMDN	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	Rp -	0
		Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	Rp -	0
SEMESTA CENTRAMAS	PMA	Pertambangan	Rp 18.020.451.831,42	9
		Pertambangan	Rp 36.857.884.670,69	5
		Pertambangan	Rp 29.546.688.096,11	6
TRAKINDO UTAMA	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp 40.000.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 40.000.000,00	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp 80.000.000,00	0
TRAKINDO UTAMA PALEMBANG	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp 10.000.000,00	0
UNITED TRACTORS	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0

		Jasa Lainnya	Rp -	0
UNITED TRACTORS PANDU ENGINEERING	PMDN	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
USAHA BERSAMA	PMDN	Konstruksi	Rp -	4
		Konstruksi	Rp -	3
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	6
VIMELDA BINTANG MANDIRI	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
WANDA JAYA PROPERTY	PMDN	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
		Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	Rp -	0
WIDYA SAPTA COLAS	PMDN	Pertambangan	Rp 1.275.000.000,00	0
ZAULAH	PMDN	Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0
		Konstruksi	Rp -	0

	Perdagangan dan Reparasi	Rp -	0
	Jasa Lainnya	Rp -	0
	Konstruksi	Rp -	0
	Konstruksi	Rp -	0
Grand Total		Rp 471.226.861.079,01	450

**Jumlah laporan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Swasta yang terdaftar pada
Bursa Kerja/ Informasi Pasar Kerja Tahun 2023**

No	Bulan	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja
1	Januari	139	6	90
2	Februari	71	34	42
3	Maret	81	17	57
4	April	49	9	32
5	Mei	339	50	215
6	Juni	163	5	98
7	Juli	139	10	91
8	Agustus	354	18	235
9	September	120	27	78
10	Oktober	78	46	53
11	November	81	15	42
12	Desember	55	8	23
Tahun 2023		1.669	245	1.056

Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan Kerja Tahun 2023

NO	JUDUL KEGIATAN PELATIHAN	SUMBER ANGGARAN			JUMLAH PESERTA PELATIHAN (ORG)
		APBN	APBD	CSR	
1	COMPUTER OPERATOR ASSISTANT	2	-	-	32
2	MENJAHIT PAKAIAN WANITA DEWASA	3	-	-	48
3	DESAINER GRAFIS MUDA	1	-	-	16
4	PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK BANGUNAN SEDERHANA	1	-	-	16
5	SERVICE SEPEDA MOTOR INJEKSI	1	-	-	16
6	LAS SMAW 3G UP-PF	1	-	-	16
7	MENJAHIT PAKAIAN WANITA DEWASA	-	4	-	64
8	BASIC OFFICE	-	1	-	16
9	TEKNIK OTOMOTIF	-	2	-	32
10	TATA RIAS	-	1	-	16
11	DESAINER GRAFIS MUDA	-	1	-	16
12	TEKNIK LAS PABRIKASI	-	1	-	16
13	TEKNIK LISTRIK	-	1	-	16
14	OPERATOR EXCAVATOR	-	1	-	43
15	OPERATOR TRONTON	-	1	-	32
16	MENGEMUDI MOBIL	-	1	-	16
17	TEKNIK LAS PABRIKASI BUMA	-	-	1	11
18	Pelatihan Excavator		2		43
19	pelatihan tronton Roda 10		1		32
20	Operator Dozer		1		75
21	Operator Excavator		1		75
22	Operator Miini HD		1		10
23	Operator Tronton R10		1		75
24	Operator Sarana		1		150
25	Sertifikasi		1		761
26	Pelatihan Sertifikasi Bidang Teknik Tambang		1		60
27	Pelatihan Sertifikasi Bidang Teknologi Informasi		1		252
28	Cleaning Service		1		50
29	Security		1		89
30	Tenaga Keamanan		1		75
31	Psikotest		1		256
32	Babershop		2		30
Jumlah					2455

Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2023

No.	JENIS PERIZINAN	JUMLAH
A.	IZIN BERUSAHA (60 Izin/12 Sektor)	
	<u>SEKTOR KESEHATAN (15)</u>	
1	Izin Toko Alat Kesehatan	0
2	Izin Mendirikan Rumah Sakit (OSS)	0
3	Izin Operasional Rumah Sakit (OSS)	0
4	Izin Mendirikan Klinik (OSS)	0
5	Izin Operasional Klinik (OSS)	0
6	Izin Operasional Puskesmas (OSS)	
7	Izin Optikal (OSS)	
8	Usaha Depot Air Minum (DAM) (OSS)	
9	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus (OSS)	0
10	Izin Apotek (OSS)	7
11	Izin Toko Obat (OSS)	0
12	Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	0
13	Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	0
14	Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT (OSS)	0
15	Serifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) / PB UMKU (OSS)	108
	<u>SEKTOR PERTANIAN (11)</u>	
16	Izin Usaha Perkebunan;	0
17	Pendaftaran Usaha Perkebunan	0
18	Izin Usaha Tanaman Pangan	0
19	Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	0
20	Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen	0

21	Usaha Perbenihan Tanaman	0
22	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	0
23	Izin Usaha Hortikultura	0
24	Pendaftaran Usaha Hortikultura	0
25	Izin Usaha Peternakan	0
26	Pendaftaran Usaha Peternakan	0
	<u>SEKTOR PERINDUSTRIAN, MIKRO KECIL DAN KOPERASI (9)</u>	
27	Izin Usaha Industri	0
28	Izin Perluasan Usaha Industri	0
29	Izin Usaha Kawasan Industri	0
30	Izin Perluasan Kawasan Industri	0
31	Izin Koperasi Simpan Pinjam	0
32	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	0
33	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	0
34	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	0
35	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) (OSS)	0
	<u>SEKTOR PENDIDIKAN (1)</u>	
36	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	0
	<u>SEKTOR KEPARIWISATAAN (1)</u>	0
37	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);	0
	<u>SEKTOR PERDAGANGAN (5)</u>	0
38	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);	0
39	Izin Usaha Tanpa Pemenuhan Komitmen	0
40	Izin Usaha Dengan Persyaratan Teknis	0
41	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba;	0
42	Tanda Daftar Gudang;	0
	<u>SEKTOR PEKERJAAN UMUM (5)</u>	
43	Izin Usaha Jasa Konstruksi;	0
44	Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP)	0

45	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	0
46	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	41
47	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	2
48	Izin Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa	0
49	Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	0
50	Izin Pembuangan Air Limbah	0
	8.3.1. Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	0
	8.3.2. Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi ke Tanah	0
51	Izin Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL)	0
52	Perubahan Izin Lingkungan (UKL-UPL/AMDAL)	0
53	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	23
	<u>SEKTOR KETENAGAKERJAAN (2)</u>	
54	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	0
55	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	0
	9.2.1. Untuk Swasta/Masyarakat	0
	9.2.2. Untuk Pemerintah atau Perusahaan	0
	<u>SEKTOR PERIKANAN (2)</u>	
56	Surat Izin Usaha Perikanan (Tanda Pencatatan Usaha Budidaya Ikan)	0
57	Tanda Daftar Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan	0
	<u>SEKTOR PERHUBUNGAN (2)</u>	
58	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam daerah;	0
59	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;	0
	<u>SEKTOR PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN (1)</u>	
60	Izin Lokasi	0
B	PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA (MELALUI APLIKASI Si CANTIK CLOUD DAN PERIZINAN DAERAH) (33 Izin/7 Sektor)	
	<u>SEKTOR PEKERJAAN UMUM (3)</u>	
1	Izin Reklame	0

2	Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	0
3	Rekomendasi Kesesuaian Lahan dan Ruang	0
	<u>SEKTOR PENDIDIKAN (1)</u>	
4	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	
	<u>SEKTOR KESEHATAN (23)</u>	
5	Izin Unit Transfusi Darah Tingkat Kabupaten	0
6	Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik	0
7	Izin Praktik Perawat	104
8	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	10
9	Izin Praktik Perawat Anestesi	0
10	Surat Izin Praktik Bidan	107
11	Surat Izin Praktik Apoteker	21
12	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian/SIPTTK	27
13	Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris	0
14	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)	2
15	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	14
16	Surat Izin Kerja Perekam Medis Informasi Kesehatan	8
17	Izin Praktik Okupasi Terapis	0
18	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	0
19	Surat Izin Praktik Radiografer	0
20	Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis	1
21	Surat Izin Praktik Dokter	66
22	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	20
23	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	7
24	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	0
25	Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga.	0
26	Surat Kerja Fisioterapis (SIKP)	
27	Klinik	0
	<u>SEKTOR SOSIAL (3)</u>	

28	Izin Pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	0
29	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	0
30	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang	4
	<u>SEKTOR PERTANIAN (1)</u>	
31	- Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	0
	Habitat Buatan	0
	Habitat Alami	0
	<u>SEKTOR PERDAGANGAN (1)</u>	
32	Surat Tanda Pendaftaran Pedagang Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis (STPP-BOKAR SIR)	0
	<u>SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (1)</u>	
33	Rekomendasi Pengesahan Site Plan Perumahan	0
TOTAL		572
	II. PELAYANAN NON PERIZINAN	
	1. Layanan Konsultasi	78
	2. Layanan Pengaduan.	0
	3. Layanan Sosialisasi	0
TOTAL		78
	Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA)	
1	OSS - NIB (Nomor Induk Berusaha)	1802

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	52,598,600	46,528,500	88.46	6,070,100
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	52,598,600	46,528,500	88.46	6,070,100
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	23,569,800	20,600,000	87.40	2,969,800
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	29,028,800	25,928,500	89.32	3,100,300
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	14,119,215,100	13,847,971,207	98.08	271,243,893
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3,430,970,100	3,172,802,016	92.48	258,168,084
3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2,722,240,100	2,469,328,361	90.71	252,911,739
4	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	708,730,000	703,473,655	99.26	5,256,345
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3,289,160,000	3,282,927,968	99.81	6,232,032
5	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	3,289,160,000	3,282,927,968	99.81	6,232,032
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	95,085,000	89,329,723	93.95	5,755,277
6	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	95,085,000	89,329,723	93.95	5,755,277
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7,304,000,000	7,302,911,500	99.99	1,088,500
7	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	7,304,000,000	7,302,911,500	99.99	1,088,500
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1,255,473,500	1,211,502,771	96.50	43,970,729.
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	1,132,524,200	1,113,152,071	98.29	19,372,129
8	Pelayanan antar Kerja	112,234,200	106,131,100	94.56	6,103,100
9	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	701,448,000	699,232,715	99.68	2,215,285
10	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	27,500,800	21,589,100	78.50	5,911,700
11	Perluasan Kesempatan Kerja	291,341,200	286,199,156	98.24	5,142,044
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11,428,800	2,750,000	24.06	8,678,800
12	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	11,428,800	2,750,000	24.06	8,678,800
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	91,939,300	78,724,700	85.63	13,214,600
13	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	12,105,700	10,575,600	87.36	1,530,100
14	Job Fair/Bursa Kerja	79,833,600	68,149,100	85.36	11,684,500
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	19,581,200	16,876,000	86.18	2,705,200
15	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	14,141,200	11,464,000	81.07	2,677,200
16	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	5,440,000	5,412,000	99.49	28,000
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4,267,296,100	4,105,114,992	96.20	162,181,108

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3,889,885,400	3,732,068,003	95.94	157,817,397
17	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	3,889,885,400	3,732,068,003	95.94	157,817,397
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	377,410,700	373,046,989	98.84	4,363,711
18	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	195,145,000	194,451,338	99.64	693,662
19	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16,690,000	16,096,322	96.44	593,678
20	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	165,575,700	162,499,329	98.14	3,076,371
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13,022,289,529	12,553,768,793	96.40	468,520,736
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149,601,800	140,126,045	93.67	9,475,755
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,185,000	22,390,409	96.57	794,591
22	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17,185,000	13,919,000	81.00	3,266,000
23	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17,635,000	16,893,000	95.79	742,000
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54,105,000	49,773,833	91.99	4,331,167
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,491,800	37,149,803	99.09	341,997
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,797,640,778	8,517,845,711	96.82	279,795,067
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,331,662,778	7,066,075,394	96.38	265,587,384
27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,386,968,000	1,376,084,317	99.22	10,883,683
28	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35,005,000	34,463,800	98.45	541,200
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	44,005,000	41,222,200	93.68	2,782,800
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	351,932,500	327,373,600	93.02	24,558,900
30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	161,282,500	158,683,200	98.39	2,599,300

31	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190,650,000	168,690,400	88.48	21,959,600
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,404,687,850	1,346,101,123	95.83	58,586,727
32	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	45,639,100	45,639,100	100.00	-
33	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	670,387,150	620,951,400	92.63	49,435,750
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76,471,100	74,244,700	97.09	2,226,400
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19,866,300	19,866,300	100.00	-
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	592,324,200	585,399,623	98.83	6,924,577
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	242,446,200	223,706,200	92.27	18,740,000
37	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174,000,000	155,260,000	89.23	18,740,000
38	Pengadaan Mebel	68,446,200	68,446,200	100.00	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923,333,501	880,570,973	95.37	42,762,528
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412,196,401	373,903,873	90.71	38,292,528
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	511,137,100	506,667,100	99.13	4,470,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,152,646,900	1,118,045,141	97.00	34,601,759
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	395,596,900	375,717,363	94.97	19,879,537
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	757,050,000	742,327,778	98.06	14,722,222
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	195,951,400	157,785,291	80.52	38,166,109
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55,902,400	39,752,091	71.11	16,150,309
44	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	49,042,800	39,752,091	81.06	9,290,709
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	140,049,000	118,033,200	84.28	22,015,800
46	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	132,539,000	118,033,200	89.06	14,505,800
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	3,639,849,000	3,437,896,150	94.45	201,952,850
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3,639,849,000	3,437,896,150	94.45	201,952,850
47	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	127,758,000	123,832,180	96.93	3,925,820

48	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3,512,091,000	3,314,063,970	94.36	198,027,030
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	617,437,750	600,643,099	97.28	16,794,651
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	617,437,750	600,643,099	97.28	16,794,651
49	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	213,337,050	198,768,709	93.17	14,568,341
50	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	20,248,400	19,256,400	95.10	992,000
51	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	334,084,800	333,114,990	99.71	969,810
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	49,767,500	49,503,000	99.47	264,500
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	535,380,800	397,844,366	74.31	137,536,434
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	535,380,800	397,844,366	74.31	137,536,434
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	14,486,400	13,816,400	95.37	670,000
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	395,735,600	283,021,851	71.52	112,713,749
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	125,158,800	101,006,115	80.70	24,152,685
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	406,463,400	401,328,145	98.74	5,135,255
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	406,463,400	401,328,145	98.74	5,135,255
56	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	406,463,400	401,328,145	98.74	5,135,255
11	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	112,275,500	110,759,893	98.65	1,515,607
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	112,275,500	110,759,893	98.65	1,515,607

57	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14,985,000	14,298,000	95.42	687,000
58	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	97,290,500	96,461,893	99.15	828,607
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	200,142,600	197,762,700	98.81	2,379,900
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	200,142,600	197,762,700	98.81	2,379,900
59	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	15,132,600	14,435,700	95.39	696,900
60	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	185,010,000	183,327,000	99.09	1,683,000
TOTAL		38,424,373,279	37,068,905,907	96.47	1,355,467,372

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Sisa Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	100	88.46	6,070,100	11.54
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100	88.46	6,070,100	11.54
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100	87.40	2,969,800	12.60
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	100	89.32	3,100,300	10.68
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	149.29	98.08	271,243,893	1.02
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	100	92.48	258,168,084	7.52
3	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100	90.71	252,911,739	9.69
4	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	100	99.26	5,256,345	0.74
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100	99.81	6,232,032	0.19
5	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100	99.81	6,232,032	0.19
		100			
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100	93.95	5,755,277	6.05
6	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100	93.95	5,755,277	6.05
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.34	99.99	1,088,500	0.01
7	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	99.99	1,088,500	0.01
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	97.34	96.50	43,970,729.	3.50
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100	98.29	19,372,129	1.11
8	Pelayanan antar Kerja	100	94.56	6,103,100	3.44
9	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100	99.68	2,215,285	0.32
10	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100	78.50	5,911,700	21.50
11	Perluasan Kesempatan Kerja	100	98.24	5,142,044	1.16
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	24.06	8,678,800	75.94
12	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	100	24.06	8,678,800	75.94
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	25	85.63	13,214,600	14.57
13	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	100	87.36	1,530,100	12.24
14	Job Fair/Bursa Kerja	100	85.36	11,684,500	14.24
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100	86.18	2,705,200	13.82
15	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	100	81.07	2,677,200	18.93
16	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100	99.49	28,000	0.31
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100	96.20	162,181,108	3.80

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	95.94	157,817,397	4.06
17	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	100	95.94	157,817,397	4.06
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100	98.84	4,363,711	1.76
18	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	99.64	693,662	0.56
19	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	96.44	593,678	3.56
20	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	100	98.14	3,076,371	1.06
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00	96.40	468,520,736	3.60
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	93.67	9,475,755	5.53
21	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	96.57	794,591	5.53
22	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	81.00	3,266,000	19.0
23	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	95.79	742,000	4.61
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	91.99	4,331,167	8.01
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99.09	341,997	0.01
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	96.82	279,795,067	3.78
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.45	96.38	265,587,384	3,62
27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	99.22	10,883,683	0,78
28	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	98.45	541,200	1,55
29	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	93.68	2,782,800	6,32
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	93.02	24,558,900	6,98
30	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	98.39	2,599,300	1,61

31	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	88.48	21,959,600	11,52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	95.83	58,586,727	4,17
32	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100.00	-	0
33	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	92.63	49,435,750	7,37
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	97.09	2,226,400	2,91
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100.00	-	0
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	98.83	6,924,577	1,17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	92.27	18,740,000	7,73
37	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	89.23	18,740,000	10,77
38	Pengadaan Mebel	100	100.00	-	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95.37	42,762,528	4,63
39	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	90.71	38,292,528	9,29
40	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	99.13	4,470,000	0,87
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97.00	34,601,759	3
41	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	106.45	94.97	19,879,537	5,03
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	98.06	14,722,222	1,94
6	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	100	80.52	38,166,109	19,48
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	71.11	16,150,309	28,89
		100			100
		100			100
44	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100	81.06	9,290,709	18,94
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100	84.28	22,015,800	15,72
46	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	100	89,06	14,505,800	10,94
7	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	210	94.45	201,952,850	5,55
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	94.45	201,952,850	5,55
		100			100

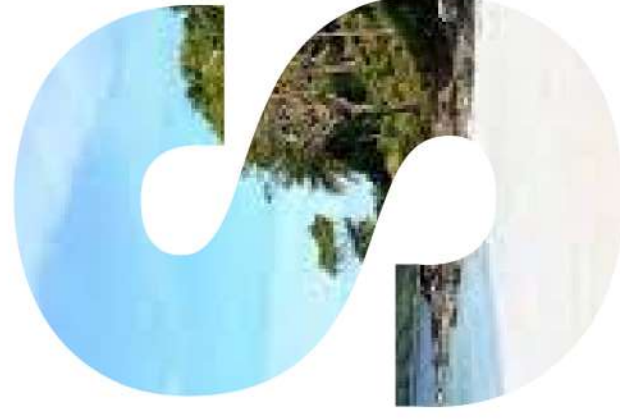
47	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	100	96.93	3,925,820	3,07
48	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100	94.36	198,027,030	5,64
8	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	100,66	97.28	16,794,651	2,72
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	108.33	97.28	16,794,651	2,72
49	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	81.71	93.17	14,568,341	6,83
50	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	81.71	95.10	992,000	4,9
51	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	78	99.71	969,810	0,29
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	81.71	99.47	264,500	0,53
9	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	100	74.31	137,536,434	25,69
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	74.31	137,536,434	25,69
53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	117.14	95.37	670,000	4,63
54	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	107.67	71.52	112,713,749	28,48
55	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	117.14	80.70	24,152,685	19,3
10	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	100	98.74	5,135,255	1,26
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	98.74	5,135,255	1,26
56	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100	98.74	5,135,255	1,26
11	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	100	98.65	1,515,607	1,35
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	98.65	1,515,607	1,35

57	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	95.42	687,000	4,58
58	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	100	99.15	828,607	0,85
12	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	98.90	98.81	2,379,900	1,19
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	100	98.81	2,379,900	1,19
59	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	100	95.39	696,900	4,61
60	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	100	99.09	1,683,000	0,91

Daftar Permintaan Data dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2023

No.	Permintaan Data dan Informasi	Pemohon	Keterangan
1.	Permohonan data Badan Usaha Jasa Konstruksi yang ada di Kabupaten Balangan yang terdaftar di OSS	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terpenuhi
2.	Permintaan data Spasial Izin Usaha Perkebunan	Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Terpenuhi
3.	Permintaan data Perolehan Data IMB dalam Rangka Program Satu Juta Rumah untuk Rakyat Periode 2023	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Perumahan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II	Terpenuhi
4.	Permintaan data pelaku usaha yang memiliki KBLI di bidang Industri baik secara perorangan maupun berbadan hokum	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan	Terpenuhi
5.	Permintaan data surat tanda daftar usaha budidaya tanaman dan industri pengolahan hasil perkebunan, data tanah dan/atau bangunan, data usaha pelaku pemanfaatan air tanah, data usaha profesi dokter, izin usaha perkebunan (IUP, IUP-B, IUP-P), surat tanda daftar perusahaan.	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Paringin	Terpenuhi
6.	Permohonan informasi dan data Perizinan Reklame di Kabupaten Balangan	Satuan Polisi Pamong Praja	Terpenuhi
7.	Permintaan data Statistik untuk Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2023 (MI-09)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan	Terpenuhi
8.	Permintaan data Penunjukan Petugas Pengelola kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Terpenuhi
9.	Permintaan data Pengutipan Direktori Perusahaan Konstruksi 2023	Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan	Terpenuhi
10.	Permintaan data Surat Izin Usaha (SIU) dan data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan Paringin	Terpenuhi
11.	Permintaan data Produk Layanan	Sekretariat Daerah	Terpenuhi
12.	Permintaan data untuk Publikasi Balangan Dalam Angka	Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan	Terpenuhi

13.	Permintaan data Statistik Sektoral Kabupaten Balangan Tahun 2023	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan	Terpenuhi
14.	Permohonan data terpilah gender dan anak tingkat Kabupaten sebagai data pembuka wawasan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Naka Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Terpenuhi
15.	Permintaan data terkait KKPR	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Terpenuhi



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PRESS RELEASE REALISASI INVESTASI TAHUN 2023



Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan
Endri, AP., M. AP
NIP. 197508211994121005

← →  <https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

DAFTAR ISI

REALISASI INVESTASI BERDASARKAN



- Triwulan IV 2023
- Januari – Desember 2023



- Sektor, Lokasi, Negara
- Triwulan IV dan
- Januari – Desember 2023



- Perkembangan Realisasi
- Investasi : 2012 - 2023



- Data Realisasi Investasi
- UMK Tahun 2023

KETERANGAN:

- Data Realisasi investasi di luar investasi sektor Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Kurs yang digunakan kurs US\$ 1 = Rp 14.800 sesuai dengan APBN 2023
- Nilai investasi Triwulan IV 2023 merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan (Oktober s/d Desember 2023)
- berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN
- PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
- PMA : Penanaman Modal Asing
- TRIWULAN IV : OKTOBER s/d DESEMBER



<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>



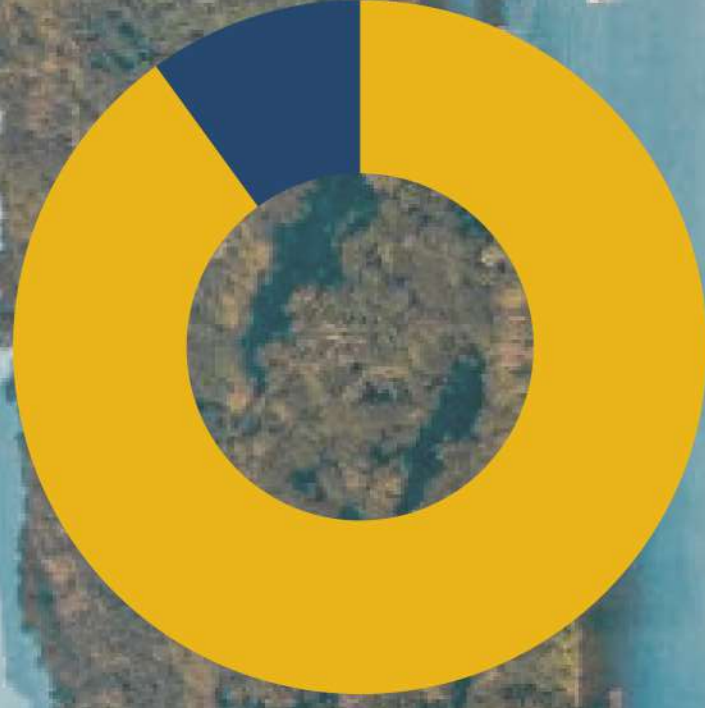
REALISASI INVESTASI TW IV 2023



<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

SOROTAN REALISASI INVESTASI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2023 OKTOBER s/d DESEMBER

**PMDN
5,43 T**



**TOTAL REALISASI INVESTASI
6.04 T**

**PMA
150 PROYEK**



**PMDN
1.943 PROYEK**

**TOTAL JUMLAH PROYEK
2.093**

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

PMDN			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp. Miliar)	PROYEK
1	Jawa Barat	28.172,7	18.054
2	Jawa Timur	20.712,7	13.827
3	Daerah Khusus Ibu kota Jakarta	20.480,7	34.921
4	Kalimantan Timur	16.019,1	3.254
5	Nusa Tenggara Barat	10.813,4	1.141
6	Riau	10.744,4	2.779
7	Banten	10.235,4	9.222
8	Jawa Tengah	8.841,9	10.538
9	Sumatera Selatan	6.930,3	3.116
10	Kalimantan Selatan	5.436,3	1.943
11	Sumatera Utara	4.721,5	4.549
12	Kalimantan Barat	2.983,9	1.762
13	Sulawesi Tenggara	2.930,1	910
14	Maluku Utara	2.717,3	854
15	Sulawesi Selatan	2.615,6	3.318
16	Jambi	2.563,7	1.340
17	Kalimantan Tengah	2.491,7	1.175
18	Lampung	2.383,4	1.688
19	Kepulauan Riau	2.124,3	2.540
20	Sulawesi Utara	2.052,0	1.472
21	Kalimantan Utara	1.841,9	590
22	Daerah istimewa Yogyakarta	1.676,6	1.755
23	Sulawesi Tengah	1.674,3	921
24	Bengkulu	1.480,6	942
25	Aceh	1.386,9	2.623
26	Bali	1.383,5	2.429
27	Kepulauan Bangka Belitung	1.189,9	1.004
28	Sumatera Barat	1.076,6	1.118
29	Gorontalo	947,8	678
30	Musa Tenggara Timur	771,2	1.121
31	Papua Barat Daya	637,4	673
32	Sulawesi Barat	371,1	500
33	Papua	340,7	432
34	Papua Barat	262,7	416
35	Maluku	215,7	779
36	Papua Selatan	80,3	125
37	Papua Tengah	76,1	222
38	Papua Pegunungan	5,3	59
TOTAL		181.389,0	134.830

POSISI REALISASI INVESTASI KALSEL TRIWULAN IV SECARA NASIONAL

PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	1.974,2	6.062
2	Sulawesi Tengah	1.803,9	256
3	Jawa Timur	1.643,8	2.151
4	Maluku Utara	1.281,2	151
5	Daerah Khusus Ibu kota Jakarta	1.073,3	9.095
6	Banten	1.011,9	2.751
7	Kalimantan Utara	720,3	98
8	Kalimantan Timur	414,1	461
9	Jawa Tengah	404,9	2.003
10	Sumatera Selatan	254,4	279
11	Papua Tengah	251,0	25
12	Sumatera Utara	198,5	693
13	Bali	197,9	9.594
14	Sulawesi Tenggara	150,3	132
15	Kepulauan Riau	144,6	1.055
16	Musa Tenggara Barat	142,0	999
17	Riau	110,8	325
18	Sulawesi Selatan	95,8	290
19	Kalimantan Tengah	89,8	251
20	Kalimantan Barat	81,2	278
21	Maluku	63,9	37
22	Sulawesi Utara	53,9	164
23	Sumatera Barat	53,6	172
24	Kalimantan Selatan	40,8	150
25	Lampung	40,8	210
26	Aceh	37,4	122
27	Bengkulu	37,3	76
28	Papua Selatan	19,8	45
29	Daerah istimewa Yogyakarta	18,7	326
30	Musa Tenggara Timur	10,9	260
31	Papua Barat Daya	10,8	32
32	Gorontalo	7,8	49
33	Jambi	6,7	106
34	Kepulauan Bangka Belitung	6,1	113
35	Papua Barat	3,5	33
36	Papua	2,3	39
37	Sulawesi Barat	0,9	36
TOTAL		12.459,0	39.019



5 TERBESAR BERDASARKAN LOKASI REALISASI TRIWULAN IV 2023



KABUPATEN TABALONG
1,56 T



KABUPATEN TANAH BUMBU
1,07 T



KABUPATEN TAPIN
6.97 M



KABUPATEN TANAH LAUT
6,22 M



KOTA BANJARMASIN
5,7 M



KABUPATEN TABALONG
1,7 T



KABUPATEN TANAH LAUT
121 M



KABUPATEN KOTABARU
83 M



KABUPATEN KOTABARU
60,3 M



KOTA BANJARMASIN
38,23 M

P

M

D

M

P

M

A

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

REALISASI INVESTASI KALSEL TRIWULAN IV TAHUN 2023 BERDASARKAN LOKASI

NO	KABUPATEN/ KOTA	PMDH		PRA		PMDH + PRA	
		PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI (DALAM JUTA)	PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI (DALAM JUTA)	PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI (DALAM JUTA)
1	Kabupaten Tabalong	250	1.566.832,50	7	175.658,24	257	1.742,55
2	Kabupaten Tanah Bumbu	153	1.071.773,20	11	60.378,08	170	1.132,15
3	Kabupaten Tanah Laut	34	622.100,80	34	121.524,28	128	743,62
4	Kabupaten Tapin	73	636.383,30	3	25.037,16	82	722,02
5	Kota Banjarmasin	382	568.000,20	23	38.232,84	405	606,23
6	Kabupaten Banjar	271	416.642,20	24	38.186,96	295	454,82
7	Kabupaten Kotabaru	55	271.504,60	14	83.030,16	69	354,53
8	Kabupaten Balangan	282	70.513,30	1	34.621,64	283	105,13
9	Kota Banjar Baru	207	83.154,10	16	12.551,88	223	101,70
10	Kabupaten Barito Kuala	34	56.555,70	15	15.088,60	49	71,64
11	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	23	4.152,40	0	-	23	4,15
12	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	82	1.351,50	2	180,56	84	1,53
13	Kabupaten Hulu Sungai Utara	25	634,80	0	-	25	6,30

  <https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressrelease/TWIV2023>

REALISASI INVESTASI KALSEL TRIWULAN IV TAHUN 2023 BERDASARKAN LOKASI

**LOKASI REALISASI DOMINAN
DI KALSEL**



**KOTA BANJARMASIN
787 PROYEK**

**TAMBAHAN INVESTASI TERBESAR
DI KALSEL**



**KABUPATEN TABALONG
1,7 T**

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

PERSENTASE REALISASI INVESTASI KALSEL TRIWULAN IV TAHUN 2023 BERDASARKAN LOKASI

■ PMDN ■ PMA ■ PMDN + PMA



<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

NILAI DAN PERSENTASE REALISASI INVESTASI KALSEL TRIWULAN IV TAHUN 2023 BERDASARKAN NEGARA

NEGARA	PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI (USD RIBU)	TAMBAHAN INVESTASI (Rp. Juta)	PERSENTASE
Singapura	55	15.691,70	232,23	38,41%
Thailand	2	14.148,30	209,39	34,64%
Hongkong, RRT	23	4.688,70	69,39	11,48%
Australia	4	3.032,80	44,88	7,42%
Malaysia	4	986,20	14,59	2,41%
India	4	889,20	13,16	2,18%
Inggris	4	716,10	10,59	1,75%
R.R. Tiongkok	24	585,00	8,65	1,43%
Korea Selatan	10	76,50	1,13	0,19%
Jepang	9	14,80	2,10	0,04%
Belanda	1	11,80	1,70	0,03%
Perancis	1	4,30	6,00	0,01%
Swiss	4	2,60	3,00	0,01%
Amerika Serikat	2	-	-	0,00%
Kepulauan Virgin Inggris	2	-	-	0,00%
Luxembourg	1	-	-	0,00%

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

REALISASI INVESTASI KALSEL TRIWULAN IV TAHUN 2023 BERDASARKAN SEKTOR

SEKTOR	PMDN		PMA		PERSENTASE	TOTAL PROYEK	PMDN + PMA TOTAL TAMBAHAN TAMBAHAN (JUTA)	TOTAL PERSENTASE
	PMDN PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI PMDN (Rp. Juta)	PERSENTASE	PMA PROYEK				
Pertambangan	163	3.926,58	72,23%	17	420.173,48	180	4.346,75	71,96%
Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	75	398,94	7,34%	15	31.768,20	90	430,71	7,13%
Hotel dan Restoran	88	296,86	5,46%	9	161,32	97	297,02	4,92%
Industri Makanan	50	214,89	3,95%	16	21.787,08	66	236,68	3,92%
Perdagangan dan Reparasi	505	193,00	3,55%	32	5.217,00	537	198,22	3,28%
Transportasi, Gudang dan Jasa Lainnya	189	159,61	2,94%	6	12.852,32	195	172,46	2,85%
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Industri Kimia Dan Farmasi	239	58,18	1,07%	17	36.193,40	256	94,38	1,56%
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Industri Kimia Dan Farmasi	5	9,39	0,17%	5	65.102,24	10	74,50	1,23%
Industri Kimia Dan Farmasi	17	68,10	1,25%	4	334,48	21	68,44	1,13%
Konstruksi	398	57,07	1,05%	2	20,72	400	57,09	0,95%
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	61	42,90	0,79%	3	1.012,32	64	43,92	0,73%
Listrik, Gas dan Air	51	3,59	0,07%	6	8.806,00	57	12,40	0,21%
Perikanan	14	2,44	0,04%	0	-	14	2,44	0,04%
Kehutanan	16	1,92	0,04%	5	-	21	1,92	0,03%
Industri Kayu	13	4,70	0,01%	10	1.121,84	23	1,59	0,03%
Industri Karet dan Plastik	7	1,14	0,02%	1	-	8	1,14	0,02%
Industri Lainnya	22	7,10	0,01%	0	-	22	7,10	0,01%
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik	2	4,46	0,01%	1	-	3	4,40	0,01%
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	4	-	0,00%	0	-	4	-	0,00%
Industri Kertas dan Percetakan	1	-	0,00%	0	-	1	-	0,00%
Industri Mineral Non Logam	23	-	0,00%	1	-	24	-	0,00%

KETERANGAN :

**PROYEK TERBANYAK
PADA TW IV**

**IVESTASI TERBESAR
PADA TW IV**



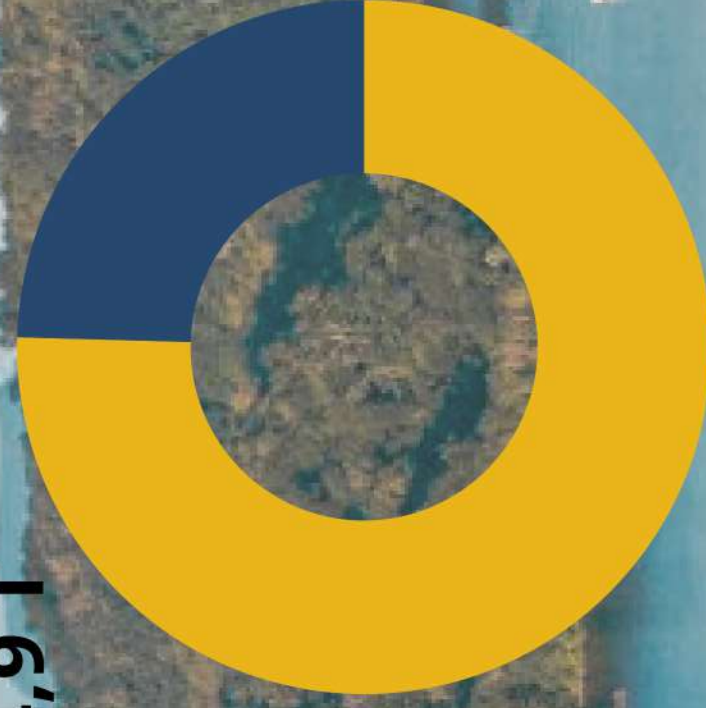
REALISASI INVESTASI 2023 JANUARI S/D DESEMBER



SOROTAN REALISASI INVESTASI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023 JANUARI S/D DESEMBER

**PMDN
14,9 T**

**PMA
4,8 T**



**TOTAL REALISASI INVESTASI
19,7 T**

**PMDN
6.697 PROYEK**

**PMA
836
PROYEK**



**TOTAL JUMLAH PROYEK
7.533**

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

PMDN			
No	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	95.202,1	68.704
2	Jawa Barat	88.012,9	35.758
3	Jawa Timur	74.937,4	28.484
4	Kalimantan Timur	52.171,7	7.571
5	Riau	48.243,3	5.548
6	Banten	37.971,7	16.488
7	Jawa Tengah	32.987,2	17.460
8	Nusa Tenggara Barat	30.766,2	2.543
9	Sumatera Selatan	25.602,4	5.667
10	Sumatera Utara	21.574,0	8.253
11	Kalimantan Selatan	14.909,4	6.697
12	Kalimantan Barat	14.892,0	3.956
13	Sulawesi Selatan	11.468,3	8.070
14	Jambi	8.939,0	2.870
15	Aceh	8.883,3	7.171
16	Kepulauan Riau	8.856,6	5.353
17	Kalimantan Tengah	8.779,5	2.404
18	Kalimantan Utara	8.199,1	839
19	Kepulauan Bangka Belitung	7.961,4	1.770
20	Sulawesi Tenggara	7.734,6	2.166
21	Sulawesi Utara	7.698,2	2.744
22	Lampung	7.625,8	2.825
23	Bengkulu	7.218,7	1.503
24	Bali	6.950,8	5.787
25	Maluku Utara	6.901,0	1.495
26	Daerah Istimewa Yogyakarta	5.015,5	3.906
27	Sulawesi Tengah	4.772,5	2.145
28	Sumatera Barat	4.488,2	2.334
29	Gorontalo	3.960,1	996
30	Nusa Tenggara Timur	3.407,2	2.350
31	Sulawesi Barat	2.011,1	880
32	Maluku	1.904,5	1.421
33	Papua Barat Daya	1.708,7	1.121
34	Papua Barat	1.261,9	730
35	Papua	1.174,1	971
36	Papua Tengah	458,8	507
37	Papua Selatan	152,5	346
38	Papua Pegunungan	121,8	133
TOTAL		674.923,4	266.722

POSISI REALISASI INVESTASI KALSEL SECARA NASIONAL

PMA			
No	Lokasi	Investasi (US\$. Juta)	Proyek
1	Jawa Barat	8.283,7	10.512
2	Sulawesi Tengah	7.244,1	397
3	Maluku Utara	4.998,2	224
4	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	4.830,0	20.028
5	Jawa Timur	4.741,0	3.913
6	Banten	4.451,6	4.775
7	Riau	2.042,3	600
8	Jawa Tengah	1.563,7	3.021
9	Sumatera Selatan	1.478,6	456
10	Kalimantan Timur	1.332,7	822
11	Kalimantan Utara	1.272,1	135
12	Sumatera Utara	1.181,3	1.253
13	Papua Tengah	968,0	37
14	Bali	808,5	16.282
15	Kepulauan Riau	764,1	1.753
16	Kalimantan Tengah	697,6	403
17	Kalimantan Barat	490,5	498
18	Nusa Tenggara Barat	468,4	1.571
19	Sulawesi Tenggara	448,3	207
20	Sulawesi Selatan	336,7	515
21	Kalimantan Selatan	327,9	836
22	Aceh	248,6	210
23	Lampung	220,6	372
24	Sulawesi Utara	203,7	277
25	Nusa Tenggara Timur	124,3	466
26	Sumatera Barat	120,7	308
27	Maluku	106,3	63
28	Papua Barat Daya	93,0	65
29	Papua Selatan	86,3	66
30	Bengkulu	76,1	101
31	Kepulauan Bangka Belitung	72,5	207
32	Daerah Istimewa Yogyakarta	460	531
33	Jambi	45,1	251
34	Gorontalo	33,8	57
35	Papua Barat	28,8	47
36	Sulawesi Barat	24,3	45
37	Papua	8,3	73
TOTAL		50.267,5	70.898

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

REALISASI INVESTASI KALSEL JANUARI – DESEMBER TAHUN 2023 BERDASARKAN LOKASI

KAB/ KOTA	PMDN		PMA		PMDN + PMA	
	PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI (Rp. Juta)	PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI (Rp. Juta)	TOTAL PROYEK	TOTAL INVESTASI (Rp. Juta)
Kabupaten Tanah Bumbu	621	6.195,02	119	812,90	697	7.007,92
Kabupaten Kotabaru	287	719,24	16	2.129,55	388	2.848,79
Kabupaten Tabalong	806	1.819,24	153	500,35	847	2.319,59
Kota Banjarmasin	1523	1.749,26	41	186,64	1642	1.935,90
Kabupaten Tanah Laut	321	987,21	73	504,97	500	1.492,18
Kabupaten Tapin	286	1.372,41	76	86,58	299	1.458,99
Kabupaten Banjar	891	985,35	179	229,59	1044	1.214,95
Kabupaten Barito Kuala	126	486,60	12	63,18	179	549,78
Kabupaten Balangan	586	183,89	13	287,32	602	471,22
Kota Banjar Baru	807	312,35	101	48,98	880	361,34
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	218	550,59	53	2,77	230	57,83
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	83	31,18	0	-	83	31,18
Kabupaten Hulu Sungai Utara	142	12,51	0	-	142	12,51
TOTAL	6697	15.404,85	836	4.852,83	7533	19.762,18

INVESTASI TERBESAR

PROYEK TERBANYAK

5 TERBESAR BERDASARKAN LOKASI REALISASI TRIWULAN IV 2023



KABUPATEN TANAH BUMBU
6,19 T



KABUPATEN TABALONG
1,81 T



KOTA BANJARMASIN
1,74 T



KABUPATEN TAPIN
1,37 T



KABUPATEN TANAH LAUT
9,87 M



KABUPATEN KOTABARU
2,1 T



KABUPATEN TANAH BUMBU
8,12 M



KABUPATEN TANAH LAUT
3,41 M



KABUPATEN TABALONG
3,38 M



KABUPATEN BALANGAN
1,94 M

P M D M P M A

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

REALISASI INVESTASI KALSEL TAHUN 2023 BERDASARKAN SEKTOR

No	SEKTOR	PMDN		PMA		PMDN + PMA	
		Proyek	Tambahan Investasi (Rp. Juta)	Proyek	Tambahan Investasi (Rp.)	Proyek	Tambahan Investasi (Rp. Juta)
1	Pertambangan	547	9.465.221,6	172	2.261.839,9	719	11.727.061,5
2	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	260	925.624,0	62	646.264,2	322	1.571.888,2
3	Transportasi, Gudang dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	659	1.208.620,9	59	174.771,6	718	1.383.392,5
4	Industri Makanan	19	18.290,9	23	1.207.818,9	42	1.226.109,8
5	Perdagangan dan Reparasi	197	683.043,9	65	287.118,3	262	970.162,2
6	Hotel dan Restoran	1957	878.025,6	213	58.467,4	2170	936.493,0
7	Jasa Lainnya	328	542.208,1	36	20.671,2	364	562.879,3
8	Industri Kayu	783	334.918,6	75	57.542,4	858	392.461,0
9	Konstruksi	58	262.689,6	38	19.928,2	96	282.617,8
10	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	1172	205.437,3	8	25.830,4	1180	231.267,7
11	Industri Kimia Dan Farmasi	215	206.178,9	11	15.284,0	226	221.462,9
12	Listrik, Gas dan Air	63	115.508,4	22	35.509,6	85	151.018,0
13	Industri Lainnya	166	20.305,4	24	30.181,6	190	50.487,0
14	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	52	6.652,7	2	8.998,4	54	15.651,1
15	Kehutanan	10	9.717,1	3	2.449,4	13	12.166,5
16	Perikanan	64	10.722,2	14	-	78	10.722,2
17	Industri Mineral Non Logam	36	7.403,4	1	75,5	37	7.478,9
18	Industri Karet dan Plastik	52	5.109,1	2	-	54	5.109,1
19	Industri Kertas dan Percetakan	37	3.679,3	6	136,2	43	3.815,5
20	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	4	1,0	0	-	4	1,0
21	Industri Tekstil	16	-	0	-	16	-
22	TOTAL	6.697	14.909.358,0	836	4.852.887,1	7.533	19.762.245,1

INVESTASI TERBESAR

PROYEK TERBANYAK

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

PERSENTASE NILAI REALISASI INVESTASI KALSEL TAHUN 2023 BERDASARKAN SEKTOR



<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

NILAI DAN PERSENTASE REALISASI INVESTASI KALSEL TAHUN 2023 BERDASARKAN NEGARA

NO	NEGARA	PROYEK	TAMBAHAN INVESTASI (USD RIBU)	TAMBAHAN INVESTASI (Rp. Juta)
1	Hongkong, RRT	100	118.232,0	1.749.832,9
2	Singapura	336	79.413,5	1.175.319,3
3	Kepulauan Virgin Inggris	38	34.640,5	512.679,4
4	Malaysia	38	31.254,4	462.564,8
5	Thailand	19	30.908,5	457.445,7
6	Australia	25	15.881,7	235.049,0
7	India	24	6.585,8	97.469,8
8	R.R. Tiongkok	115	6.494,0	96.111,1
9	Korea Selatan	32	2.091,9	30.960,1
10	Jepang	50	1.131,6	16.747,7
11	Inggris	13	763,2	11.295,4
12	Perancis	3	361,4	5.348,7
13	Amerika Serikat	10	98,6	1.459,3
14	Belanda	6	35,4	523,9
15	Swiss	12	2,8	41,4
16	Kepulauan Cayman	4	1,9	28,1
17	Uni Emirat Arab	3	0,7	10,4
18	Luxembourg	4	-	-
19	Philipina	2	-	-
20	Rusia	2	-	-
TOTAL			836	4.852.887,1



HONGKONG RRT MENJADI NEGARA DENGAN TAMBAHAN REALISASI INVESTASI TERBESAR DI KALSEL



SINGAPURA MENJADI NEGARA DENGAN PROYEK TERBANYAK DI KALSEL

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

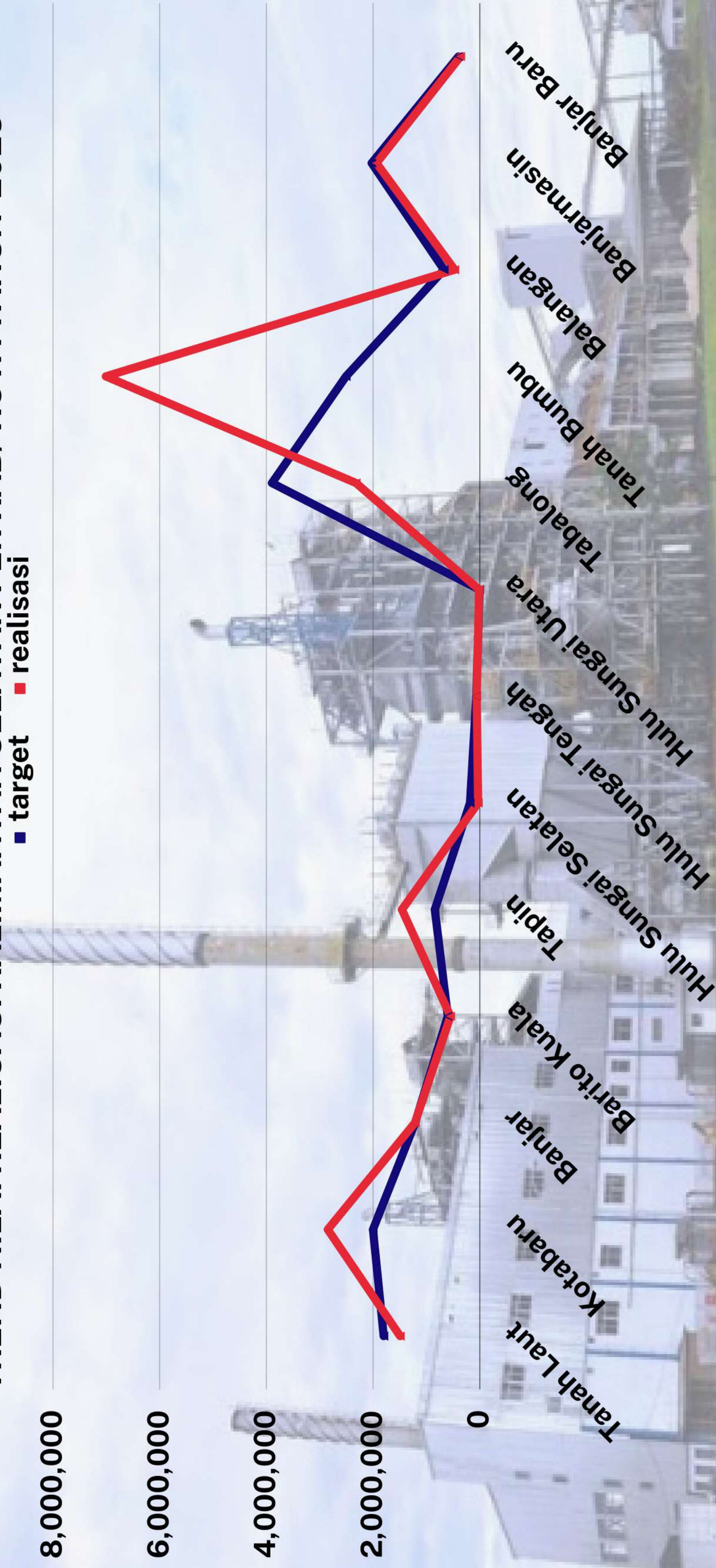
TREND NILAI REALISASI KALIMANTAN SELATAN

Tambahan Investasi (Rp. Milyar)												
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tanah Laut	684,58	2.353,64	459,97	280,27	183,52	446,72	633,76	662,41	1.614,76	773,62	1.588,80	1.492,18
Kotabaru	1.014,42	969,45	3.468,30	634,96	5.768,26	2.157,03	1.946,32	858,85	543,78	1.635,45	2.236,75	2.848,79
Banjar	349,26	461,01	33,69	1.514,09	352,03	199,53	202,58	816,44	577	1.658,09	438,91	1.214,95
Barito Kuala	-	49,73	1,56	498,24	36,83	284,81	33,53	331,5	295,8	428,29	600,31	549,78
Tapin	181,08	577,37	493,33	1.465,35	162,69	131,77	347,69	2.075,05	169,05	912,18	779,28	1.458,99
Hulu Sungai Selatan	-	-	-	-	-	-	-	1.406,08	119,08	86,12	198,01	31,18
Hulu Sungai Tengah	-	1,32	-	-	24,34	-	-	15,68	33,08	60,3	49,2	57,83
Hulu Sungai Utara	0,99	-	-	-	-	-	-	209,3	65	5,99	3,66	12,51
Tabalong	3.683,92	5.483,19	216,47	5.442,03	2.062,58	2.407,46	4.264,63	2.511,68	1.810,61	3.579,08	3.204,18	2.319,59
Tanah Bumbu	279,03	827,6	1.911,33	222,57	136,13	154,36	2.737,57	1.792,45	1.002,64	1.493,94	3.036,39	7.007,92
Balangan	2	-	672,32	206,6	767,77	85,23	697,89	342,49	962,02	115,12	403,6	471,22
Banjarmasin	13,22	169,45	367,3	1.385,67	63,76	356,68	761,97	4.516,03	539,06	1.820,53	2.111,04	1.935,90
Banjar Baru	24,21	12,66	17,1	22,63	72,45	25,39	79,88	117,14	88,71	146,75	645,93	361,34
Kalimantan Selatan	6.232,70	10.905,42	7.641,37	11.672,42	9.630,34	6.248,99	11.705,81	15.655,17	7.756,30	12.715,50	15.296,11	19.762,24

Target RPJMD/Tahun	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kalimantan Selatan	1.521,93	1.628,46	1.742,45	5.400,00	7.100,00	8.100,00	9.200,00	10.500,00	12.000,00	10.800,00	11.660,00	16.210,00

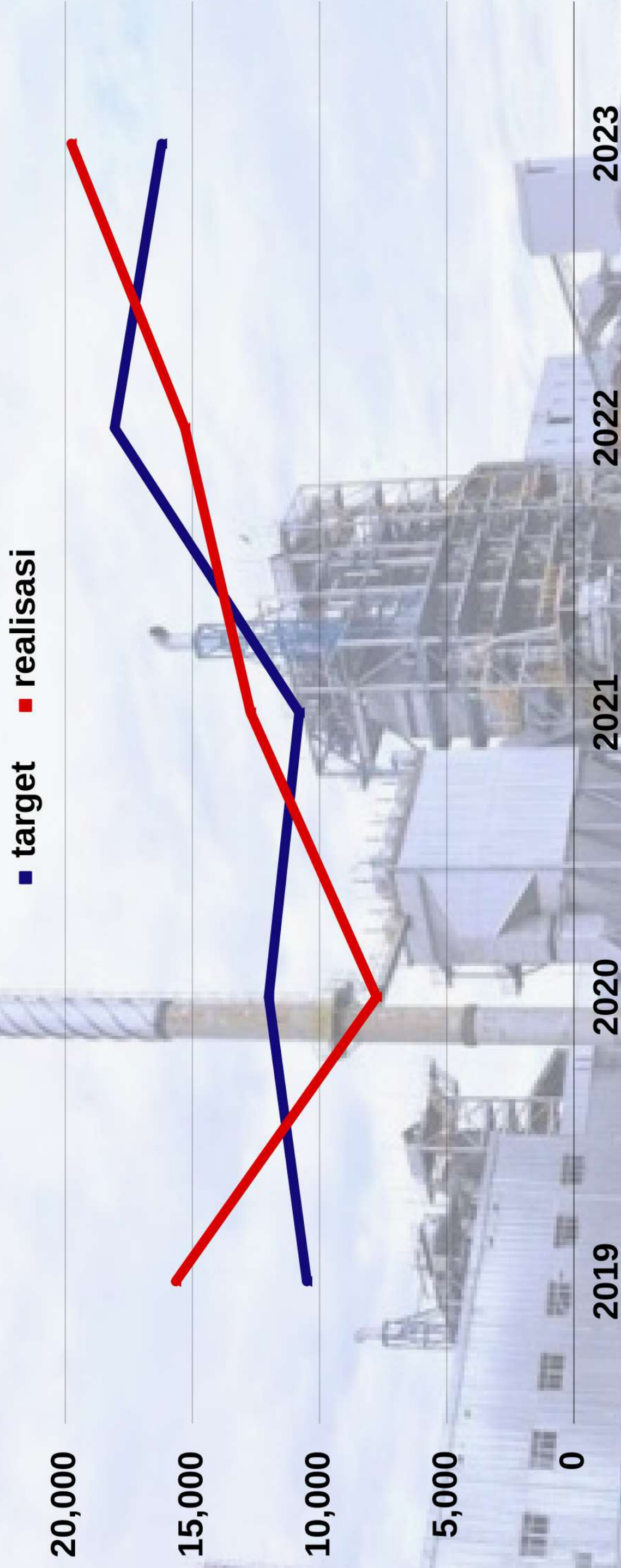
<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

TREND NILAI REALISASI KALIMANTAN SELATAN PER KAB/ KOTA TAHUN 2023



<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

TREND NILAI REALISASI KALIMANTAN SELATAN 2019 S/D 2023





REALISASI INVESTASI UMK 2023



<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

SOROTAN REALISASI INVESTASI UMK KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2023

**MIKRO
3,14 T**



**KECIL
2,23 T**

**TOTAL REALISASI INVESTASI
5,38 T**

**KECIL
8489 PROYEK**



**MIKRO
53636 PROYEK**

**TOTAL JUMLAH PROYEK
62.125**

<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/pressreleaseTWIV2023>

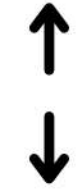
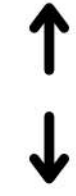
POSISI REALISASI INVESTASI UMK DIKALSEL SECARA NASIONAL

MIKRO

No	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek
1	Jawa Barat	25.151,3	615.556
2	Jawa Timur	18.959,9	498.868
3	DKI Jakarta	17.869,9	321.770
4	Jawa Tengah	12.938,1	370.894
5	Banten	8.319,1	155.905
6	Sulawesi Selatan	6.315,8	114.504
7	Bali	6.217,5	90.012
8	Sumatera Utara	5.229,3	112.389
9	Riau	4.672,6	72.502
10	Sumatera Barat	3.647,5	84.940
11	Sumatera Selatan	3.555,0	61.680
12	Kalimantan Timur	3.426,6	60.093
13	Lampung	3.356,7	113.578
14	Kalimantan Selatan	3.147,5	53.636
15	Nusa Tenggara Barat	2.910,4	55.370
16	Kalimantan Barat	2.857,3	45.893
17	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.767,8	69.003
18	Aceh	2.475,5	47.979
19	Kalimantan Tengah	2.205,5	44.312
20	Sulawesi Tenggara	2.103,6	41.726
21	Kepulauan Riau	2.050,8	41.419
22	Jambi	1.940,0	43.839
23	Sulawesi Tengah	1.935,9	29.499
24	Nusa Tenggara Timur	1.450,2	28.959
25	Sulawesi Utara	1.348,3	19.744
26	Kepulauan Bangka Belitung	1.165,1	21.668
27	Bengkulu	1.092,5	19.064
28	Maluku Utara	827,8	13.038
29	Sulawesi Barat	816,8	24.929
30	Kalimantan Utara	736,1	12.896
31	Papua	717,0	9.161
32	Maluku	700,6	15.991
33	Gorontalo	574,5	12.853
34	Papua Tengah	501,5	4.461
35	Papua Barat	464,1	6.217
36	Papua Barat Daya	271,3	4.969
37	Papua Selatan	215,9	3.625
38	Papua Pegunungan	199,7	2.441
TOTAL		155.134,8	3.345.383

KECIL

No	Lokasi	Investasi (Rp. Miliar)	Proyek
1	Jawa Barat	22.995,4	85.561
2	DKI Jakarta	20.339,4	70.801
3	Jawa Timur	13.113,7	41.658
4	Banten	8.665,4	34.321
5	Jawa Tengah	7.923,9	22.264
6	Sumatera Utara	4.107,5	22.113
7	Kalimantan Timur	3.966,1	18.256
8	Sulawesi Selatan	3.860,3	13.931
9	Bali	3.848,3	6.745
10	Sumatera Selatan	2.434,4	8.610
11	Kepulauan Riau	2.298,5	8.014
12	Riau	2.291,2	8.586
13	Kalimantan Selatan	2.234,1	8.489
14	Nusa Tenggara Barat	1.997,2	5.713
15	Daerah Istimewa Yogyakarta	1.894,0	6.120
16	Kalimantan Barat	1.889,9	5.376
17	Lampung	1.850,6	5.568
18	Sumatera Barat	1.826,0	4.755
19	Sulawesi Tengah	1.632,5	6.755
20	Sulawesi Tenggara	1.509,6	5.182
21	Aceh	1.357,3	4.948
22	Kalimantan Tengah	1.147,9	3.977
23	Sulawesi Utara	1.122,2	2.956
24	Nusa Tenggara Timur	1.072,4	3.274
25	Jambi	1.035,1	3.506
26	Papua	753,0	2.290
27	Kepulauan Bangka Belitung	676,1	1.718
28	Papua Pegunungan	663,9	1.181
29	Papua Barat	606,4	1.229
30	Maluku Utara	558,3	1.941
31	Kalimantan Utara	545,9	1.749
32	Bengkulu	525,2	1.281
33	Gorontalo	480,1	1.722
34	Papua Tengah	408,0	1.141
35	Maluku	403,5	1.164
36	Papua Selatan	355,7	1.244
37	Papua Barat Daya	323,4	809
38	Sulawesi Barat	298,9	1.209
TOTAL		123.011,3	426.157



<https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/>



Kalantan





OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 418 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia telah melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Ombudsman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
5. Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 399 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini.

KEDUA : Hasil Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

- a. Nilai kepatuhan;
- b. Zona kepatuhan;
- c. Kategori; dan

d. Opini.

KETIGA : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Desember 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



MOKHAMMAD NAJIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 418 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2023

HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2023

A. Kementerian

No	Kementerian	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Kementerian Luar Negeri	94,85	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	92,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Kementerian Pertanian	91,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Kementerian Dalam Negeri	90,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	89,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	89,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	88,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	86,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9.	Kementerian Perindustrian	85,92	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10.	Kementerian Kesehatan	85,73	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11.	Kementerian Agama	85,29	Hijau	B	Kualitas Tinggi
12.	Kementerian Investasi/BKPM	85,21	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kementerian	Nilai	Zona	Kategori	Opini
13.	Kementerian Keuangan	84,40	Hijau	B	Kualitas Tinggi
14.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	83,81	Hijau	B	Kualitas Tinggi
15.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	83,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
16.	Kementerian Perhubungan	82,21	Hijau	B	Kualitas Tinggi
17.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang	81,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
18.	Kementerian Perdagangan	80,47	Hijau	B	Kualitas Tinggi
19.	Kementerian Ketenagakerjaan	79,39	Hijau	B	Kualitas Tinggi
20.	Kementerian Sosial	78,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi
21.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	77,51	Kuning	C	Kualitas Sedang
22.	Kementerian Sekretariat Negara	74,51	Kuning	C	Kualitas Sedang
23.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	71,32	Kuning	C	Kualitas Sedang
24.	Kementerian Pertahanan	68,44	Kuning	C	Kualitas Sedang
25.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	55,55	Kuning	C	Kualitas Sedang

B. Lembaga

No	Lembaga	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	94,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Lembaga Sensor Film	92,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Badan Pusat Statistik	91,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Ombudsman Republik Indonesia	89,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Lembaga	Nilai	Zona	Kategori	Opini
5.	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	87,29	Hijau	B	Kualitas Tinggi
6.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	86,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
7.	Perpustakaan Nasional Indonesia	85,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi
8.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	84,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi
9.	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	83,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
10.	Badan Narkotika Nasional	78,42	Hijau	B	Kualitas Tinggi
11.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	77,27	Kuning	C	Kualitas Sedang
12.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	75,63	Kuning	C	Kualitas Sedang
13.	Badan Amil Zakat Nasional	73,86	Kuning	C	Kualitas Sedang
14.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	69,87	Kuning	C	Kualitas Sedang
15.	Konsil Kedokteran Indonesia	68,96	Kuning	C	Kualitas Sedang

C. Pemerintah Provinsi

No	Provinsi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	97,18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	96,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Pemerintah Provinsi Bali	96,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	94,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta	94,18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	92,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Provinsi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
7.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	91,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Pemerintah Provinsi Banten	91,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	91,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	90,3	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	89,6	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	89,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	88,81	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Pemerintah Provinsi Jambi	88,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Pemerintah Provinsi Riau	88,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	87,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
17.	Pemerintah Provinsi Bengkulu	87,05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
18.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	86,74	Hijau	B	Kualitas Tinggi
19.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	86,6	Hijau	B	Kualitas Tinggi
20.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	85,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
21.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	85,25	Hijau	B	Kualitas Tinggi
22.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	84,51	Hijau	B	Kualitas Tinggi
23.	Pemerintah Provinsi Gorontalo	83,36	Hijau	B	Kualitas Tinggi
24.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	81,37	Hijau	B	Kualitas Tinggi
25.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	81,12	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Provinsi	Nilai	Zona	Kategori	Opini
26.	Pemerintah Provinsi Aceh	80,67	Hijau	B	Kualitas Tinggi
27.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	73,38	Kuning	C	Kualitas Sedang
28.	Pemerintah Provinsi Lampung	65,58	Kuning	C	Kualitas Sedang
29.	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	63,92	Kuning	C	Kualitas Sedang
30.	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	56,48	Kuning	C	Kualitas Sedang
31.	Pemerintah Provinsi Papua Barat	55,36	Kuning	C	Kualitas Sedang
32.	Pemerintah Provinsi Maluku	54,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
33.	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	52,77	Merah	D	Kualitas Rendah
34.	Pemerintah Provinsi Papua	41,68	Merah	D	Kualitas Rendah

D. Pemerintah Kota

No	Kota	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Pemerintah Kota Magelang	98,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Pemerintah Kota Denpasar	97,99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Pemerintah Kota Depok	97,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Pemerintah Kota Surabaya	97,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Pemerintah Kota Pekalongan	97,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Pemerintah Kota Bitung	97,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Pemerintah Kota Surakarta	96,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Pemerintah Kota Cirebon	96,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Pemerintah Kota Yogyakarta	96,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Pemerintah Kota Salatiga	95,78	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11.	Pemerintah Kota Cimahi	95,27	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Pemerintah Kota Bogor	95,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kota	Nilai	Zona	Kategori	Opini
14.	Pemerintah Kota Palembang	93,75	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Pemerintah Kota Madiun	93,59	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Pemerintah Kota Sukabumi	93,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Pemerintah Kota Pasuruan	93,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Pemerintah Kota Tangerang	93,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Pemerintah Kota Samarinda	93,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
20.	Pemerintah Kota Tomohon	92,93	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pemerintah Kota Tegal	92,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22.	Pemerintah Kota Jakarta Pusat	92,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23.	Pemerintah Kota Ternate	92,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24.	Pemerintah Kota Jakarta Utara	92,38	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25.	Pemerintah Kota Banjarbaru	92,00	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26.	Pemerintah Kota Pekanbaru	91,95	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27.	Pemerintah Kota Banjar	91,93	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28.	Pemerintah Kota Jakarta Selatan	91,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29.	Pemerintah Kota Bekasi	91,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30.	Pemerintah Kota Bandung	91,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31.	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	91,70	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32.	Pemerintah Kota Payakumbuh	91,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33.	Pemerintah Kota Pontianak	91,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34.	Pemerintah Kota Padang Panjang	90,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35.	Pemerintah Kota Binjai	90,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36.	Pemerintah Kota Pariaman	90,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37.	Pemerintah Kota Tarakan	90,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38.	Pemerintah Kota Tasikmalaya	90,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
39.	Pemerintah Kota Balikpapan	90,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40.	Pemerintah Kota Jakarta Barat	89,50	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41.	Pemerintah Kota Batam	89,47	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kota	Nilai	Zona	Kategori	Opini
42.	Pemerintah Kota Cilegon	89,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Pemerintah Kota Ambon	89,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Pemerintah Kota Serang	88,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Pemerintah Kota Dumai	88,83	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Pemerintah Kota Mojokerto	88,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48.	Pemerintah Kota Bontang	88,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Pemerintah Kota Blitar	88,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
50.	Pemerintah Kota Tanjung Pinang	88,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51.	Pemerintah Kota Banjarmasin	88,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52.	Pemerintah Kota Palangka Raya	87,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
53.	Pemerintah Kota Singkawang	87,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
54.	Pemerintah Kota Semarang	87,34	Hijau	B	Kualitas Tinggi
55.	Pemerintah Kota Manado	86,24	Hijau	B	Kualitas Tinggi
56.	Pemerintah Kota Lubuklinggau	86,21	Hijau	B	Kualitas Tinggi
57.	Pemerintah Kota Palu	86,07	Hijau	B	Kualitas Tinggi
58.	Pemerintah Kota Bima	85,90	Hijau	B	Kualitas Tinggi
59.	Pemerintah Kota Lhokseumawe	85,69	Hijau	B	Kualitas Tinggi
60.	Pemerintah Kota Gunungsitoli	85,43	Hijau	B	Kualitas Tinggi
61.	Pemerintah Kota Makassar	85,40	Hijau	B	Kualitas Tinggi
62.	Pemerintah Kota Jambi	85,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
63.	Pemerintah Kota Subulussalam	84,94	Hijau	B	Kualitas Tinggi
64.	Pemerintah Kota Solok	84,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
65.	Pemerintah Kota Jakarta Timur	84,82	Hijau	B	Kualitas Tinggi
66.	Pemerintah Kota Bukittinggi	84,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
67.	Pemerintah Kota Tanjung Balai	84,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
68.	Pemerintah Kota Parepare	84,46	Hijau	B	Kualitas Tinggi
69.	Pemerintah Kota Bengkulu	84,20	Hijau	B	Kualitas Tinggi
70.	Pemerintah Kota Prabumulih	83,54	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kota	Nilai	Zona	Kategori	Opini
71.	Pemerintah Kota Banda Aceh	83,45	Hijau	B	Kualitas Tinggi
72.	Pemerintah Kota Sabang	83,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
73.	Pemerintah Kota Sorong	83,18	Hijau	B	Kualitas Tinggi
74.	Pemerintah Kota Mataram	82,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
75.	Pemerintah Kota Probolinggo	82,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
76.	Pemerintah Kota Sawahlunto	82,76	Hijau	B	Kualitas Tinggi
77.	Pemerintah Kota Kotamobagu	82,67	Hijau	B	Kualitas Tinggi
78.	Pemerintah Kota Padang	82,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi
79.	Pemerintah Kota Malang	82,39	Hijau	B	Kualitas Tinggi
80.	Pemerintah Kota Pematangsiantar	81,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
81.	Pemerintah Kota Metro	80,85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
82.	Pemerintah Kota Langsa	80,69	Hijau	B	Kualitas Tinggi
83.	Pemerintah Kota Kediri	80,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
84.	Pemerintah Kota Padangsidimpuan	79,71	Hijau	B	Kualitas Tinggi
85.	Pemerintah Kota Batu	79,19	Hijau	B	Kualitas Tinggi
86.	Pemerintah Kota Jayapura	78,94	Hijau	B	Kualitas Tinggi
87.	Pemerintah Kota Gorontalo	78,24	Hijau	B	Kualitas Tinggi
88.	Pemerintah Kota Pagar Alam	76,74	Kuning	C	Kualitas Sedang
89.	Pemerintah Kota Medan	76,65	Kuning	C	Kualitas Sedang
90.	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	76,60	Kuning	C	Kualitas Sedang
91.	Pemerintah Kota Sibolga	74,74	Kuning	C	Kualitas Sedang
92.	Pemerintah Kota Sungai Penuh	73,85	Kuning	C	Kualitas Sedang
93.	Pemerintah Kota Kupang	72,94	Kuning	C	Kualitas Sedang
94.	Pemerintah Kota Palopo	72,12	Kuning	C	Kualitas Sedang
95.	Pemerintah Kota Bandar Lampung	68,42	Kuning	C	Kualitas Sedang
96.	Pemerintah Kota Tual	67,26	Kuning	C	Kualitas Sedang
97.	Pemerintah Kota Kendari	64,14	Kuning	C	Kualitas Sedang
98.	Pemerintah Kota Baubau	57,95	Kuning	C	Kualitas Sedang

E. HASIL PENILAIAN PEMERINTAH KABUPATEN

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
1.	Pemerintah Kabupaten Tuban	97,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
2.	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	97,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
3.	Pemerintah Kabupaten Nganjuk	97,29	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
4.	Pemerintah Kabupaten Jember	97,23	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
5.	Pemerintah Kabupaten Badung	97,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
6.	Pemerintah Kabupaten Bangka	97,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
7.	Pemerintah Kabupaten Banyumas	96,98	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
8.	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	96,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
9.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	96,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
10.	Pemerintah Kabupaten Cilacap	96,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
11.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	96,38	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
12.	Pemerintah Kabupaten Semarang	96,34	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
13.	Pemerintah Kabupaten Bandung	96,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
14.	Pemerintah Kabupaten Bogor	96,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
15.	Pemerintah Kabupaten Bangli	96,13	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
16.	Pemerintah Kabupaten Kudus	96,11	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
17.	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	95,95	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
18.	Pemerintah Kabupaten Kaur	95,94	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
19.	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	95,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
20.	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	95,91	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
21.	Pemerintah Kabupaten Grobogan	95,86	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
22.	Pemerintah Kabupaten Kendal	95,79	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
23.	Pemerintah Kabupaten Bantul	95,56	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
24.	Pemerintah Kabupaten Tulungagung	95,40	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
25.	Pemerintah Kabupaten Cianjur	95,39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
26.	Pemerintah Kabupaten Ciamis	95,32	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
27.	Pemerintah Kabupaten Pematang	95,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
28.	Pemerintah Kabupaten Solok	95,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
29.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	95,07	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
30.	Pemerintah Kabupaten Garut	95,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
31.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	95,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
32.	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	94,95	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
33.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	94,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
34.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	94,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
35.	Pemerintah Kabupaten Lumajang	94,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
36.	Pemerintah Kabupaten Bulungan	94,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
37.	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	94,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
38.	Pemerintah Kabupaten Purworejo	94,41	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
39.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	94,39	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
40.	Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	94,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
41.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	94,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
42.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	94,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
43.	Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	93,77	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
44.	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	93,73	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
45.	Pemerintah Kabupaten Tangerang	93,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
46.	Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	93,71	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
47.	Pemerintah Kabupaten Purbalingga	93,70	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
48.	Pemerintah Kabupaten Sleman	93,54	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
49.	Pemerintah Kabupaten Demak	93,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
50.	Pemerintah Kabupaten Klaten	93,46	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
51.	Pemerintah Kabupaten Sampang	93,29	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
52.	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	93,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
53.	Pemerintah Kabupaten Rembang	93,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
54.	Pemerintah Kabupaten Blora	92,69	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
55.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	92,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
56.	Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	92,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
57.	Pemerintah Kabupaten Agam	92,58	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
58.	Pemerintah Kabupaten Simalungun	92,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
59.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	92,49	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
60.	Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	92,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
61.	Pemerintah Kabupaten Subang	92,37	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
62.	Pemerintah Kabupaten Sumedang	92,35	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
63.	Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	92,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
64.	Pemerintah Kabupaten Pinrang	92,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
65.	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	92,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
66.	Pemerintah Kabupaten Bintan	92,22	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
67.	Pemerintah Kabupaten Batu Bara	92,19	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
68.	Pemerintah Kabupaten Lebong	92,00	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
69.	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	91,72	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
70.	Pemerintah Kabupaten Kebumen	91,66	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
71.	Pemerintah Kabupaten Majalengka	91,64	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
72.	Pemerintah Kabupaten Batang	91,50	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
73.	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	91,45	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
74.	Pemerintah Kabupaten Langkat	91,40	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
75.	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	91,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
76.	Pemerintah Kabupaten Lamongan	91,20	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
77.	Pemerintah Kabupaten Trenggalek	91,06	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
78.	Pemerintah Kabupaten Madiun	91,00	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
79.	Pemerintah Kabupaten Banjar	90,96	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
80.	Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	90,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
81.	Pemerintah Kabupaten Jepara	90,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
82.	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara	90,67	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
83.	Pemerintah Kabupaten Boyolali	90,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
84.	Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	90,61	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
85.	Pemerintah Kabupaten Natuna	90,57	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
86.	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	90,52	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
87.	Pemerintah Kabupaten Ngawi	90,43	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
88.	Pemerintah Kabupaten Pasaman	90,42	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
89.	Pemerintah Kabupaten Kampar	90,33	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
90.	Pemerintah Kabupaten Tapin	90,25	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
91.	Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	90,24	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
92.	Pemerintah Kabupaten Tabalong	90,05	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
93.	Pemerintah Kabupaten Pacitan	90,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
94.	Pemerintah Kabupaten Mukomuko	90,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
95.	Pemerintah Kabupaten Brebes	90,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
96.	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	89,93	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
97.	Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	89,70	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
98.	Pemerintah Kabupaten Nias Utara	89,63	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
99.	Pemerintah Kabupaten Pasuruan	89,44	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
100.	Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	89,42	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
101.	Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	89,34	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
102.	Pemerintah Kabupaten Kuningan	89,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
103.	Pemerintah Kabupaten Serang	89,26	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
104.	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	89,21	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
105.	Pemerintah Kabupaten Lebak	89,17	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
106.	Pemerintah Kabupaten Tegal	89,16	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
107.	Pemerintah Kabupaten Kediri	89,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
108.	Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	88,99	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
109.	Pemerintah Kabupaten Malinau	88,87	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
110.	Pemerintah Kabupaten Belitung	88,87	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
111.	Pemerintah Kabupaten Dairi	88,87	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
112.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	88,87	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
113.	Pemerintah Kabupaten Tebo	88,85	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
114.	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	88,84	Hijau	A	Kualitas Tertinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
115.	Pemerintah Kabupaten Karo	88,76	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
116.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	88,68	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
117.	Pemerintah Kabupaten Sragen	88,65	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
118.	Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	88,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
119.	Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	88,62	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
120.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	88,56	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
121.	Pemerintah Kabupaten Bireuen	88,53	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
122.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim	88,51	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
123.	Pemerintah Kabupaten Pangandaran	88,28	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
124.	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	88,18	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
125.	Pemerintah Kabupaten Nias	88,15	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
126.	Pemerintah Kabupaten Pati	88,08	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
127.	Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	88,03	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
128.	Pemerintah Kabupaten Seluma	88,02	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
129.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	88,01	Hijau	A	Kualitas Tertinggi
130.	Pemerintah Kabupaten Temanggung	87,77	Hijau	B	Kualitas Tinggi
131.	Pemerintah Kabupaten Sukabumi	87,75	Hijau	B	Kualitas Tinggi
132.	Pemerintah Kabupaten Malang	87,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
133.	Pemerintah Kabupaten Gresik	87,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
134.	Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	87,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
135.	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	87,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
136.	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	87,44	Hijau	B	Kualitas Tinggi
137.	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	87,35	Hijau	B	Kualitas Tinggi
138.	Pemerintah Kabupaten Magelang	87,25	Hijau	B	Kualitas Tinggi
139.	Pemerintah Kabupaten Balangan	87,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
140.	Pemerintah Kabupaten Siak	87,20	Hijau	B	Kualitas Tinggi
141.	Pemerintah Kabupaten Nunukan	87,18	Hijau	B	Kualitas Tinggi
142.	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	87,14	Hijau	B	Kualitas Tinggi
143.	Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	87,14	Hijau	B	Kualitas Tinggi
144.	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara	87,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
145.	Pemerintah Kabupaten Mojokerto	87,05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
146.	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	86,99	Hijau	B	Kualitas Tinggi
147.	Pemerintah Kabupaten Asahan	86,95	Hijau	B	Kualitas Tinggi
148.	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	86,87	Hijau	B	Kualitas Tinggi
149.	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	86,80	Hijau	B	Kualitas Tinggi
150.	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	86,75	Hijau	B	Kualitas Tinggi
151.	Pemerintah Kabupaten Sanggau	86,73	Hijau	B	Kualitas Tinggi
152.	Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	86,72	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
153.	Pemerintah Kabupaten Bima	86,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
154.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	86,60	Hijau	B	Kualitas Tinggi
155.	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	86,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
156.	Pemerintah Kabupaten Boalemo	86,40	Hijau	B	Kualitas Tinggi
157.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	86,26	Hijau	B	Kualitas Tinggi
158.	Pemerintah Kabupaten Lingga	86,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
159.	Pemerintah Kabupaten Kaimana	86,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
160.	Pemerintah Kabupaten Ponorogo	86,20	Hijau	B	Kualitas Tinggi
161.	Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	86,18	Hijau	B	Kualitas Tinggi
162.	Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	86,15	Hijau	B	Kualitas Tinggi
163.	Pemerintah Kabupaten Karimun	86,04	Hijau	B	Kualitas Tinggi
164.	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	85,99	Hijau	B	Kualitas Tinggi
165.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	85,81	Hijau	B	Kualitas Tinggi
166.	Pemerintah Kabupaten Gowa	85,78	Hijau	B	Kualitas Tinggi
167.	Pemerintah Kabupaten Poso	85,67	Hijau	B	Kualitas Tinggi
168.	Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	85,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
169.	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	85,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
170.	Pemerintah Kabupaten Merangin	85,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
171.	Pemerintah Kabupaten Magetan	85,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
172.	Pemerintah Kabupaten Ketapang	85,54	Hijau	B	Kualitas Tinggi
173.	Pemerintah Kabupaten Manokwari	85,47	Hijau	B	Kualitas Tinggi
174.	Pemerintah Kabupaten Banyu Asin	85,40	Hijau	B	Kualitas Tinggi
175.	Pemerintah Kabupaten Indramayu	85,17	Hijau	B	Kualitas Tinggi
176.	Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	85,11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
177.	Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	85,10	Hijau	B	Kualitas Tinggi
178.	Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	85,09	Hijau	B	Kualitas Tinggi
179.	Pemerintah Kabupaten Karawang	84,96	Hijau	B	Kualitas Tinggi
180.	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	84,95	Hijau	B	Kualitas Tinggi
181.	Pemerintah Kabupaten Situbondo	84,89	Hijau	B	Kualitas Tinggi
182.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	84,88	Hijau	B	Kualitas Tinggi
183.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	84,85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
184.	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	84,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
185.	Pemerintah Kabupaten Pamekasan	84,62	Hijau	B	Kualitas Tinggi
186.	Pemerintah Kabupaten Sinjai	84,59	Hijau	B	Kualitas Tinggi
187.	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	84,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi
188.	Pemerintah Kabupaten Purwakarta	84,56	Hijau	B	Kualitas Tinggi
189.	Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	84,54	Hijau	B	Kualitas Tinggi
190.	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	84,51	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
191.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	84,47	Hijau	B	Kualitas Tinggi
192.	Pemerintah Kabupaten Bondowoso	84,44	Hijau	B	Kualitas Tinggi
193.	Pemerintah Kabupaten Cirebon	84,24	Hijau	B	Kualitas Tinggi
194.	Pemerintah Kabupaten Bungo	84,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
195.	Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	84,16	Hijau	B	Kualitas Tinggi
196.	Pemerintah Kabupaten Sintang	84,10	Hijau	B	Kualitas Tinggi
197.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	84,10	Hijau	B	Kualitas Tinggi
198.	Pemerintah Kabupaten Raja Ampat	84,00	Hijau	B	Kualitas Tinggi
199.	Pemerintah Kabupaten Pelalawan	83,95	Hijau	B	Kualitas Tinggi
200.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	83,86	Hijau	B	Kualitas Tinggi
201.	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	83,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi
202.	Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	83,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
203.	Pemerintah Kabupaten Majene	83,76	Hijau	B	Kualitas Tinggi
204.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu	83,67	Hijau	B	Kualitas Tinggi
205.	Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	83,32	Hijau	B	Kualitas Tinggi
206.	Pemerintah Kabupaten Bekasi	83,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
207.	Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	83,18	Hijau	B	Kualitas Tinggi
208.	Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	83,03	Hijau	B	Kualitas Tinggi
209.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	83,01	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
210.	Pemerintah Kabupaten Jeneponto	82,98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
211.	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	82,89	Hijau	B	Kualitas Tinggi
212.	Pemerintah Kabupaten Banggai	82,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
213.	Pemerintah Kabupaten Kapuas	82,72	Hijau	B	Kualitas Tinggi
214.	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	82,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
215.	Pemerintah Kabupaten Bone	82,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
216.	Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	82,35	Hijau	B	Kualitas Tinggi
217.	Pemerintah Kabupaten Sekadau	82,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
218.	Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	82,17	Hijau	B	Kualitas Tinggi
219.	Pemerintah Kabupaten Landak	82,11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
220.	Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	82,00	Hijau	B	Kualitas Tinggi
221.	Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	81,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi
222.	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	81,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi
223.	Pemerintah Kabupaten Bantaeng	81,79	Hijau	B	Kualitas Tinggi
224.	Pemerintah Kabupaten Fakfak	81,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
225.	Pemerintah Kabupaten Sorong	81,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
226.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	81,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
227.	Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	81,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
228.	Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	81,36	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
229.	Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	81,33	Hijau	B	Kualitas Tinggi
230.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	81,29	Hijau	B	Kualitas Tinggi
231.	Pemerintah Kabupaten Mempawah	81,28	Hijau	B	Kualitas Tinggi
232.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	81,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
233.	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	81,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
234.	Pemerintah Kabupaten Paser	81,22	Hijau	B	Kualitas Tinggi
235.	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	81,19	Hijau	B	Kualitas Tinggi
236.	Pemerintah Kabupaten Soppeng	81,08	Hijau	B	Kualitas Tinggi
237.	Pemerintah Kabupaten Jombang	81,02	Hijau	B	Kualitas Tinggi
238.	Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	80,93	Hijau	B	Kualitas Tinggi
239.	Pemerintah Kabupaten Sambas	80,93	Hijau	B	Kualitas Tinggi
240.	Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	80,86	Hijau	B	Kualitas Tinggi
241.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	80,78	Hijau	B	Kualitas Tinggi
242.	Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	80,68	Hijau	B	Kualitas Tinggi
243.	Pemerintah Kabupaten Pohuwato	80,66	Hijau	B	Kualitas Tinggi
244.	Pemerintah Kabupaten Samosir	80,65	Hijau	B	Kualitas Tinggi
245.	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	80,61	Hijau	B	Kualitas Tinggi
246.	Pemerintah Kabupaten Lahat	80,58	Hijau	B	Kualitas Tinggi
247.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	80,52	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
248.	Pemerintah Kabupaten Barru	80,41	Hijau	B	Kualitas Tinggi
249.	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	80,13	Hijau	B	Kualitas Tinggi
250.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	80,11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
251.	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	80,07	Hijau	B	Kualitas Tinggi
252.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa	80,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi
253.	Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	79,98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
254.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	79,98	Hijau	B	Kualitas Tinggi
255.	Pemerintah Kabupaten Sumenep	79,75	Hijau	B	Kualitas Tinggi
256.	Pemerintah Kabupaten Murung Raya	79,64	Hijau	B	Kualitas Tinggi
257.	Pemerintah Kabupaten Berau	79,57	Hijau	B	Kualitas Tinggi
258.	Pemerintah Kabupaten Lamandau	79,55	Hijau	B	Kualitas Tinggi
259.	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	79,53	Hijau	B	Kualitas Tinggi
260.	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	79,38	Hijau	B	Kualitas Tinggi
261.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	79,33	Hijau	B	Kualitas Tinggi
262.	Pemerintah Kabupaten Sarolangun	79,27	Hijau	B	Kualitas Tinggi
263.	Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	79,14	Hijau	B	Kualitas Tinggi
264.	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	79,14	Hijau	B	Kualitas Tinggi
265.	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	79,11	Hijau	B	Kualitas Tinggi
266.	Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	79,06	Hijau	B	Kualitas Tinggi

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
267.	Pemerintah Kabupaten Sukamara	78,85	Hijau	B	Kualitas Tinggi
268.	Pemerintah Kabupaten Sijunjung	78,78	Hijau	B	Kualitas Tinggi
269.	Pemerintah Kabupaten Luwu	78,63	Hijau	B	Kualitas Tinggi
270.	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	78,32	Hijau	B	Kualitas Tinggi
271.	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	78,23	Hijau	B	Kualitas Tinggi
272.	Pemerintah Kabupaten Gorontalo	78,05	Hijau	B	Kualitas Tinggi
273.	Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	77,97	Kuning	C	Kualitas Sedang
274.	Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	77,82	Kuning	C	Kualitas Sedang
275.	Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	77,82	Kuning	C	Kualitas Sedang
276.	Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	77,70	Kuning	C	Kualitas Sedang
277.	Pemerintah Kabupaten Takalar	77,59	Kuning	C	Kualitas Sedang
278.	Pemerintah Kabupaten Mamuju	77,43	Kuning	C	Kualitas Sedang
279.	Pemerintah Kabupaten Mamasa	77,40	Kuning	C	Kualitas Sedang
280.	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	77,26	Kuning	C	Kualitas Sedang
281.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	77,13	Kuning	C	Kualitas Sedang
282.	Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	76,63	Kuning	C	Kualitas Sedang
283.	Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	76,21	Kuning	C	Kualitas Sedang
284.	Pemerintah Kabupaten Minahasa	76,20	Kuning	C	Kualitas Sedang
285.	Pemerintah Kabupaten Kupang	76,04	Kuning	C	Kualitas Sedang

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
286.	Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	75,90	Kuning	C	Kualitas Sedang
287.	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	75,88	Kuning	C	Kualitas Sedang
288.	Pemerintah Kabupaten Seruyan	75,75	Kuning	C	Kualitas Sedang
289.	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	75,71	Kuning	C	Kualitas Sedang
290.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	75,63	Kuning	C	Kualitas Sedang
291.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	75,53	Kuning	C	Kualitas Sedang
292.	Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	75,50	Kuning	C	Kualitas Sedang
293.	Pemerintah Kabupaten Ende	75,46	Kuning	C	Kualitas Sedang
294.	Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	75,42	Kuning	C	Kualitas Sedang
295.	Pemerintah Kabupaten Maros	75,42	Kuning	C	Kualitas Sedang
296.	Pemerintah Kabupaten Kerinci	75,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
297.	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu	74,89	Kuning	C	Kualitas Sedang
298.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	74,88	Kuning	C	Kualitas Sedang
299.	Pemerintah Kabupaten Wajo	74,85	Kuning	C	Kualitas Sedang
300.	Pemerintah Kabupaten Kayong Utara	74,66	Kuning	C	Kualitas Sedang
301.	Pemerintah Kabupaten Belu	74,46	Kuning	C	Kualitas Sedang
302.	Pemerintah Kabupaten Katingan	74,27	Kuning	C	Kualitas Sedang
303.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	74,25	Kuning	C	Kualitas Sedang
304.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	73,56	Kuning	C	Kualitas Sedang

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
305.	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	73,22	Kuning	C	Kualitas Sedang
306.	Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	73,08	Kuning	C	Kualitas Sedang
307.	Pemerintah Kabupaten Blitar	73,05	Kuning	C	Kualitas Sedang
308.	Pemerintah Kabupaten Bangkalan	73,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
309.	Pemerintah Kabupaten Dompu	72,79	Kuning	C	Kualitas Sedang
310.	Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	72,63	Kuning	C	Kualitas Sedang
311.	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	72,24	Kuning	C	Kualitas Sedang
312.	Pemerintah Kabupaten Tanggamus	71,99	Kuning	C	Kualitas Sedang
313.	Pemerintah Kabupaten Nias Barat	71,71	Kuning	C	Kualitas Sedang
314.	Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	71,70	Kuning	C	Kualitas Sedang
315.	Pemerintah Kabupaten Kotabaru	71,67	Kuning	C	Kualitas Sedang
316.	Pemerintah Kabupaten Simeulue	71,61	Kuning	C	Kualitas Sedang
317.	Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	71,41	Kuning	C	Kualitas Sedang
318.	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	71,27	Kuning	C	Kualitas Sedang
319.	Pemerintah Kabupaten Pidie	71,09	Kuning	C	Kualitas Sedang
320.	Pemerintah Kabupaten Manggarai	70,99	Kuning	C	Kualitas Sedang
321.	Pemerintah Kabupaten Pasangkayu	70,88	Kuning	C	Kualitas Sedang
322.	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	70,85	Kuning	C	Kualitas Sedang
323.	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	70,67	Kuning	C	Kualitas Sedang

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
324.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	70,56	Kuning	C	Kualitas Sedang
325.	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	70,49	Kuning	C	Kualitas Sedang
326.	Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	69,97	Kuning	C	Kualitas Sedang
327.	Pemerintah Kabupaten Mesuji	69,83	Kuning	C	Kualitas Sedang
328.	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	69,46	Kuning	C	Kualitas Sedang
329.	Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu	68,30	Kuning	C	Kualitas Sedang
330.	Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	68,28	Kuning	C	Kualitas Sedang
331.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	67,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
332.	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	66,22	Kuning	C	Kualitas Sedang
333.	Pemerintah Kabupaten Mappi	66,15	Kuning	C	Kualitas Sedang
334.	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	65,75	Kuning	C	Kualitas Sedang
335.	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	65,73	Kuning	C	Kualitas Sedang
336.	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak	65,34	Kuning	C	Kualitas Sedang
337.	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	65,09	Kuning	C	Kualitas Sedang
338.	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	64,87	Kuning	C	Kualitas Sedang
339.	Pemerintah Kabupaten Kolaka	64,14	Kuning	C	Kualitas Sedang
340.	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	64,07	Kuning	C	Kualitas Sedang
341.	Pemerintah Kabupaten Enrekang	63,94	Kuning	C	Kualitas Sedang
342.	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	63,78	Kuning	C	Kualitas Sedang

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
343.	Pemerintah Kabupaten Alor	63,76	Kuning	C	Kualitas Sedang
344.	Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	63,73	Kuning	C	Kualitas Sedang
345.	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	63,41	Kuning	C	Kualitas Sedang
346.	Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	62,78	Kuning	C	Kualitas Sedang
347.	Pemerintah Kabupaten Melawi	62,72	Kuning	C	Kualitas Sedang
348.	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	62,27	Kuning	C	Kualitas Sedang
349.	Pemerintah Kabupaten Lembata	62,07	Kuning	C	Kualitas Sedang
350.	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	61,91	Kuning	C	Kualitas Sedang
351.	Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	61,28	Kuning	C	Kualitas Sedang
352.	Pemerintah Kabupaten Wakatobi	61,23	Kuning	C	Kualitas Sedang
353.	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	61,10	Kuning	C	Kualitas Sedang
354.	Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	61,07	Kuning	C	Kualitas Sedang
355.	Pemerintah Kabupaten Yahukimo	60,94	Kuning	C	Kualitas Sedang
356.	Pemerintah Kabupaten Morowali	60,90	Kuning	C	Kualitas Sedang
357.	Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	60,80	Kuning	C	Kualitas Sedang
358.	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	60,51	Kuning	C	Kualitas Sedang
359.	Pemerintah Kabupaten Buton Utara	60,28	Kuning	C	Kualitas Sedang
360.	Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	59,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
361.	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	59,54	Kuning	C	Kualitas Sedang

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
362.	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	59,50	Kuning	C	Kualitas Sedang
363.	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	59,03	Kuning	C	Kualitas Sedang
364.	Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	58,70	Kuning	C	Kualitas Sedang
365.	Pemerintah Kabupaten Sikka	58,69	Kuning	C	Kualitas Sedang
366.	Pemerintah Kabupaten Bombana	58,58	Kuning	C	Kualitas Sedang
367.	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	57,97	Kuning	C	Kualitas Sedang
368.	Pemerintah Kabupaten Buol	57,37	Kuning	C	Kualitas Sedang
369.	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	57,33	Kuning	C	Kualitas Sedang
370.	Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	57,31	Kuning	C	Kualitas Sedang
371.	Pemerintah Kabupaten Jayapura	56,18	Kuning	C	Kualitas Sedang
372.	Pemerintah Kabupaten Ngada	55,97	Kuning	C	Kualitas Sedang
373.	Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	55,92	Kuning	C	Kualitas Sedang
374.	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	55,86	Kuning	C	Kualitas Sedang
375.	Pemerintah Kabupaten Buru	54,99	Kuning	C	Kualitas Sedang
376.	Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	54,97	Kuning	C	Kualitas Sedang
377.	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	54,19	Kuning	C	Kualitas Sedang
378.	Pemerintah Kabupaten Mimika	54,11	Kuning	C	Kualitas Sedang
379.	Pemerintah Kabupaten Tambrauw	52,98	Merah	D	Kualitas Rendah
380.	Pemerintah Kabupaten Toli-toli	52,17	Merah	D	Kualitas Rendah

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
381.	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	52,14	Merah	D	Kualitas Rendah
382.	Pemerintah Kabupaten Malaka	51,77	Merah	D	Kualitas Rendah
383.	Pemerintah Kabupaten Merauke	50,89	Merah	D	Kualitas Rendah
384.	Pemerintah Kabupaten Buton	49,86	Merah	D	Kualitas Rendah
385.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	49,5	Merah	D	Kualitas Rendah
386.	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	48,57	Merah	D	Kualitas Rendah
387.	Pemerintah Kabupaten Konawe	48,55	Merah	D	Kualitas Rendah
388.	Pemerintah Kabupaten Sigi	47,70	Merah	D	Kualitas Rendah
389.	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	47,41	Merah	D	Kualitas Rendah
390.	Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	45,60	Merah	D	Kualitas Rendah
391.	Pemerintah Kabupaten Muna	42,72	Merah	D	Kualitas Rendah
392.	Pemerintah Kabupaten Donggala	42,49	Merah	D	Kualitas Rendah
393.	Pemerintah Kabupaten Asmat	42,18	Merah	D	Kualitas Rendah
394.	Pemerintah Kabupaten Nabire	39,56	Merah	D	Kualitas Rendah
395.	Pemerintah Kabupaten Tolikara	37,06	Merah	D	Kualitas Rendah
396.	Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	36,41	Merah	D	Kualitas Rendah
397.	Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni	34,05	Merah	D	Kualitas Rendah
398.	Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama	33,11	Merah	D	Kualitas Rendah
399.	Pemerintah Kabupaten Maybrat	32,23	Merah	D	Kualitas Rendah

No	Kabupaten	Nilai	Zona	Kategori	Opini
400.	Pemerintah Kabupaten Dogiyai	30,84	Merah	E	Kualitas Terendah
401.	Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	30,57	Merah	E	Kualitas Terendah
402.	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	30,14	Merah	E	Kualitas Terendah
403.	Pemerintah Kabupaten Yalimo	29,79	Merah	E	Kualitas Terendah
404.	Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	27,12	Merah	E	Kualitas Terendah
405.	Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	26,97	Merah	E	Kualitas Terendah
406.	Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	26,69	Merah	E	Kualitas Terendah
407.	Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	26,65	Merah	E	Kualitas Terendah
408.	Pemerintah Kabupaten Deiyai	23,18	Merah	E	Kualitas Terendah
409.	Pemerintah Kabupaten Supiori	22,79	Merah	E	Kualitas Terendah
410.	Pemerintah Kabupaten Keerom	21,12	Merah	E	Kualitas Terendah
411.	Pemerintah Kabupaten Nduga	20,23	Merah	E	Kualitas Terendah
412.	Pemerintah Kabupaten Waropen	19,80	Merah	E	Kualitas Terendah
413.	Pemerintah Kabupaten Sarmi	17,67	Merah	E	Kualitas Terendah
414.	Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	14,45	Merah	E	Kualitas Terendah
415.	Pemerintah Kabupaten Paniai	10,22	Merah	E	Kualitas Terendah



**KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM**

Nomor : 153/B.3/A.7/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Informasi hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Jakarta, 23 November 2023

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan

di –

Tempat

Sehubungan dengan surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan No. 503/54/DPMPTSP-PTTK-BLG/2023 tanggal 25 Oktober 2023 perihal Hasil Penkin PTSP 2023, dengan ini kami menyampaikan informasi hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada Tahun 2023 sesuai hasil verifikasi dan validasi lapangan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Daerah	Peringkat	Nilai Akhir	Kategori
1.	Kabupaten Balangan	28 dari 415 Kabupaten	88,475	Sangat Baik

Keterangan :

Kategori hasil Penilaian Kinerja:

1. Sangat Baik (80,00 s.d 100,00)
2. Baik (60,00 s.d 79,99)
3. Kurang Baik (Kurang dari 59,99)



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Kerja Sama Pelaksanaan
Berusaha



Jhonny Sakti Meyer Siburian

Tembusan Yth. :

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM.



PENGHARGAAN

diberikan Kepada

Pemerintah Kabupaten Balangan

atas Komitmen Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk
Pekerja Rentan

Banjarmasin, 7 September 2023

ERFANKURNIAWAN
Kakanwil Kalimantan
BPJS KETENAGAKERJAAN

Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA

WINDAYANI FACHRIA SANTI, S.Sos, M.AP

NIP. 19860126 201001 2 022

SEBAGAI

SIPIH NEGARA BERPRESTASI

TAHUN 2023

19 November 2023

BALANGAN

S.Ag, M.I.Kom

#bangga
melayani
bangsa





OMBUDSMAN
RI



DIAGRAM PENGHARGAAN
PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2023

BERDASARKAN SK KETUA OMBUDSMAN RI NOMOR 418 TAHUN 2023

TENTANG HASIL PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023

DIBERIKAN KEPADA

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN



ZONA HIJAU

KUALITAS TINGGI

JAKARTA, 14 DESEMBER 2023

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



MOKHAMMAD NAJIH, S.H., M.HUM., PH.D.



KLINIK
INORA

TIM JEJARING KLINIK INOVASI BALANGAN
(KLINIK INOBA) TAHUN 2023

Jl. Jenderal A. Yani Km. 4,3 Paringin Selatan - Kabupaten Balangan
Kode Pos 71618 Telp/fax. (0526) 2026788/2029504

BerAKHLAK #malaycin
#bangsaco

Peningkatan Pemanggharan

Nomor : 414.44/853/Klinik-Inoba/2023

Diberikan Kepada :

Akhmad. SH. MM

Sebagai Pamong Inovasi Teraktif dan Terbaik 2023 dalam mendorong
Peningkatan Budaya Inovasi di Unit Kerja/Satuan Kerjanya.

Paringin, 08 Mei 2023
Bupati Balangan,



H. Abdul Hadi, S.Ag, M.I.Kom

Piagam Penghargaan

DIBERIKAN KEPADA
ABDUL BASYID, S.Sos, M.AP

NIP. 19720716 199403 1 007

SEBAGAI

APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

TAHUN 2023

Paringin, 29 November 2023

BUPATI BALANGAN



H. ABDUL HADI, S.Ag, M.I.Kom

BerAKHLAK > bangga
melayani
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jln. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Tejo (fax: (0526)2028114 Kode Pos 71611 dpmpsp.balangan@gmail.com



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Nomor SOP	:	2023
Tanggal Pembuatan	:	10 Juli 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	10 Juli 2023
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD.
Dasar Hukum		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan 1. Renstra OPD 2. Format penyusunan LAKIP 3. Dokumen Perjanjian Kinerja 4. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD 5. Laporan Realisasi Keuangan 6. Perangkat Komputer
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan 1. Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja

SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag PKZAK	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan LAKIP		MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	2 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	1 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
4.	Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat					Format penyusunan LAKIP	3 Jam	Format penyusunan LAKIP	-
5.	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul					Format penyusunan LAKIP	4 Hari	Draft LAKIP	SOP perjanjian kinerja
6.	Membuat Dokumen LAKIP					Draft LAKIP	2 Hari	Dokumen LAKIP	SOP perjanjian kinerja
7.	Mengoreksi Dokumen LAKIP					Dokumen LAKIP	1 Hari	Dokumen LAKIP	-
8.	Menyampaikan Dokumen LAKIP kepada Kepala Dinas untuk memintakan persetujuan					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	Konsep LAKIP

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU				Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubag PK2AK	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9.	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kepala Dinas kemudian diteruskan ke Kasubag Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja					Dokumen LAKIP	10 Menit	Disposisi persetujuan dokumen LAKIP	Dokumen LAKIP	
10.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar	-	
11.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen LAKIP untuk di Upload sebagai Dokumen Kelengkapan SAKIP pada e-review SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi					Dokumen LAKIP	1 Jam	Dokumen LAKIP	-	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSFORMASI DAN TENAGA KERJA






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING/EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jln. Jenderal A. Yani Km.1 No.1 Parangin Telp (fax.(0526)2028114 Kode Pos 71611 dpmpbsp.balangan@gmail.com

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</p>	<p>Nomor SOP : 2023</p> <p>Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2023</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Pengesahan : 10 Juli 2023</p> <p>Disahkan Oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</p> <p>Nama SOP Monitoring/Evaluasi Internal Capaian Kinerja</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 4. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan Bidang di lingkup Dinas
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan 2. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja <p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan monitoring/evaluasi internal capaian kinerja tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan. 	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renja 2. Dokumen Laporan Fisik dan Kegiatan 3. Format Indikator Kinerja Utama 4. Perangkat Komputer <p>Pencatatan dan Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja

SOP : MONITORING/EVALUASI INTERNAL CAPAIAN KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			ket
		3 Sekretaris	4 Kepala Bidang	5 Kasubag Program	6 Kepala Seksi	7 Kepala Dinas	8 Kelengkapan dan Peralatan	9 Waktu	10 Output	
1	2									11
1.	Membuat format isian monitoring evaluasi kinerja	MULAI					Format isian	15 menit	Disposisi	
2.	Melakukan pengumpulan data kinerja Bidang Per Triwulan						Laporan Evaluasi Kinerja	2 hari	Lembar Disposisi	-
3.	Mengolah data kinerja Dinas						Laporan Evaluasi Kinerja	7 hari	7 hari	-
4.	Menyusun rencana monitoring evaluasi kinerja setiap Bidang						Jadwal, Format Isian, Laporan Evaluasi Kinerja	2 hari	Draft Laporan Kinerja	
5.	Melaksanakan monitoring evaluasi kinerja						Blangko Money	7 hari	Draft Laporan Kinerja	-
6.	Mengumpulkan data dan informasi hasil monitoring evaluasi						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	3 jam	Draft laporan monitoring & evaluasi kinerja	
7.	Mengolah dan menganalisa data dan informasi hasil monitoring evaluasi						Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 hari	Draft laporan monitoring	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Seksi	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Menyusun draft laporan monitoring evaluasi kinerja Dinas			→			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	2 hari	Draft laporan monitoring g evaluasi kinerja	
9.	Membahas draft laporan hasil monitoring			→			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 Minggu	Draft laporan monitoring g evaluasi kinerja	-
10.	Melakukan perbaikan/koreksi Draft laporan hasil monitoring			→			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	3 hari	Draft laporan monitoring g evaluasi kinerja	
11.	Melakukan verifikasi Draft laporan hasil monitoring			→			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 hari	Draft laporan monitoring g evaluasi kinerja	

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			ket	
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Seksi	Kepala Dinas	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Menyusun dokumen monitoring evaluasi kinerja Dinas			→			Draft laporan monitoring evaluasi kinerja	1 hari	Laporan Monitoring & Evaluasi	
13.	Menyimpan dokumen monitoring evaluasi kinerja Dinas	→					Laporan Monitoring Evaluasi	15 menit	Laporan Monitoring & Evaluasi	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA






**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jln. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp (fax) (0526) 2028114 Kode Pos 71611 dmpptsp.balangan@gmail.com

 <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</p>	<p>Nomor SOP : Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2023 Tanggal Revisi : - Tanggal Pengesahan : 10 Juli 2023 Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Nama SOP : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program 2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer

Keterkaitan	Peralatan/Perengkapan 1. Lembaran Kerja 2. Ruangan rapat internal 3. Komputer, Printer, LCD, ATK, 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan 1. Disimpan sebagai dokumen RKT

SOP : PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			Star/Jabatan Fungsional Umum	MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubag Program		Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Membuat konsep format RKT yang memuat : sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaiannya						3 Hari	Konsep RKT	-
2.	Mengadakan dan menyampaikan konsep format RKT ke masing-masing bagian untuk diisi						3 Hari	Konsep RKT	-
3.	Mengumpulkan format isian dan membuat konsep RKT untuk bahan rapat internal penyusunan RKT						2 Hari	Konsep RKT	
4.	Melaksanakan rapat koordinasi penyusunan RKT mencakup pembagian tugas, jadwal penyelesaian, jadwal pertemuan progres						3 Jam	Konsep RKT Notulen	SOP Rapat Internal
5.	Memperbaharui konsep RKT berdasarkan masukan hasil rapat menjadi draft RKT dan mengajukannya kepada Kasubag untuk dinilai dan diperiksa						3 Hari	Draft Konsep RKT	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU				Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6.	Memeriksa dan mencermati draft RKT. Jika sudah baik diberikan paraf untuk diteruskan kepada kepala dan jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki						Draft Konsep RKT	20 Menit	Disposisi Draft Konsep RKT	-	
7.	Memperbaiki draft RKT kembali dan menyerahkannya kepada kepala untuk dinilai dan diberi tanda tangan						Disposisi Draft Konsep RKT	1 Jam	Draft Konsep RKT	-	
8.	Menilai dan mencermati draft RKT. Jika draft sudah sesuai akan diberi tanda tangan dan jika belum akan dikembalikan untuk diperbaiki						Draft Konsep RKT	20 Menit	RKT	-	
9.	Menerima, mengandakan dan mendistribusikan RKT ke masing-masing bagian dan pengadministrasi umum						Disposisi RKT Fotocopy, penjiilitan Buku RKT	3 Hari	Dokumen RKT	Pelaksanaan terkait percetakan	
10.	Menerima RKT dan menyimpannya sebagai dokumen arsip							5 Menit	Arsip	-	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSPIRASI DAN TENAGA KERJA





**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jln. Jenderal A. Yani Km. 1 No.1 Paringin Teip (fax. (0526)2028114 Kode Pos 71611 dpmpstp.balangan@gmail.com)



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Nomor SOP	:	2023
Tanggal Pembuatan	:	10 Juli 2023
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Pengesahan	:	10 Juli 2023
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja	
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengolahan data Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 	
Keterkaitan	<ol style="list-style-type: none"> SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan SOP Penyusunan Laporan Kinerja 	
Peringatan	<ol style="list-style-type: none"> Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIP tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan. 	
Peralatan/Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"> Renstra Renja Format Indikator Kinerja Utama Perangkat Komputer 	
Pencatatan dan Pendataan	<ol style="list-style-type: none"> Disimpan sebagai dokumen pengendalian dan evaluasi kinerja 	

SOP : PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU				
		3 Sekretaris	4 Kepala Bidang	5 Kasubag Program	6 Kepala Seksi	7 Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	8 Kelengkapan dan Peralatan	9 Waktu	10 Output	11 ket	
1	1. Mengumpulkan data laporan kinerja triwulan kepada subbag/seksi, OPD dan instansi terkait	MULAI					Perjanjian Kinerja, Rencana aksi	15 Menit	Disposisi		
2	2. Merekap laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Kinerja Aksi	30 Menit	Lembar Disposisi	-	
3	3. Mengolah data laporan kinerja triwulan						Disposisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Laporan Progres Bulanan	2 Menit	Draft Laporan Kinerja	-	
4	4. Menyusun laporan kinerja triwulan						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja		
5	5. Mensosialisasikan laporan kinerja triwulan kepada pejabat terkait						Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Draft Laporan Kinerja	30 Menit	Draft Laporan Kinerja	-	
6	6. Merekap 2 (dua) laporan triwulan untuk menyusun laporan						Catatan Pembagian Tugas	2 Hari	Disposisi		

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU			ket
		Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag Program	Kepala Seksi	Staf Penyusun Evaluasi Kinerja	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Menyusun laporan semester dan laporan tahunan		Ya		Tidak		Data Laporan Kinerja Triwulan	120 Hari	Lembar Disposisi	-
8.	Mensosialisasikan laporan semesteran		Tidak				Hasil Koreksi Laporan Kinerja Triwulan	60 Menit	Draft Laporan Kinerja	
9.	Menyusun 2 (dua) Laporan semesteran menjadi laporan kinerja tahunan		Ya				Laporan Kinerja Triwulan	15 Menit	Draft Laporan Kinerja	-

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA



Dr. Akhriani, S.Pd, M.AP
NIP. 197102281997021002



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA/PENILAIAN SKP**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Jln. Jenderal A.Yani Km.1 No.1 Paringin Telp (fax.(0526)2028114 Kode Pos 71611 dpmpstp.balangan@gmail.com



**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

<p>Nomor SOP : 2023</p> <p>Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2023</p> <p>Tanggal Revisi : -</p> <p>Tanggal Pengesahan : 10 Juli 2023</p> <p>Disahkan Oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA</p>	
<p>Nama SOP : Pelaksanaan Pengukuran Kinerja/ Penilaian SKP</p>	
<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan kinerja 4. Memahami cara penilaian SKP</p>	
<p>Dasar Hukum</p> <p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Permendagri No. 73 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan</p>	
<p>Keterkaitan</p> <p>1. SOP Pembuatan Pelaksanaan Kegiatan 2. SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja</p>	
<p>Peralatan/Perengkapan</p> <p>1. Renja 2. Dokumen Laporan Fisik dan Kegiatan</p>	

3. SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA	3. Format Indikator Kinerja Utama
4. SOP Usulan Promosi Jabatan	4. Perangkat Komputer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Jika SOP tidak dilaksanakan maka sasaran Kinerja pegawai tidak berjalan dengan baik.	1. Disimpan sebagai dokumen kepegawaian dan dokumen pengendalian

SOP : PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA/PENILAIAN SKP

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU				ket	
		Atasan Langsung	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Para Pegawai	Staf	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Mengumpulkan data kinerja atas target yang telah ditetapkan											
2.	Memeriksa dan mengecek data kinerja pegawai											
3.	Pengetikan/penginputan kinerja atas penilaian sasaran kinerja pegawai											
4.	Memvalidasi hasil inputan/memberikan penilaian atas kinerja pegawai											

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BUKU				ket
		Atasan Langsung	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Para Pegawai	Staf	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	Menandatangani dokumen pengukuran kinerja atas penilaian kinerja pegawai yang telah disetujui						Dokumen pengukuran kinerja	1 jam	Dokumen pengukuran kinerja yang telah ditandatangani	-	
6.	Pengandaan Dokumen Pengukuran Kinerja.						Dokumen pengukuran kinerja	1 jam	Dokumen pengukuran kinerja		
7.	Pengarsipan Dokumen Pengukuran kinerja atas penilaian kinerja pegawai						- Dokumen pengukuran kinerja - Box file	15 Menit	Tersimpannya dokumen pengukuran kinerja	-	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Dr. Akhriant-Syrd. M.AP
NIP. 19710228 199702 1 002

